



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
NUSA TENGGARA BARAT



foto: abihulwa.blogspot.com

LAPORAN PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2018

**Pendampingan Implementasi SPMI di Sekolah Model dan
Sekolah Imbas**

LAPORAN PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2018

**Pendampingan Implementasi SPMI di Sekolah Model dan
Sekolah Imbas**

MAKLUMAT

1. Rapor mutu dalam laporan ini diperoleh dari hasil olahan data evaluasi diri sekolah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Data evaluasi diri sekolah diperoleh melalui pengisian instrumen pemetaan mutu yang dilakukan oleh setiap sekolah. Instrumen tersebut dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Laporan ini dapat dipertanggungjawabkan karena disusun berdasarkan hasil pendampingan, supervisi, observasi, dan monitoring yang dilakukan oleh LPMP NTB bersama fasilitator daerah selama pelaksanaan pendampingan SPMI.
3. Data dan informasi yang ada dalam laporan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memerlukan untuk kepentingan pendidikan dengan ketentuan mencamtumkan LPMP NTB sebagai sumbernya.

Informasi atau pertanyaan tentang SPMP lebih lanjut dapat menghubungi:

Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat
Jl. Panji Tilarnegara No.8 Mataram
Telp/HP: 0370-7507692/08113906669
Email : ultlpmpntb@gmail.com
 : pmslpmpntb@gmail.com
Web : lpmpntb.kemdikbud.go.id

Mataram, April 2019



Minhajul Ngabidin, S.Pd., M. Si.
NIP.196905101992011002

PENGANTAR KEPALA LPMP NTB



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu. Ada dua sistem penjaminan mutu yang dikembangkan dalam Permendikbud tersebut, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB telah melatih, membina, dan mendampingi 150 sekolah model dan 750 sekolah imbas dalam mengimplementasikan SPMI. Implementasi SPMI oleh sekolah model dan sekolah imbas merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah satuan pendidikan atau program telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Sekolah model dituntut mampu menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut. Sekolah model diharapkan dapat memberikan gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di Propinsi Nusa Tenggara Barat pada khususnya.

Indikator keberhasilan dari pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan adalah terbentuknya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang mampu melaksanakan seluruh siklus penjaminan mutu secara mandiri dan berkesinambungan. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar. Dampak jangka panjang adalah terbangunnya budaya mutu di satuan pendidikan yang dapat berdampak pada meningkatnya mutu hasil belajar.

Bagian terpenting dalam siklus SPMI adalah pelaksanaan pemenuhan mutu yang merupakan upaya sekolah dalam melakukan perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan. Sebelum melaksanakan pemenuhan mutu, sekolah harus membuat laporan analisis yang berisi deskripsi, analisis, dan refleksi mengenai keadaan, kinerja, dan perangkat pendidikan di sekolah tersebut sebagai hasil kajian dan assesmen yang mendalam dan bersifat internal. Laporan tersebut menjadi dasar dalam peningkatan mutu dan penyusunan rencana kerja sekolah. Selain itu, laporan hasil pemetaan internal ini dapat menjadi sumber informasi kebijakan untuk penyusunan program pengembangan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi.

Data peta mutu yang dihasilkan melalui penilaian internal oleh sekolah dapat dimanfaatkan oleh sekolah dalam merumuskan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan tidak hanya sampai pada kriteria minimal SNP, tetapi bisa melebihi SNP. Rumusan itu meliputi kekuatan dan kelemahan sekolah tersebut yang berkaitan dengan pemenuhan 8 SNP. Sekolah dapat melihat potret dirinya dalam hal: (1) peta kompetensi lulusan yang dihasilkan; (2) kesesuaian dan relevansi kurikulum yang dimiliki sekolah untuk menghasilkan kompetensi lulusan yang diharapkan; (3) proses pendidikan yang telah dilaksanakan oleh sekolah dalam membentuk lulusan yang diharapkan; (4) pelaksanaan penilaian yang telah dilaksanakan oleh sekolah dan dampaknya dalam pada peningkatan proses pembelajaran; (5) kondisi pendidik dan tenaga kependidikan serta perannya dalam melakukan transformasi pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap siswa seperti yang diharapkan; (6) ketercukupan, kesesuaian, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan serta pembiayaan dalam pelaksanaan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan seperti yang diharapkan; dan (7) pengelolaan sumber daya sekolah yang menunjang pelaksanaan pendidikan yang bermutu.

Upaya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah terus dilakukan oleh pemerintah. Berbagai terobosan baru juga dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan secara global. Regulasi-regulasi telah dikeluarkan untuk mendorong dan memastikan tercapainya kualitas mutu pendidikan yang semakin baik. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab banyak pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat. Untuk itu, kerja sama dan sinergitas sangat diperlukan demi tercapainya mutu pendidikan yang semakin baik, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PRAKATA

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemdikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Sebagai tindak lanjut dari Permendikbud tersebut, Dikdasmen melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) mengembangkan sekolah model untuk menjadi percontohan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Di Nusa Tenggara Barat, LPMP NTB menetapkan sebanyak 150 sekolah model. Setiap sekolah model akan mengimbaskan kepada 5 sekolah lain yang berada di sekitar sekolah model tersebut. LPMP NTB memberikan pendampingan selama mengimplementasikan SPMI. Pengawasan proses pendampingan implementasi SPMI di sekolah model dan sekolah imbas dilakukan oleh Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi.

Laporan ini akan menyajikan semua kegiatan dan hasil pendampingan implementasi SPMI di sekolah model dan sekolah imbas pada tahun 2018. Selain berisi tentang implementasi SPMI, laporan ini juga berisi tentang analisis peta mutu tingkat Provinsi NTB semua jenjang dan analisis peta mutu sekolah model semua jenjang. Pembahasan juga meliputi indeks efektivitas (IE) pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di sekolah model. Perbandingan hasil pemetaan internal oleh satuan pendidikan dengan hasil pemetaan eksternal oleh BAN-S/M juga menjadi bagian dalam laporan ini. Laporan disusun berdasarkan hasil pendampingan, supervisi, observasi, dan monitoring yang dilakukan oleh LPMP NTB selama pelaksanaan

pendampingan. Kajian dalam laporan ini dominan bersifat deskriptif dan kuantitatif. Oleh karena itu, jika ada hal-hal yang memerlukan pendalaman lebih jauh perlu dilakukan kajian lain yang lebih komprehensif.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang takterhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para fasilitator daerah SPMI: Bu Sa'adah, Pak Rubiman, Pak Suratno, Pak Sahdi Janap, Pak Mahdi Hasan, Bu Hj. Hadijah, Bu Sri Nengah, Bu Hj. Habibah. Pak Hermansyah, Pak Junaidaman, Pak Sudarmin, Pak Budiono Basuki, Pak Ridwan, dan lain-lain yang telah memberikan bahan-bahan tambahan untuk melengkapi laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan kepada *stake holder* pendidikan di NTB dan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di masing-masing daerah. Bagi sekolah model dan sekolah imbas serta sekolah lain, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran bagaimana mengimplementasikan SPMI di sekolah sehingga pelaksanaan SPMI yang akan datang dapat memnbawa dampak yang optimal bagi peningkatan kualitas mutu pendidikan.

Akhirnya, kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya. Aamiin.

Mataram, April 2019

Tim Penulis

TIMP PENYUSUN

Pengarah	: Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si.	: Kepala LPMP NTB
Penanggung Jawab	: Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd.	: Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
Editor dan Penyunting	: Drs. Ma Min Shen, M.Pd. : Anggraini Naskawati, M.Pd. : Nurhidayati, S.Kom., MT. : Hartanto, S.S.	: Widyaaiswara Madya : Widyaaiswara Madya : Widyaaiswara Madya : Penyuluh Bahasa Indonesia
Penulis	: Musmuliadi, S.Si., M.Pd. : Yuyun Sambodo, S.Si., M.Pd.	: Analis Data Mutu Pendidikan : Analis Data Mutu Pendidikan
Pengolah Data	: Bq. Titik Hestina, S.Pd. : Ahlun Mariani, S.Si. : Kundiarto, S.Si.	: Analis Data Mutu Pendidikan : Pengolah Data Mutu Pendidikan : Pengolah Data Mutu Pendidikan
Pengumpul Data dan Bahan	: Ahmad Taufik Syukriyanto, S.Sos. : Margito, S.Pd. : Arinugroho Basuki Utomo, S.Sos.	: Pengolah Data Mutu Pendidikan : Pengolah Data Mutu Pendidikan : Pengadministrasi Umum

DAFTAR ISI

MAKLUMAT.....	iii
PENGANTAR KEPALA LPMP NTB	iv
PRAKATA	vi
TIMP PENYUSUN.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan	3
BAB II	
RAPOR MUTU NUSA TENGGARA BARAT	4
A. Pengumpulan Data Peta Mutu Pendidikan (PMP).....	4
B. Progres Pengiriman Data Peta Mutu Pendidikan	11
C. Analisis Peta Mutu Pendidikan.....	15
D. Rapor Mutu Provinsi Nusa Tenggara Barat	17
a. Capaian Mutu NTB Jenjang SD.....	17
b. Capaian Mutu NTB Jenjang SMP.....	22
c. Capaian Mutu NTB Jenjang SMA	27
d. Capaian Mutu NTB Jenjang SMK	32
BAB III	
RAPOR MUTU SEKOLAH MODEL	38
A. Sekolah Model	38
B. Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SD	41
C. Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SMP	45
D. Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SMA.....	48
E. Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SMK.....	51
F. Indeks Efektivitas Penjaminan Mutu Pendidikan (IE)	54
a. IE Sekolah Model Jenjang SD	55
b. IE Sekolah Model Jenjang SMP	57
c. IE Sekolah Model Jenjang SMA.....	59

d. IE Sekolah Model Jenjang SMK.....	61
G. Komparasi Hasil Pemetaan dengan Hasil Akreditasi oleh BAN-S/M	63
BAB IV	
PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SPMI	69
A. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	69
B. Fasilitator Nasional dan Fasilitator Daerah	71
C. Dana Bantuan Pemerintah	74
D. Evaluasi Pendampingan SPMI Tahun 2017	74
E. Pendampingan Implementasi SPMI.....	75
1. <i>In Service 1</i>	77
a. Pemetaan Mutu	77
b. Perencanaan Peningkatan Mutu	78
2. <i>On Service</i>	78
3. <i>In Service 2</i>	80
F. Diseminasi Hasil Implementasi SPMI	80
G. Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPMI di Sekolah Model	82
H. Pelaksanaan Siklus SPMI.....	83
BAB V	
ANALISIS HASIL MONITORING DAN EVALUASI	90
A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	90
B. Hasil Monitoring dan Evaluasi	91
a. Proses Pelaksanaan Pendampingan SPMI	91
b. Pemahaman Sekolah tentang SPMI	94
c. Hasil Implementasi SPMI.....	95
BAB VI	
PENUTUP.....	99
A. Simpulan.....	99
a. Peta Mutu Provinsi Nusa Tenggara Barat	99
b. Peta Mutu Sekolah Model	101
c. Indeks Efektivitas Penjaminan Mutu Pendidikan	103
d. Komparasi Hasil Pemetaan dengan Hasil Akreditasi oleh BAN-S/M	103
e. Implementasi SPMI di Sekolah Model.....	103
f. Evaluasi Pendampingan Implementasi SPMI	104
B. Saran Pengembangan	105
LAMPIRAN	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Diagram Alur Pengumpulan Data PMP	4
Gambar 2	Distribusi Jumlah Sekolah Setiap Kabupaten/Kota Perjenjang	11
Gambar 3	Progres Pengiriman PMP Secara Nasional Tahun 2016 – 2018.....	12
Gambar 4	Progres Pengiriman PMP Tahun 2016 – 2018 Setiap Kabupaten/Kota	13
Gambar 5	Proses Pengolahan dan Pemanfaatan Data PMP	16
Gambar 6	Grafik Capaian Mutu NTB Jenjang SD Tahun 2016 – 2018.....	19
Gambar 7	Grafik Capaian Mutu NTB Jenjang SMP Tahun 2016 – 2018.....	24
Gambar 8	Grafik Capaian Mutu NTB Jenjang SMA Tahun 2016 – 2018.....	28
Gambar 9	Grafik Capaian Mutu NTB Jenjang SMK Tahun 2016 – 2018.....	33
Gambar 10	Distribusi Sekolah Model Setiap Jenjang di 10 Kabupaten/Kota	38
Gambar 11	Persentase Sekolah Model Berdasarkan Jenjang	39
Gambar 12	Peta Distribusi Sekolah Model di Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.....	40
Gambar 13	Grafik Capaian Mutu Sekolah Model Jenjang SD Tahun 2016 – 2018.....	42
Gambar 14	Grafik Capaian Mutu Sekolah Model Jenjang SMP Tahun 2016 – 2018	47
Gambar 15	Grafik Capaian Mutu Sekolah Model Jenjang SMA Tahun 2016 – 2018.....	49
Gambar 16	Grafik Capaian Mutu Sekolah Model Jenjang SMK Tahun 2016 – 2018.....	52
Gambar 17	Indeks Efektivitas PMP Sekolah Model Jenjang SD	55
Gambar 18	Indeks Efektivitas PMP Sekolah Model Jenjang SMP	57
Gambar 19	Indeks Efektivitas PMP Sekolah Model Jenjang SMA.....	60
Gambar 20	Indeks Efektivitas PMP Sekolah Model Jenjang SMK.....	62
Gambar 21	Ilustrasi Konsistensi Hasil Evaluasi Internal dengan Evaluasi Eksternal	64
Gambar 22	Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal	70
Gambar 23	Bimtek Penyegaran Fasiltator Daerah.....	72
Gambar 24	Asistensi Dana Bantuan Pemerintah Sekolah Model.....	74
Gambar 25	Penyegaran dan Evaluasi Sekolah Model	74
Gambar 26	Alur Pendampingan Implementasi SPMI.....	76
Gambar 27	Suasana Diskusi Perencanaan Pemenuhan Mutu.....	78
Gambar 28	Geliat On Service Pendampingan SPMI di Sekolah Model dan Sekolah Imbas	79
Gambar 29	Pemilihan Best Practice Jenjang SD Perwakilan Kabupaten Sumbawa	80
Gambar 30	Pojok Pameran Produk SPMI Salah Satu Sekolah Model.....	81
Gambar 31	Para Menang Diseminasi Best Practices SPMI Jenjang SMK	82
Gambar 32	Distribusi Sekolah Model Sasaran Monev SPMI	90
Gambar 33	Tingkat Keterlibatan Stake Holder Pendidikan dalam Pelaksanaan SPMI	92
Gambar 34	Tingkat Pelibatan Stake Holder Pendidikan dalam Layanan Sekolah Bermutu	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Distribusi Jumlah Pertanyaan Instrumen Pemetaan Pendidikan	5
Tabel 2	Distribusi Jenis Responden Pemetaan Mutu Setiap Satuan Pendidikan	6
Tabel 3	Tabulasi Data dan Informasi dalam Kuesioner PMP Berdasarkan Jenis Responden	7
Tabel 4	Data Jumlah Sekolah yang Mengirim dan Tidak Mengirim Data PMP Tahun 2016 – 2018 .	14
Tabel 5	Kategori Capaian Mutu dan Akreditasi Sekolah.....	17
Tabel 6	Distribusi Sekolah Jenjang SD Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016-2018.....	18
Tabel 7	Capaian Mutu NTB Setiap Standar dan Indikator Jenjang SD Tahun 2018	21
Tabel 8	Distribusi Sekolah Jenjang SMP Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016 – 2018	23
Tabel 9	Capaian Mutu NTB Setiap Standar dan Indikator Jenjang SMP Tahun 2018	25
Tabel 10	Distribusi Sekolah Jenjang SMA Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016 – 2018.....	27
Tabel 11	Capaian Mutu NTB Setiap Standar dan Indikator Jenjang SMATahun 2018	29
Tabel 12	Distribusi Sekolah Jenjang SMK Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016 – 2018.....	32
Tabel 13	Capaian Mutu NTB Setiap Standar dan Indikator Jenjang SMK Tahun 2018	35
Tabel 14	Distribusi Sekolah Model Jenjang SD Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016 – 2018	41
Tabel 15	Distribusi Sekolah Model Jenjang SMP Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016 – 2018	45
Tabel 16	Distribusi Sekolah Model Jenjang SMA Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016 – 2018....	48
Tabel 17	Distribusi Sekolah Model Jenjang SMK Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016 – 2018....	51
Tabel 18	Sebaran Sekolah Model SD Berdasarkan Perbandingan Hasil Akreditasi	66
Tabel 19	Sebaran Sekolah Model SMP Berdasarkan Perbandingan Hasil Akreditasi	67
Tabel 20	Sebaran Sekolah Model SMA Berdasarkan Perbandingan Hasil Akreditasi	67
Tabel 21	Daftar Fasilitator Nasional dan Fasilitator Daerah SPMI Tahun 2018.....	72
Tabel 22	Daftar Pemenang Diseminasi Hasil SPMI tahun 2018.....	82
Tabel 23	Rapor Mutu untuk Standar Isi SMPN 1 Sakra	86
Tabel 24	Hasil Anlisis Kekuatan dan Kelemahan Standar.....	86
Tabel 25	Analisis Masalah dan Akar Masalah serta Rekomendasi Perbaikan	87
Tabel 26	Analisis Kekuatan dan Kelemahan serta Rekomendasi Perbaikan	88
Tabel 27	Bentuk Keterlibatan Stake Holder Pendidikan dalam Pelaksanaan SPMI	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Sekolah Model Peserta Diseminasi Hasil SPMI Tahun 2018	107
Lampiran 2	Rapor Mutu NTB Jenjang SD Tahun 2016-2018.....	108
Lampiran 3	Rapor Mutu NTB Jenjang SMP Tahun 2016-2018.....	114
Lampiran 4	Rapor Mutu NTB Jenjang SMA Tahun 2016-2018	120
Lampiran 5	Rapor Mutu NTB Jenjang SMK Tahun 2016-2018	126
Lampiran 6	Capaian Mutu SNP Sekolah Model Jenjang SD Tahun 2016-2018.....	132
Lampiran 7	Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SD Tahun 2018	133
Lampiran 8	Capaian Mutu SNP Sekolah Model Jenjang SMP Tahun 2016-2018	134
Lampiran 9	Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SMP Tahun 2018	135
Lampiran 10	Capaian Mutu SNP Sekolah Model Jenjang SMA Tahun 2016-2018.....	136
Lampiran 11	Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SMA Tahun 2018.....	137
Lampiran 12	Capaian Mutu SNP Sekolah Model Jenjang SMK Tahun 2016-2018.....	138
Lampiran 13	Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SMK Tahun 2018.....	139
Lampiran 14	Hasil Akreditasi Versi BAN dan Versi Capaian Mutu 2018 Jenjang SD.....	140
Lampiran 15	Hasil Akreditasi Versi BAN dan Versi Capaian Mutu 2018 Jenjang SMP	142
Lampiran 16	Hasil Akreditasi Versi BAN dan Versi Capaian Mutu 2018 Jenjang SMA	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah terus dilakukan oleh pemerintah. Berbagai terobosan baru juga dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan secara global. Regulasi-regulasi telah dikeluarkan untuk mendorong dan memastikan tercapainya kualitas mutu pendidikan yang semakin baik. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 telah mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal ataupun informal harus melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu ini dilakukan dalam rangka memenuhi atau melampaui SNP.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu. Ada dua sistem penjaminan mutu yang dikembangkan dalam Permendikbud tersebut, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sementara itu, SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BSNP, dan BAN-S/M atau pihak eksternal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

SPMI adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Dalam implementasinya, SPMI dilaksanakan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas 1) pemetaan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan SNP; 2) penyusunan rencana peningkatan mutu

yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah; 3) pelaksanaan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran; 4) monitoring dan evaluasi atau audit internal proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan 5) penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk memenuhi target berikutnya.

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab banyak pihak. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 memberikan arahan yang jelas tentang tugas dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sebagai tindak lanjut dari Permendikbud tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) mengembangkan sekolah model untuk menjadi percontohan pelaksanaan SPMI. Sekolah model ini ditetapkan dan dibina oleh LPMP berdasarkan usulan dari dinas pendidikan dan kebudayaan propinsi dan kabupaten/kota. LPMP NTB menetapkan dan membina sebanyak 150 sekolah model. Selain menetapkan dan membina sekolah model, LPMP NTB juga menetapkan dan membina sekolah imbas di bawah koordinator sekolah model. Setiap sekolah model akan mengimbaskan kepada 5 sekolah lain yang lokasi berdekatan dengan sekolah model tersebut. Pengawasan pendampingan dan implementasi SPMI di sekolah model dan sekolah imbas dilakukan oleh Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi.

Laporan ini menyajikan semua aktivitas dan hasil pendampingan implementasi SPMI di sekolah model dan sekolah imbas pada tahun 2018. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pendampingan, supervisi, observasi, dan monitoring yang dilakukan oleh LPMP NTB selama pelaksanaan pendampingan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan pendampingan implementasi SPMI kepada *stake holder* pendidikan di NTB dan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di masing-masing daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPMP NTB Tahun Anggaran 2018 No. SP DIPA-023.03.2.419545/2018.

C. Tujuan

1. Memberikan gambaran tentang peta mutu pendidikan Nusa Tenggara Barat tahun 2018;
2. Memberikan gambaran tentang peta mutu pendidikan sekolah model tahun 2018;
3. Memberikan gambaran tentang Indeks Efektivitas Penjaminan Mutu Pendidikan;
4. Memberikan gambaran tentang komparasi hasil pemetaan dengan hasil akreditasi sekolah/madrasah;
5. Memberikan gambaran tentang implementasi SPMI di sekolah model yang telah dilaksanakan pada tahun 2018;
6. Memberikan gambaran tentang hasil evaluasi pendampingan implementasi SPMI di sekolah model tahun 2018.

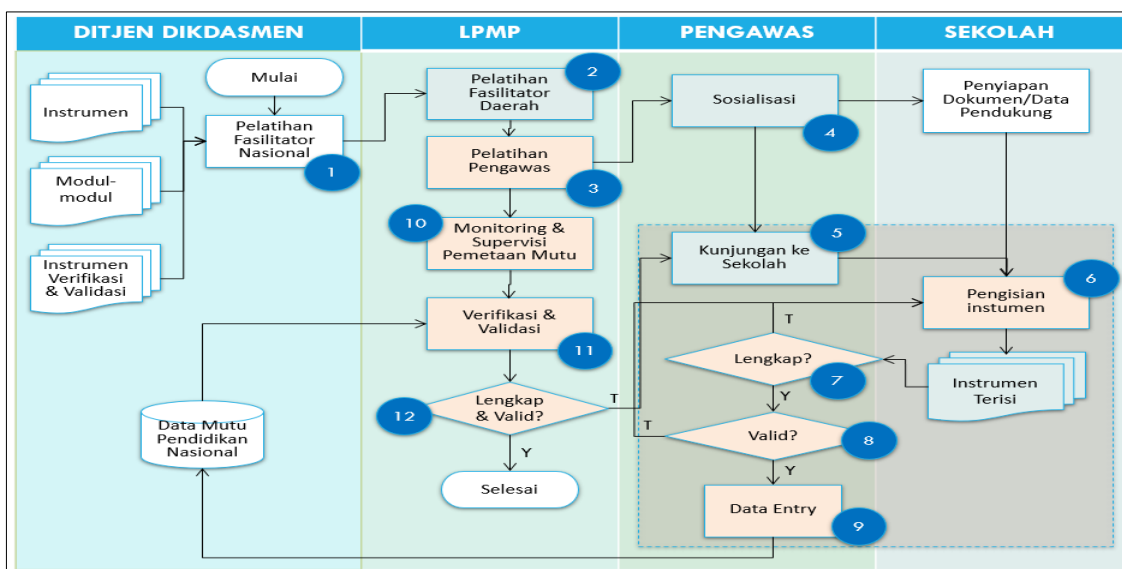
BAB II

RAPOR MUTU NUSA TENGGARA BARAT

A. Pengumpulan Data Peta Mutu Pendidikan (PMP)

Bagian terpenting dan paling dasar dalam siklus penjaminan mutu pendidikan adalah pemetaan mutu pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan merupakan proses yang terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan SNP mulai tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan SNP. Untuk mendukung proses pemetaan tersebut, Kemdikbud mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi mutu pendidikan sesuai dengan SNP.

Pemetaan mutu diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian SNP. Hal ini diperlukan agar satuan pendidikan dapat melakukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui SNP. Untuk itu, Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan sesuai dengan SNP. Pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan sekolah.



Gambar 1 Diagram Alur Pengumpulan Data PMP

Proses pengumpulan data peta mutu pendidikan (PMP) ini dilakukan secara sistematis agar data yang dihasilkan valid dan berkualitas. Proses ini dikawal mulai dari tingkat pusat sampai ke satuan pendidikan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Alur pengumpulan data PMP dapat dilihat pada Gambar 1. Untuk menjaga validitas dan kualitas data yang diperoleh, proses pengumpulan data dikawal oleh para pengawas pembina setiap satuan pendidikan. Pengawas pembina yang memberikan sosialisasi dan pendampingan pengisian instrumen pengumpulan data PMP. Agar pengawas pembina memiliki pemahaman yang komprehensif, sebelum mereka memberikan pendampingan pengisian instrumen pengumpulan data PMP, mereka dilatih oleh fasilitator daerah yang berasal dari unsur pengawas juga. Fasilitator daerah tersebut dilatih oleh fasilitator nasional yang telah disiapkan oleh Kemdikbud di setiap provinsi. Fasilitator nasional PMP terdiri atas unsur widyaiswara dan staf potensial LPMP NTB.

Pemetaan mutu dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Instrumen pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah disusun mengacu delapan komponen standar nasional pendidikan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, instrumen akreditasi yang disusun oleh Badan Akreditasi Nasional dan peraturan terkait lainnya. Instrumen pemetaan mutu terdiri atas dua jenis, yaitu kuesioner pemetaan mutu dan formulir data pokok pendidikan. Data dan informasi untuk formulir data pokok pendidikan diambil dari rekam data sekolah yang ada pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). Instrumen pemetaan mutu yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dapat diunduh di: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/perangkat/instrumen>. Daftar jumlah pertanyaan pada setiap standar yang ditanyakan melalui formulir dapodik dan instrumen pemetaan mutu ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Distribusi Jumlah Pertanyaan Instrumen Pemetaan Pendidikan

No	Standar	Jumlah Pertanyaan	
		Dapodik	PMP
1	Komptensi Lulusan	-	72
2	Isi	177	210
3	Proses	12	139
4	Penilaian	-	148
5	Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	68	-
6	Sarpras Pendidikan	208	49
7	Pengelolaan	7	168
8	Pembiayaan	4	5
Jumlah		476	790

Kegiatan pemetaan mutu oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui evaluasi diri sekolah (EDS). EDS ini dilakukan dengan mengisi instrumen pemetaan yang telah dikembangkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemetaan ini dilakukan dengan melibatkan kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan tenaga kependidikan, perwakilan siswa, perwakilan orang tua siswa/komite sekolah, dan pengawas pembina sekolah tersebut. Distribusi jumlah responden pemetaan mutu di setiap satuan pendidikan ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil isian instrumen EDS kemudian dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan untuk diolah menjadi peta mutu yang memuat capaian pemenuhan terhadap standar nasional pendidikan untuk disampaikan kepada sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selama proses EDS, pengawas sekolah dan/atau petugas pemetaan mutu yang telah dibina oleh LPMP melakukan proses verifikasi dan validasi atas data yang akan disampaikan oleh sekolah.

Tabel 2 Distribusi Jenis Responden Pemetaan Mutu Setiap Satuan Pendidikan

JENIS RESPONDEN	JENJANG SD	JENJANG SMP, SMA/SMK
KEPALA SEKOLAH	1	1
GURU	MINIMAL 8 GURU KELAS	MINIMAL 1 GURU SETIAP MATA PELAJARAN
	MINIMAL 1 GURU PJOK	
	MINIMAL 1 GURU PENDIDIKAN AGAMA	
SISWA	MINIMAL 5 SISWA SETIAP TINGKAT KELAS (SISWA KELAS IV, V, DAN VI)	MINIMAL 5 SISWA SETIAP TINGKAT KELAS
KOMITE SEKOLAH/ORANG TUA SISWA	MINIMAL 1 PERWAKILAN PIMPINAN KOMITE	
	MINIMAL 2 PERWAKILAN ORANG TUA SISWA	
PENGAWAS	1 (PENGAWAS PEMBINA)	

Berdasarkan Tabel 2, responden pemetaan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan bersifat triangulasi. Semua unsur dalam satuan pendidikan tersebut diberikan ruang untuk menilai sekolah berdasarkan pengetahuan, data, dan informasi yang mereka miliki. Hal ini dimaksudkan agar data dan informasi peta mutu yang dihasilkan dalam satuan pendidikan tersebut komprehensif dengan validitas dan kualitas yang baik.

Tabel 3 Tabulasi Data dan Informasi dalam Kuesioner PMP Berdasarkan Jenis Responden

NO	DATA DAN INFORMASI	PERAN				
		KEPALA	PENGAWAS	GURU	SISWA	KOMITE
A	HASIL BELAJAR	Y	Y	Y	Y	Y
1	Permasalahan sikap siswa yang terjadi di sekolah	Y	Y	Y	-	Y
2	Tindak kekerasan yang terjadi di sekolah	Y	Y	Y	Y	Y
3	Capaian ketrampilan siswa di sekolah	Y	Y	Y	-	-
4	Kemahiran siswa di sekolah dalam menggunakan berbagai sumber informasi untuk belajar	Y	Y	Y	-	-
5	Kemahiran siswa di sekolah dalam menggunakan teknologi untuk belajar	Y	Y	Y	-	-
6	Kemandirian siswa di sekolah dalam bekerjasama untuk aktifitas belajar/kesiswaan	Y	Y	Y	-	-
7	Prestasi siswa/kelompok di sekolah atas pengetahuan yang dimiliki	Y	Y	-	-	-
8	Prestasi siswa/kelompok di sekolah atas karya yang dihasilkan seperti mesin, lukisan, prakarya dan lainnya	Y	Y	-	-	-
9	Prestasi siswa/kelompok di sekolah atas ketrampilan yang ditunjukkan seperti debat, menyanyi, olahraga dan lainnya	Y	Y	-	-	-
B	ISI PENDIDIKAN	Y	Y	Y	Y	Y
1	Perangkat pembelajaran di sekolah yang memuat karakteristik kompetensi sikap	Y	Y	Y	-	-
2	Perangkat pembelajaran di sekolah yang dikembangkan sesuai tingkat kompetensi sikap siswa	Y	Y	Y	-	-
3	Perangkat pembelajaran di sekolah yang memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	Y	Y	Y	-	-
4	Perangkat pembelajaran di sekolah yang dikembangkan sesuai tingkat kompetensi pengetahuan siswa	Y	Y	Y	-	-
5	Perangkat pembelajaran di sekolah yang memuat karakteristik kompetensi keterampilan	Y	Y	Y	-	-
6	Perangkat pembelajaran di sekolah yang dikembangkan sesuai tingkat kompetensi keterampilan siswa	Y	Y	Y	-	-
7	Kesesuaian tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi dalam mata pelajaran di sekolah	Y	Y	Y	-	-
8	Jumlah aspek kurikulum yang terselenggara dalam muatan lokal di sekolah	Y	Y	Y	-	-
9	Jenis perangkat kurikulum yang tersedia dan tersosialisasikan di sekolah	Y	Y	Y	-	-
10	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengembangkan kurikulum di sekolah	Y	Y	Y	-	Y
11	Kerangka dasar penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di sekolah	Y	Y	Y	-	-

NO	DATA DAN INFORMASI	PERAN				
		KEPALA	PENGAWAS	GURU	SISWA	KOMITE
12	Pembagian beban belajar di sekolah berdasarkan bentuk aktivitas pendalaman materi	Y	Y	Y	-	-
13	Kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah	Y	Y	Y	Y	Y
14	Komponen yang disusun dalam pengembangan silabus di sekolah	Y	Y	Y	-	-
C	PROSES PEMBELAJARAN	Y	Y	Y	Y	-
1	Bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun guru di sekolah	Y	Y	Y	-	-
2	Waktu pemeriksaan RPP di sekolah	Y	Y	Y	-	-
3	Komponen isi RPP yang disusun guru di sekolah	Y	Y	Y	-	-
4	Tahapan penyusunan RPP yang dilakukan di sekolah	Y	Y	Y	-	-
5	Pola penyusunan RPP oleh guru di sekolah	Y	Y	Y	-	-
6	Aktifitas yang dilakukan guru di sekolah saat membuka pembelajaran	Y	Y	Y	Y	-
7	Aktifitas yang dilakukan guru di sekolah saat melaksanakan pembelajaran	Y	Y	Y	Y	-
8	Aktifitas yang dilakukan siswa di sekolah saat melaksanakan pembelajaran	Y	Y	Y	Y	-
9	Metode pembelajaran yang digunakan di sekolah	Y	Y	Y	Y	-
10	Media belajar yang digunakan di sekolah	Y	Y	Y	Y	-
11	Sumber belajar yang digunakan di sekolah	Y	Y	Y	Y	-
12	Aktifitas yang dilakukan guru di sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran	Y	Y	Y	Y	-
13	Aktifitas yang dilakukan guru di sekolah saat menutup pembelajaran	Y	Y	Y	Y	-
14	Aspek dan perangkat penilaian otentik yang digunakan guru di sekolah	Y	Y	Y	-	-
15	Bentuk pemanfaatan hasil penilaian otentik oleh guru di sekolah	Y	Y	Y	-	-
16	Pihak yang melakukan pengawasan proses pembelajaran di sekolah	Y	Y	Y	-	-
17	Prinsip pengawasan proses pembelajaran yang diterapkan di sekolah	Y	Y	Y	-	-
18	Bentuk dokumen pengawasan proses pembelajaran yang ada di sekolah	Y	Y	Y	-	-
19	Periode pengawasan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah	Y	Y	Y	-	-
20	Bentuk tindak lanjut hasil pengawasan proses pembelajaran yang dilakukan sekolah	Y	Y	Y	-	-
D	PENILAIAN PEMBELAJARAN	Y	Y	Y	-	Y
1	Langkah yang dilakukan guru di sekolah dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar	Y	Y	Y	-	-
2	Cakupan teknik penilaian yang ada dalam pedoman penilaian pendidikan yang disusun sekolah	Y	Y	Y	-	-
3	Pertimbangan penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di sekolah	Y	Y	Y	-	-
4	Kesesuaian penilaian kompetensi sikap siswa di sekolah berdasarkan karakteristik kompetensi dasar	Y	Y	Y	-	-

NO	DATA DAN INFORMASI	PERAN				
		KEPALA	PENGAWAS	GURU	SISWA	KOMITE
5	Kesesuaian penilaian kompetensi pengetahuan siswa di sekolah berdasarkan karakteristik kompetensi dasar	Y	Y	Y	-	-
6	Kesesuaian penilaian kompetensi keterampilan siswa di sekolah berdasarkan karakteristik kompetensi dasar	Y	Y	Y	-	-
7	Teknik penilaian yang digunakan guru di sekolah untuk mengukur pencapaian sikap siswa	Y	Y	Y	-	-
8	Teknik penilaian yang digunakan guru di sekolah untuk mengukur pencapaian pengetahuan siswa	Y	Y	Y	-	-
9	Teknik penilaian yang digunakan guru di sekolah untuk mengukur pencapaian ketrampilan siswa	Y	Y	Y	-	-
10	Tindak lanjut yang dilakukan oleh guru di sekolah terhadap hasil penilaian belajar	Y	Y	Y	-	-
11	Bentuk laporan penilaian hasil belajar yang disusun oleh guru di sekolah	Y	Y	Y	-	-
12	Pertimbangan cara hitung penilaian pendidikan di sekolah	Y	Y	Y	-	-
13	Waktu penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran dan penilaian belajar siswa siswa oleh guru kepada kepala sekolah di sekolah	Y	Y	Y	-	Y
14	Waktu penyampaian laporan hasil ujian kepada orang tua di sekolah	Y	Y	Y	-	Y
15	Waktu penyampaian rekapitulasi laporan hasil ujian oleh sekolah kepada pemerintah daerah	Y	Y	Y	-	-
E	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Y	Y	Y	Y	Y
1	Pihak yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan sekolah	Y	Y	Y	-	Y
2	Pihak yang disosialisasikan mengenai perencanaan sekolah	Y	Y	Y	-	Y
3	Periode evaluasi terhadap dokumen perencanaan	Y	Y	Y	-	Y
4	Dasar perumusan dan penetapan arah dan kebijakan sekolah	Y	Y	Y	-	Y
5	Cakupan yang termuat dalam rencana kerja tahunan sekolah	Y	Y	Y	-	Y
6	Pedoman yang dimiliki dan disosialisasikan oleh sekolah	Y	Y	Y	Y	Y
7	Waktu pelaksanaan evaluasi pedoman sekolah	Y	Y	Y	-	Y
8	Cakupan pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah	Y	Y	Y	-	Y
9	Pelibatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah	Y	Y	Y	-	Y
10	Periode sekolah melakukan evaluasi diri sekolah terhadap Standar Nasional Pendidikan	Y	Y	Y	-	Y
11	Aturan yang dimuat berdasarkan jenis dokumen yang dimiliki sekolah	Y	Y	Y	Y	Y
12	Aktivitas yang dilakukan sekolah saat penerimaan siswa baru	Y	Y	Y	Y	Y

NO	DATA DAN INFORMASI	PERAN				
		KEPALA	PENGAWAS	GURU	SISWA	KOMITE
13	Bentuk orientasi siswa baru yang diselenggarakan sekolah	Y	Y	Y	Y	Y
14	Layanan kesiswaan yang disediakan di sekolah	Y	Y	Y	Y	Y
15	Pelatihan dan pengembangan yang sering diikuti oleh pendidik dan tenaga kependidikan sekolah	Y	Y	Y	-	-
16	Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah	Y	Y	Y	-	-
17	Aktivitas pendukung pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah	Y	Y	Y	Y	Y
18	Pembinaan dan kunjungan pengawas yang didapatkan sekolah	Y	Y	Y	-	-
19	Kondisi sistem informasi manajemen yang dimiliki sekolah	Y	Y	Y	-	Y
F	SARANA DAN PRASARANA	Y	Y	-	-	-
1	Kondisi lahan sekolah	Y	Y	-	-	-
2	Kondisi bangunan sekolah dari segi keselamatan	Y	Y	-	-	-
3	Kondisi bangunan sekolah dari segi kesehatan	Y	Y	-	-	-
4	Periode pelaksanaan pemeliharaan bangunan sekolah	Y	Y	-	-	-
5	Kondisi sarana pendukung proses pembelajaran sekolah	Y	Y	-	-	-

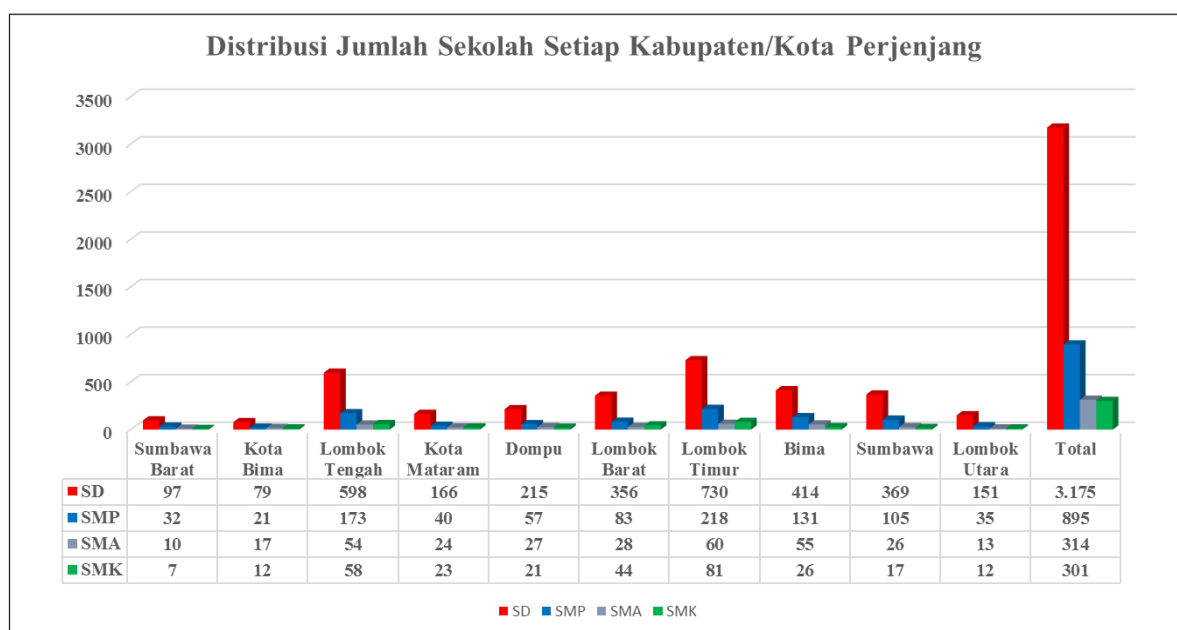
Instrumen PMP dikembangkan dari 8 SNP yang diturunkan menjadi 29 indikator. Seluruh indikator ini kemudian dikembangkan menjadi 189 subindikator. Lingkup instrumen secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran I-IV. Untuk menggali informasi dari indikator mutu ini dikemas menjadi 258 variabel pertanyaan yang terdiri atas 172 formulir data pokok pendidikan dan 86 kuesioner pemetaan mutu. Data dan informasi yang ditanyakan melalui instrumen pemetaan mutu pada setiap responden ditampilkan pada Tabel 4.

Bedasarkan Tabel 4, daftar data dan informasi yang ditanyakan kepada setiap responden pemetaan di sekolah berbeda-beda. Huruf Y yang tertera pada kolom masing-masing responden menyatakan bahwa data dan informasi dimaksud digali dari jenis responden tersebut. Misalnya, bagian E (pengelolaan pendidikan), nomor 14. Informasi tentang layanan kesiswaan yang disediakan oleh sekolah ditanyakan kepada seluruh responden, yaitu kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, komite, dan siswa. Ada juga informasi yang digali hanya pada responden tertentu. Contoh, komponen B tentang proses pembelajaran, nomor satu. Informasi tentang bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun guru di sekolah ditanyakan hanya kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru. Responden siswa dan komite tidak ditanya tentang hal tersebut.

B. Progres Pengiriman Data Peta Mutu Pendidikan

Setiap satuan pendidikan harus melakukan pemetaan mutu pendidikan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah. Proses evaluasi ini dilakukan di sekolah dengan melibatkan perwakilan elemen pendidikan di sekolah tersebut. Hasil pengisian instrumen pemetaan ini kemudian dikirim melalui suatu aplikasi yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah sejak tahun 2016. Jenis satuan pendidikan yang melakukan pemetaan adalah SD, SMP, SMA, dan SMK. Satuan pendidikan SLB dan SPK belum diminta untuk melakukan pemetaan.

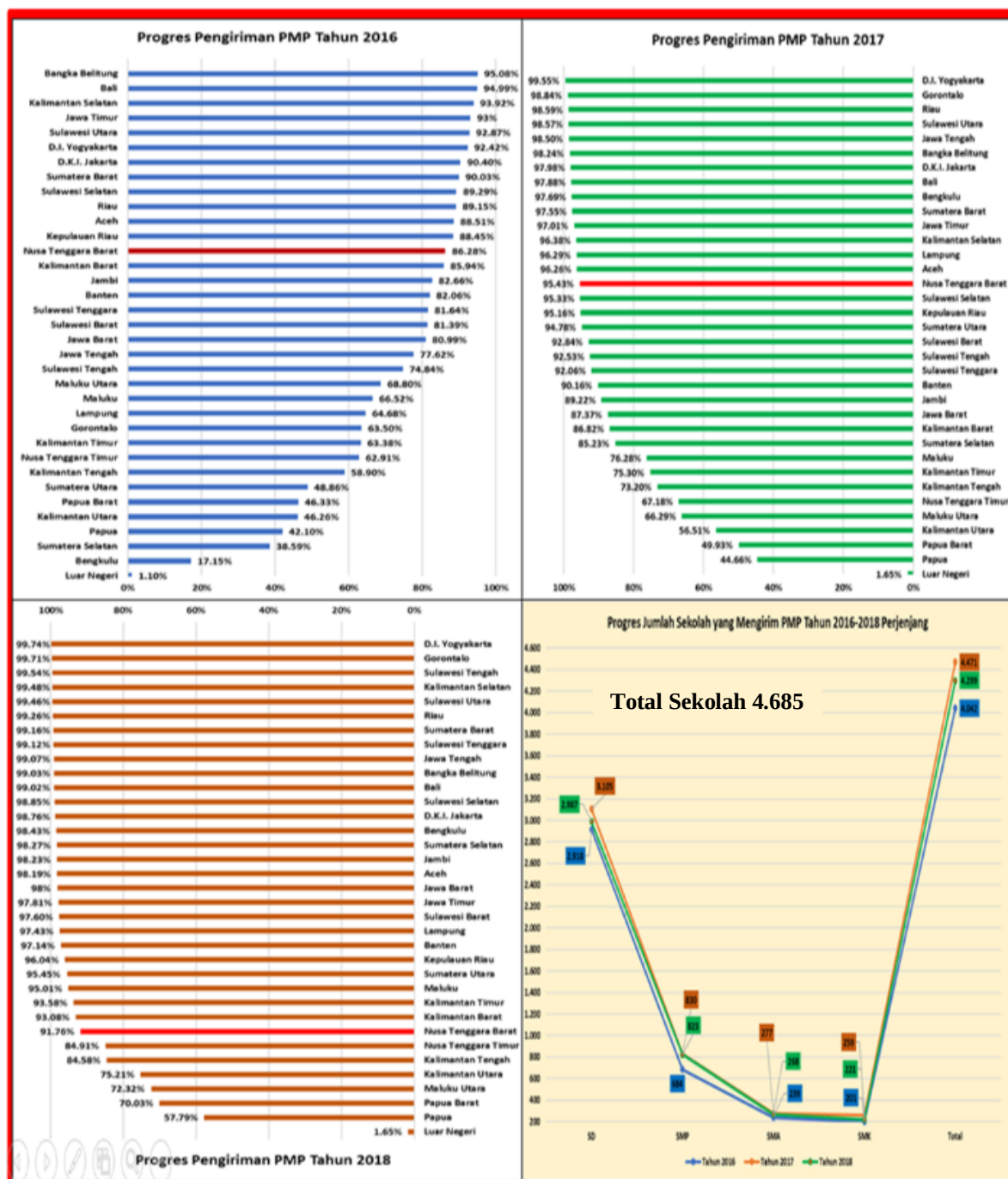
Data perkembangan jumlah sekolah yang mengirim data pemetaan dalam laporan ini diambil dari laman <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pengiriman/progres>. Laman ini merupakan situs resmi PMP yang melaporkan perkembangan jumlah sekolah yang mengirim data dan informasi PMP ke aplikasi pemetaan. Jumlah sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdaftar dalam laman tersebut adalah 4.685 dengan komposisi seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Jumlah ini mungkin berbeda dengan dapodik karena dalam dapodik data SLB dan SPK tercatat dalam pendataan. Selain itu, selama proses pemetaan, data jumlah sekolah dalam dapodik terus diperbaharui setiap semester.



Gambar 2 Distribusi Jumlah Sekolah Setiap Kabupaten/Kota Perjenjang

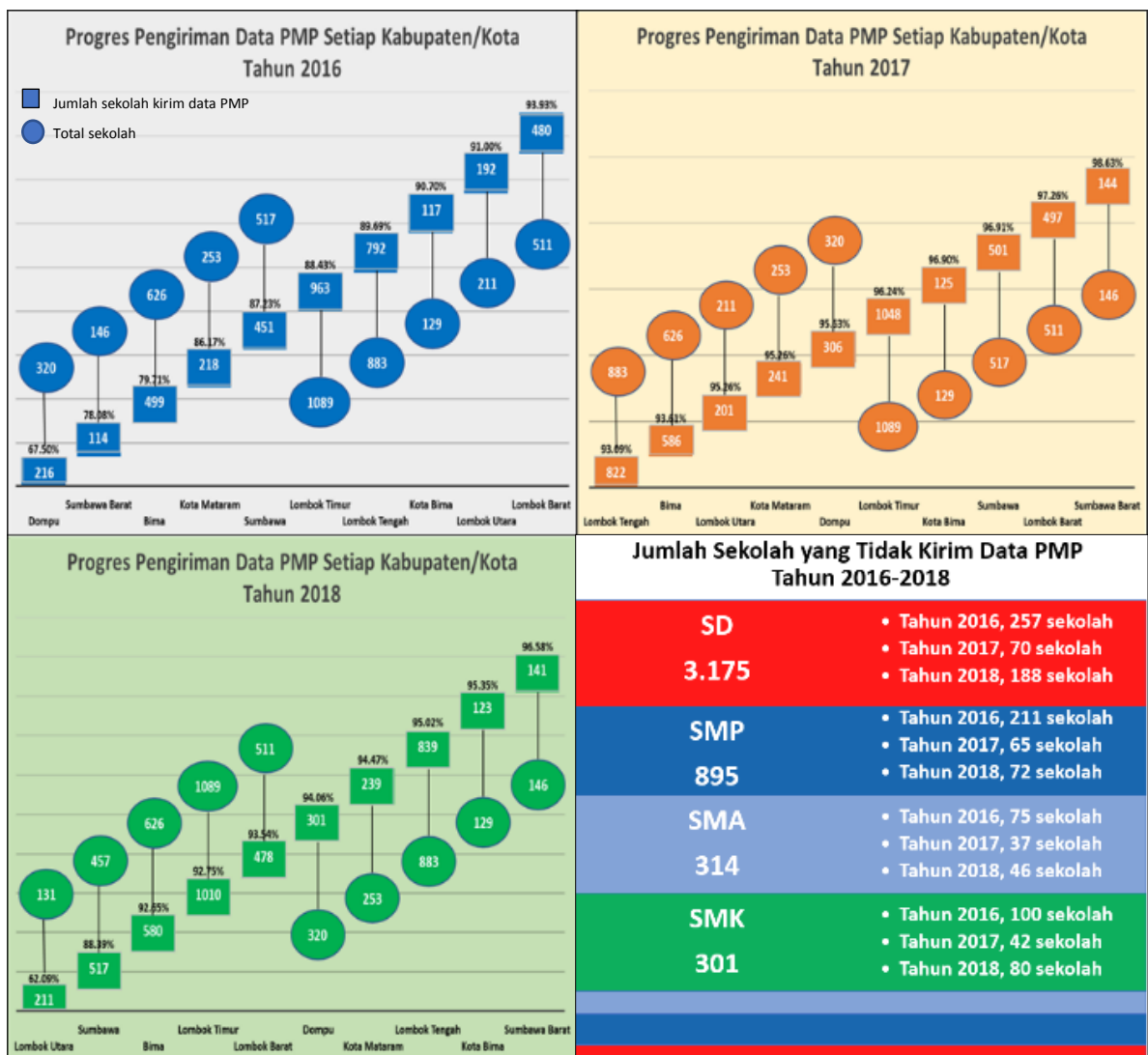
Pada tahun pertama dilakukannya pemetaan mutu pendidikan, jumlah sekolah yang mengisi instrumen dan mengirimnya ke pusat sebesar 86.28% atau sebanyak 4.042 sekolah. NTB berada pada urutan ke-13 dalam daftar nasional. Lihat grafik pada Gambar 3. Capaian ini

belum maksimal karena tahun pertama pengisian. Seiring dengan perbaikan aplikasi dan infrastruktur penunjang sistem oleh pusat, sosialisasi serta pendampingan yang dilakukan semakin masif, pada tahun 2017, jumlah sekolah yang mengirim semakin meningkat. Sebanyak 4.471 (95.43%) sekolah yang mengirim data PMP dan secara nasional NTB berada pada posisi ke-15 capaian jumlah sekolah yang mengirim data PMP.



Gambar 3 Progres Pengiriman PMP Secara Nasional Tahun 2016 – 2018

Pada tahun 2018, jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2017, jumlah sekolah yang mengirim data PMP ke aplikasi pusat menurun menjadi 91.76% atau 4.299 sekolah. Urutan NTB turun drastis ke posisi 28. Penyebabnya selain beberapa hal seperti telah disebutkan di atas, bencana gempa bumi yang terjadi di tujuh kabupaten/kota menyebabkan konsentrasi untuk melakukan EDS tidak maksimal karena prioritas utama adalah memulihkan kondisi sekolah dan siswa. Kabupaten Lombok Utara sebagai kabupaten yang terdampak gempa paling parah menjadi penyumbang terbesar penurunan jumlah sekolah yang mengirim data PMP.



Gambar 4 Progres Pengiriman PMP Tahun 2016 – 2018 Setiap Kabupaten/Kota

Data pada grafik Gambar 4 adalah data pengiriman PMP oleh setiap sekolah di setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2016, kabupaten Dompu memiliki persentase paling rendah dibandingkan sembilan kabupaten/kota yang lain. Bahkan, capaian persentasenya di bawah

70%. Hal ini terjadi karena adanya miskomunikasi diantara para pengawas pembina bahwa sekolah yang memiliki kewajiban untuk mengirim data PMP adalah sekolah yang pengawas pembinanya dilatih oleh LPMP NTB. Pada tahun pertama, LPMP NTB melatih perwakilan pengawas dengan harapan pengawas yang dilatih tersebut memberikan sosialisasi kepada pengawas lain yang tidak dilatih oleh LPMP NTB. Sementara itu, pada tahun 2018, Kabupaten Lombok Utara memiliki persentase paling rendah dalam pengiriman data PMP. Penyebabnya adalah Kabupaten Lombok Utara menjadi kabupaten terdampak gempa paling parah sehingga konsentrasi dinas pendidikan dan sekolah adalah memulihkan kondisi sekolah dan siswa yang mengalami trauma akibat gempa.

Tabel 4 menampilkan jumlah sekolah yang mengirim dan yang tidak mengirim data PMP tahun 2016 – 2018 di setiap kabupaten/kota untuk jenjang pendidikan dasar (dikdas) dan pendidikan menengah (dikmen). Data menunjukkan bahwa jenjang dikmen memiliki persentase lebih tinggi dari jenjang dikdas yang tidak mengirim data PMP. Dalam tiga tahun, rata-rata 20.6% sekolah jenjang dikmen yang tidak mengirim data PMP, sedangkan pada jenjang dikdas, hanya 7.07% sekolah yang tidak mengirim data PMP dalam 3 tahun pengiriman data PMP.

Tabel 4 Data Jumlah Sekolah yang Mengirim dan Tidak Mengirim Data PMP Tahun 2016 – 2018

No	Kabupaten/Kota	Presentase 2018	SD		SMP		Kabupaten/Kota	Presentase 2017	SD		SMP		Kabupaten/Kota	Presentase 2016	SD		SMP	
			Kirim	Tidak Kirim	Kirim	Tidak Kirim			Kirim	Tidak Kirim	Kirim	Tidak Kirim			Kirim	Tidak Kirim	Kirim	Tidak Kirim
1	Sumbawa Barat	98.45%	96	1	31	1	Kota Bima	100%	79	0	21	0	Kota Bima	96%	76	3	20	1
2	Kota Mataram	98.06%	164	2	38	2	Sumbawa Barat	99.22%	96	1	32	0	Lombok Barat	95.22%	344	12	74	9
3	Lombok Tengah	97.02%	585	13	163	10	Lombok Barat	98.41%	353	3	79	4	Lombok Utara	94.62%	142	9	34	1
4	Kota Bima	97%	76	3	21	0	Kota Mataram	97.57%	162	4	39	1	Lombok Tengah	92.48%	589	9	124	49
5	Lombok Barat	96.58%	346	10	78	5	Dompu	97.06%	208	7	56	1	Lombok Timur	90.72%	689	41	171	47
6	Dompu	95.59%	203	12	57	0	Lombok Timur	96.84%	717	13	201	17	Kota Mataram	89.81%	157	9	28	12
7	Lombok Timur	94.94%	700	30	200	18	Lombok Utara	96.77%	145	6	35	0	Sumbawa	89.03%	333	36	89	16
8	Bima	94.31%	400	14	114	17	Sumbawa	96.62%	358	11	100	5	Bima	82.39%	365	49	84	47
9	Sumbawa	88.61%	322	47	98	7	Bima	95.78%	401	13	121	10	Sumbawa Barat	80.62%	81	16	23	9
10	Lombok Utara	63.44%	95	56	23	12	Lombok Tengah	94.94%	586	12	146	27	Dompu	65.81%	142	73	37	20
Total		93.61%	2.987	188	823	72	Total	96.68%	3.105	70	830	65	Total	88.50%	2.918	257	684	211
No	Kabupaten/Kota	Presentase 2018	SMA		SMK		Kabupaten/Kota	Presentase 2017	SMA		SMK		Kabupaten/Kota	Presentase 2016	SMA		SMK	
			Kirim	Tidak Kirim	Kirim	Tidak Kirim			Kirim	Tidak Kirim	Kirim	Tidak Kirim			Kirim	Tidak Kirim	Kirim	Tidak Kirim
1	Kota Bima	89.66%	15	2	11	1	Sumbawa	100%	26	0	17	0	Lombok Barat	86.11%	25	3	37	7
2	Sumbawa	86.05%	22	4	15	2	Sumbawa Barat	94.12%	9	1	7	0	Dompu	77.08%	21	6	16	5
3	Dompu	85.42%	23	4	18	3	Lombok Timur	92.20%	57	3	73	8	Lombok Timur	73.05%	48	12	55	26
4	Sumbawa Barat	82.35%	9	1	5	2	Lombok Barat	90.28%	27	1	38	6	Kota Bima	72.41%	13	4	8	4
5	Bima	81.48%	47	8	19	7	Dompu	87.50%	24	3	18	3	Lombok Tengah	70.54%	46	8	33	25
6	Lombok Tengah	81.25%	46	8	45	13	Kota Bima	86.21%	14	3	11	1	Kota Mataram	70.21%	16	8	17	6
7	Kota Mataram	78.72%	21	3	16	7	Kota Mataram	85.11%	20	4	20	3	Sumbawa	67.44%	18	8	11	6
8	Lombok Timur	78.01%	55	5	55	26	Lombok Utara	84%	11	2	10	2	Lombok Utara	64%	9	4	7	5
9	Lombok Barat	75%	24	4	30	14	Lombok Tengah	80.36%	43	11	47	11	Bima	61.73%	38	17	12	14
10	Lombok Utara	52%	6	7	7	5	Bima	79.01%	46	9	18	8	Sumbawa Barat	58.82%	5	5	5	2
Total		79.51%	268	46	221	80	Total	87.15%	277	37	259	42	Total	71.54%	239	75	201	100

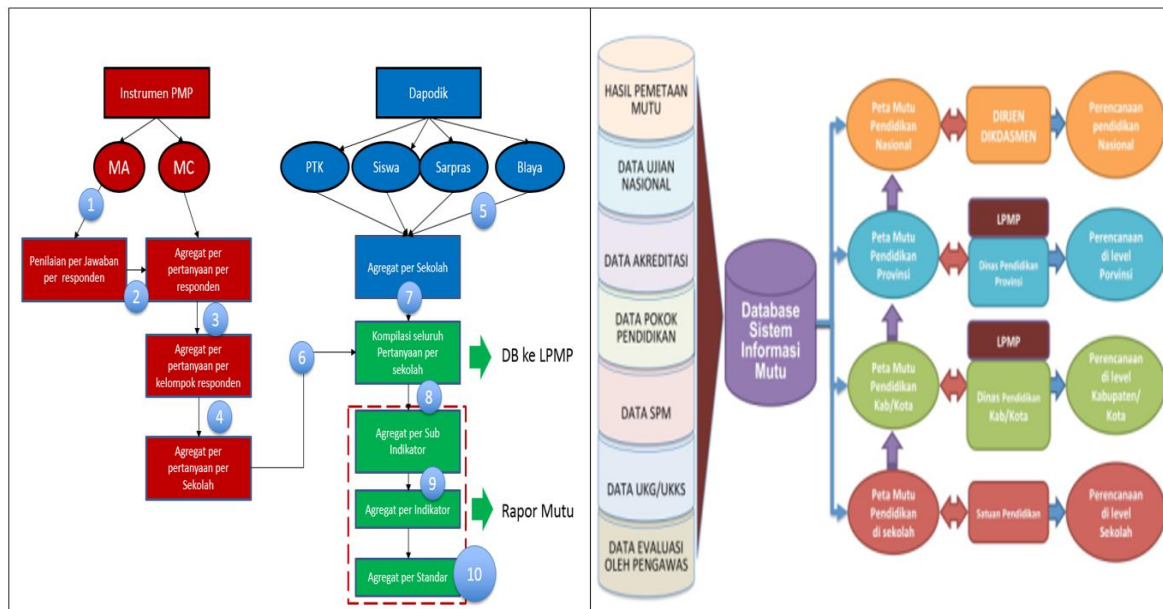
Selama tiga tahun dilaksanakannya pemetaan mutu, berbagai kendala dihadapi di lapangan. Kendala-kendal ini menjadi faktor utama penyebab tidak lancarnya proses pengumpulan data. Berdasarkan hasil evaluasi dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan tim LPMP selama mengawal proses pengumpulan data PMP tersebut, beberapa hal berikut menjadi penyebab jumlah sekolah yang mengirim data PMP tidak maksimal. Hal ini juga berlaku secara nasional. Penyebabnya diantaranya adalah:

- 1) terbatasnya jaringan, infrastruktur sistem (server & *storage* penuh) dan jalur kirim data sehingga sulit mengirim data;
- 2) aplikasi selalu mengalami perubahan sehingga menyulitkan sekolah dalam mengentri dan mengirim data;
- 3) belum semua sekolah memiliki perangkat komputer terutama untuk jenjang SD;
- 4) untuk jenjang SD, sekolah kesulitan dana untuk menanggulangi pengadaan internet;
- 5) tidak semua sekolah memiliki tenaga operator terutama jenjang SD;
- 6) kinerja operator belum didukung dengan imbalan yang sesuai;
- 7) letak geografis dan akses menuju daerah tertentu sulit untuk dijangkau dan membutuhkan biaya sehingga menyulitkan untuk sosialisasi dan pendampingan pengisian instrumen dan pengiriman data PMP;
- 8) kepala sekolah belum paham tujuan dan manfaat pemetaan mutu pendidikan;
- 9) kurangnya komitmen baik dari sekolah ataupun pengawas sekolah dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan;
- 10) kompetensi pengawas kurang dalam hal penguasaan IT sehingga validasi data kurang optimal;
- 11) rasio pengawas dengan sekolah yang dibina tidak proporsional;
- 12) pengawas pembina tidak melakukan sosialisasi dan pendampingan pengisian instrumen;
- 13) ada sekolah yang tidak bersedia untuk melakukan pengumpulan data mutu pendidikan terutama sekolah swasta yang tidak menerima Biaya Operasional Sekolah (BOS);
- 14) ada sekolah yang tidak beroperasi lagi tetapi masih terdaftar dalam dapodik.

C. Analisis Peta Mutu Pendidikan

Hasil evaluasi diri sekolah yang dilakukan melalui pengisian instrumen PMP yang telah dikirim ke server pusat selanjutnya disaring untuk menentukan data yang layak dijadikan dasar pengolahan. Pengolahan nilai dilakukan oleh tim pusat. Gambar 5 menunjukkan proses pengolahan data PMP. Data jawaban dari 790 pertanyaan dalam instrumen PMP kemudian dikombinasikan dengan data isian dapodik yang terdiri atas 476 pertanyaan. Data dari kedua sumber ini kemudian dianalisis secara komprehensif. Hasil analisis dalam bentuk rapor mutu

yang diagregasi secara bertahap. Rapor mutu setiap sekolah ditampilkan dalam bentuk capaian masing-masing subindikator. Capaian setiap subindikator diagregasi untuk menjadi capaian indikator dan puncaknya adalah capaian setiap SNP.



Gambar 5 Proses Pengolahan dan Pemanfaatan Data PMP

Untuk memberikan gambaran capaian mutu setiap jenjang pada setiap kabupaten/kota, capaian mutu masing-masing satuan pendidikan di setiap kabupaten/kota pada setiap jenjang diagregasi. Capaian mutu provinsi setiap jenjang diperoleh dengan melakukan agregasi capaian mutu setiap kabupaten/kota. Adanya gambaran capaian mutu di setiap satuan pendidikan, kabupaten/kota, dan propinsi dapat dijadikan dasar untuk memetakan masalah yang dihadapi oleh setiap sekolah. Hasil pemetaan ini kemudian bisa dijadikan dasar oleh pemerintah menyusun rencana dan program yang dijadikan prioritas dalam melaksanakan pemenuhan mutu pendidikan.

Nilai capaian mutu dikelompokkan menjadi 5 kategori dengan skala 7. Artinya, nilai terendah dan tertinggi masing-masing 0 dan 7. Kategori capaian mutu ini ditunjukkan pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5, kategori capaian mutu yang paling rendah adalah “menuju SNP 1”, dalam rapor mutu ditandai dengan tanda bintang sebanyak satu (*). Kategori tertinggi adalah “SNP”, dalam rapor mutu ditandai dengan tanda bintang sebanyak lima (*****). Pada BAB lain dalam laporan ini akan dipaparkan tentang komparasi hasil pemetaan dengan hasil akreditasi. Untuk memudahkan konversi ke nilai akreditasi yang menggunakan skala 100, maka pada Tabel 5 bagian kanan dicantumkan kriteria nilai akreditasi sekolah berdasarkan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018.

Tabel 5 Kategori Capaian Mutu dan Akreditasi Sekolah

Kategori Capaian Mutu	Nilai Capaian Mutu	
	Batas Bawah	Batas Atas
Menuju SNP 1	0.00	2.04
Menuju SNP 2	2.05	3.70
Menuju SNP 3	3.71	5.06
Menuju SNP 4	5.07	6.66
SNP	6.67	7.00

Kategori Akreditasi	Batas Nilai Akhir	
	Batas Bawah	Batas Atas
Tidak Terakreditasi (TT)	0	70
C	71	80
B	81	90
A	91	100

D. Rapor Mutu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Uraian berikut menjelaskan tentang capaian mutu Propinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2016 – 2018. Ulasan diberikan setiap jenjang untuk memudahkan membaca dan memahami rapor mutu tersebut. Capaian mutu NTB merupakan agregasi capaian mutu masing-masing sekolah untuk setiap jenjang.

a. Capaian Mutu NTB Jenjang SD

Tabel 6 menunjukkan jumlah sekolah berdasarkan kategori capaian SNP tahun 2016 – 2018. Sebagai catatan bahwa sampai tanggal 2 Maret 2019, belum semua sekolah yang telah mengirim data PMP diproses untuk dikeluarkan peta mutunya. Untuk selanjutnya, data peta mutu yang digunakan dalam analisis peta mutu NTB untuk semua jenjang adalah data per tanggal 2 Maret 2019. Berdasarkan data pada Tabel 6 tersebut, jumlah sekolah dengan capaian “menuju SNP 1” berangsur turun jumlahnya pada tahun 2017 dan tahun 2018. Banyaknya sekolah dengan capaian SNP dengan bintang satu pada tahun 2016 mungkin disebabkan adanya sikap abai oleh sekolah dalam mengisi instrumen PMP. Pengisian instrumen evaluasi diri sekolah kurang serius karena sekolah belum memahami makna dan dampak data yang diisi. Kurang maksimalnya sosialisasi oleh pengawas pembina tentang makna dan manfaat hasil PMP dapat menjadi penyebab hal tersebut. Adanya sosialisasi yang gencar dan intervensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, maka pada tahun 2017 dan tahun 2018, jumlah sekolah dengan capaian SNP “menuju SNP 1” turun sampai 75% lebih.

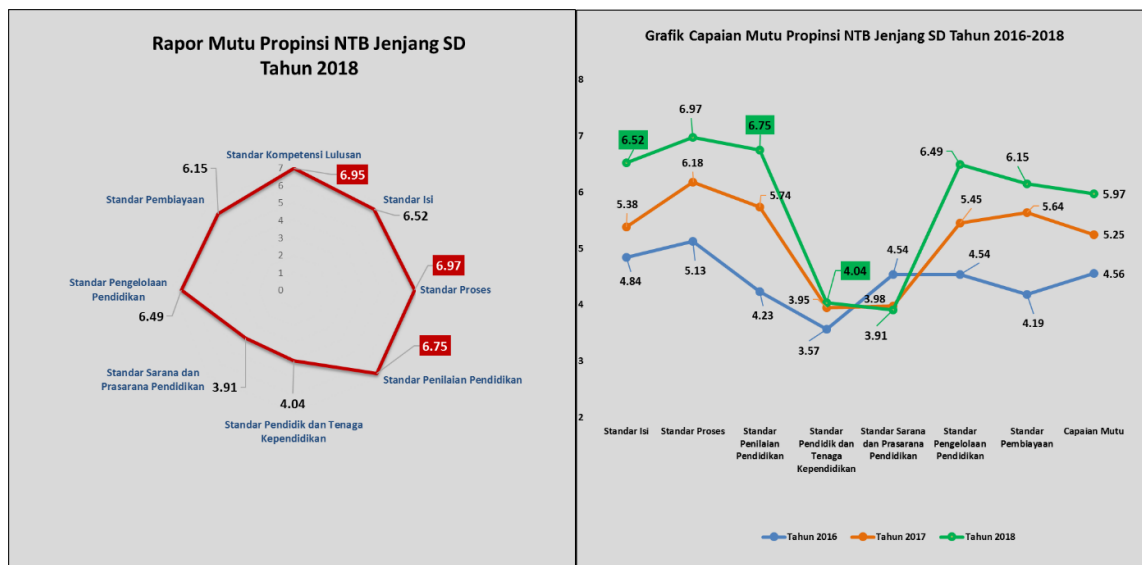
Tabel 6 Distribusi Sekolah Jenjang SD Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016-2018

Kategori	Jumlah Sekolah		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Menuju SNP 1	250	89	62
Menuju SNP 2	89	86	97
Menuju SNP 3	2571	711	428
Menuju SNP 4	234	2286	2105
SNP	0	0	0
Jumlah Sekolah Kirim PMP (Diproses)	3144	3172	2692

*Data per tanggal 2 Maret 2019

Perubahan mencolok juga terjadi pada kategori capaian mutu “menuju SNP 3” dan “menuju SNP 4”. Pada tahun 2016, jumlah sekolah dengan kategori “menuju SNP 3” hampir 82% dari jumlah sekolah yang diproses data PMP-nya. Jumlah ini berkurang secara drastis pada tahun 2018. Pengurangan ini lebih dari 83% dibandingkan jumlah sekolah dengan capaian “menuju SNP 3” pada tahun 2016. Hal yang menggembirakan adalah semakin bertambahnya jumlah sekolah dengan capaian “menuju SNP 4”. Jumlah paling banyak terjadi pada tahun 2017, yaitu sebanyak 2.286 sekolah atau sekitar 72% dari jumlah sekolah yang diproses rapor PMP-nya. Jumlah ini sedikit menurun pada tahun 2018 karena adanya kejadian gempa bumi yang melanda 7 kabupaten/kota sebagai salah satu sebabnya sehingga jumlah sekolah yang mengirim data PMP menurun tahun 2018.

Hal yang menarik dan perlu mendapat perhatian adalah tidak adanya sekolah yang masuk dalam kategori SNP. Sekolah disebut telah mencapai SNP jika semua standar dalam SNP sudah terpenuhi. Capaian pada kategori SNP dihitung berdasarkan rata-rata capaian delapan standar. Artinya, jika salah satu dari delapan standar yang ada belum mencapai SNP, secara umum capaian sekolah tersebut belum masuk kategori SNP. Namun, jika dilihat setiap standar, maka suatu sekolah bisa jadi sudah SNP pada standar tertentu. Misalnya, ada sekolah sudah SNP pada standar kompetensi lulusan, tapi belum mencapai SNP pada standar pembiayaan. Ada sekolah yang sudah memenuhi SNP pada standar proses dan standar penilaian pendidikan, tapi bisa jadi belum SNP pada standar pengelolaan. Lihat Gambar 6.



Gambar 6 Grafik Capaian Mutu NTB Jenjang SD Tahun 2016 – 2018

Gambar 6 menunjukkan capaian mutu NTB jenjang SD pada tahun 2018. Berdasarkan kriteria pada Tabel 5, ada tiga standar yang memenuhi SNP, yaitu standar kompetensi lulusan (6.95), standar proses (6.97), dan standar penilaian pendidikan (6.75). Tiga standar lain yaitu, standar isi, standar pengelolaan pendidikan, dan standar pembiayaan meskipun belum mencapai SNP, memiliki capaian yang cukup tinggi masing-masing 6.52, 6.15, dan 6.49. Capaian tiga standar ini relatif konsisten dengan tiga standar sebelumnya yang sudah SNP. Sisanya, dua standar yang lain, yaitu standar sarana dan prasarana pendidikan serta standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), memiliki capaian yang cukup rendah. Hal ini cukup “aneh” dan perlu mendapat perhatian khusus. Sumber data dari dua standar yang terakhir ini sebagian besar dari isian pada dapodik. Oleh karena itu, hal ini perlu dicek apakah rendahnya nilai kedua standar tersebut disebabkan kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diinput dalam aplikasi dapodik atau ada penyebab lainnya.

Nilai capaian untuk standar PTK yang rendah tidak sinkron dengan nilai capaian standar proses, standar isi, standar penilaian pendidikan, dan standar kompetensi lulusan yang cukup tinggi, bahkan sudah SNP. Keempat standar yang disebutkan terakhir ini berhubungan langsung dengan kompetensi PTK. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor penting terpenuhinya proses pembelajaran yang baik dan sesuai standar. Terselenggaranya proses pembelajaran yang baik tentu tidak terlepas dari kemampuan PTK dalam merancang perangkat pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang disyaratkan.

Anomali lainnya adalah rendahnya capaian mutu untuk standar sarpras pendidikan sedangkan enam standar lain yang cukup tinggi. Pada kasus ini, standar sarpras pendidikan memiliki nilai yang sangat rendah (3.91). Padahal, empat standar lain—standar proses, standar isi, standar penilaian pendidikan, dan standar kompetensi lulusan—yang dipengaruhi langsung oleh standar sarpras memiliki nilai yang sangat tinggi. Idealnya, agar PTK dapat melakukan tugasnya dengan maksimal untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi bagus, selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan memerlukan dukungan sarpras pendidikan yang sesuai standar. Tersedianya sarpras pendidikan yang sesuai standar akan membuat proses pembelajaran menjadi lancar. PTK dan peserta didik juga menjadi nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Agar data pada Gambar 6 tidak menjadi informasi yang menyesatkan, perlu dilihat pada bagian mana dari standar PTK dan standar sarpras pendidikan yang menyebabkan rendahnya nilai kedua standar itu secara keseluruhan. Tabel 7 menunjukkan nilai capaian untuk masing-masing indikator pada setiap standar. Nilai capaian masing-masing subindikator dari setiap indikator untuk seluruh standar dapat dilihat pada Lampiran II. Adanya informasi tentang indikator dan subindikator mana saja yang masih lemah dapat menjadi acuan penyusunan program perbaikan. Tidak hanya pada standar pendidikan yang nilainya masih kurang, standar pendidikan dengan nilai yang sudah bagus juga harus ditelaah indikator-indikator mana saja yang harus ditingkatkan.

Pada standar PTK tampak bahwa indikator 5.1 dan 5.2 memiliki capaian nilai yang cukup tinggi. Ketersediaan dan kompetensi guru dan kepala sekolah masing-masing sudah terpenuhi 71% dan 84%. Artinya, rendahnya nilai standar PTK bukan karena rendahnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan kepala sekolah. Berdasarkan Tabel 9, penyebab utamanya adalah ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi, laboran, dan pustakawan belum memenuhi ketentuan. Rendahnya nilai indikator 5.3, 5.4, dan 5.5 di jenjang SD dapat disebabkan pada umumnya di jenjang SD tidak ada tenaga administrasi, laboran, dan pustakawan. Jikapun ada, hanya terbatas di sekolah-sekolah besar yang berada di kota dan jumlahnya tidak banyak.

Pada standar sarpras pendidikan, indikator kapasitas daya tampung sekolah memadai baru terpenuhi sekitar 62%. Indikator ini menjelaskan tentang kapasitas rombongan belajar, rasio luas lahan, kondisi lahan sekolah, rasio luas bangunan dengan jumlah siswa, kondisi

bangunan sekolah, dan ragam prasarana lainnya. Tampak dari data pada Lampiran II bahwa rasio luas bangunan dengan jumlah siswa belum terpenuhi dan sekolah kebanyakan belum memiliki ragam sarpras yang memadai.

Tabel 7 Capaian Mutu NTB Setiap Standar dan Indikator Jenjang SD Tahun 2018

No	Standar/Indikator	Nilai	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.95	★★★★★
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.99	★★★★★
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	6.86	★★★★★
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.96	★★★★★
2	Standar Isi	6.52	★★★★
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6.84	★★★★★
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6.79	★★★★★
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.93	★★★★
3	Standar Proses	6.97	★★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.99	★★★★★
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.97	★★★★★
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.97	★★★★★
4	Standar Penilaian Pendidikan	6.75	★★★★★
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.88	★★★★★
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6.94	★★★★★
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.93	★★★★★
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	6.93	★★★★★
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	6.08	★★★★
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.04	★★★
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5.01	★★★
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.9	★★★★
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1.06	★
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.79	★
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.28	★
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.91	★★★
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.36	★★★
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.02	★★
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2.21	★★
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	6.49	★★★★
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.98	★★★★★
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.92	★★★★★
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2.3	★★
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.97	★★★★★
8	Standar Pembiayaan	6.15	★★★★
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.92	★★★★★
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.9	★★★★★
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.64	★★★

Dua indikator berikutnya, 6.1 dan 6.2, memiliki nilai yang cukup rendah. Dua indikator inilah yang menjadi penyumbang utama rendahnya capaian untuk standar sarpras pendidikan. Jika diteliti lebih lanjut berdasarkan data pada Lampiran II, sebagian besar SD tidak memiliki sarpras seperti laboratorium IPA dan perpustakaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa satuan pendidikan SD/MI harus memiliki ruang laboratorium IPA dan ruang perpustakaan yang layak dipakai. Nilai capaian standar sarpras yang rendah juga diperparah oleh sarpras lain yang belum memenuhi standar. Hal ini sejalan dengan standar PTK dimana banyak SD yang tidak memiliki tenaga laboran dan pustakawan sehingga wajar pada kedua standar itu nilainya rendah. Sarpras pembelajaran lainnya juga belum lengkap. Namun, data riil di lapangan perlu dicek kembali karena hasil ini diperoleh dari input dapodik dari sekolah.

Perkembangan capaian mutu NTB untuk jenjang SD selama tahun 2016 – 2018 cukup baik. Gambar 19 bagian kanan menunjukkan bahwa kenaikan capaian mutu terjadi pada setiap standar. Kenaikan nilai capaian yang cukup signifikan terjadi antara capaian mutu tahun 2016 dan 2017. Seperti telah dijelaskan sebelumnya di atas bahwa kenaikan nilai capaian mutu ini disebabkan sosialisasi tentang pentingnya pemetaan mutu pendidikan semakin gencar dilakukan. Sekolah mulai memahami dan merasakan manfaat data PMP yang dihasilkan sehingga sekolah mengetahui kelemahan dan kekuatannya. Selain itu, ada intervensi kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan mutu pendidikan. Pada sisi lain, ada anomali terjadi pada standar sarana prasarana pendidikan. Nilai capaian tahun 2018 lebih rendah dari nilai dua tahun sebelumnya. Begitupula nilai capaian tahun 2017 lebih rendah dari nilai pada tahun 2016. Keanekesan data ini perlu dicek langsung di lapangan.

b. Capaian Mutu NTB Jenjang SMP

Tabel 8 menunjukkan jumlah sekolah berdasarkan kategori capaian SNP tahun 2016 – 2018 jenjang SMP. Berdasarkan data pada Tabel 8 tersebut, jumlah sekolah dengan capaian “menuju SNP 1” berangsur turun jumlahnya pada tahun 2017 dan tahun 2018. Pada tahun 2018, hanya 2.79% sekolah yang memiliki capaian “menuju SNP 1”. Penyebab banyaknya sekolah dengan capaian SNP dengan bintang satu pada tahun 2016 dapat dibaca kembali pada penjelasan sebelumnya pada bagian a) di atas. Walaupun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah sekolah dengan capaian “menuju SNP 2” relatif sama pada tahun 2017 dan 2018, sekitar masing-masing 4.37% dan 4.91%.

Tabel 8 Distribusi Sekolah Jenjang SMP Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016 – 2018

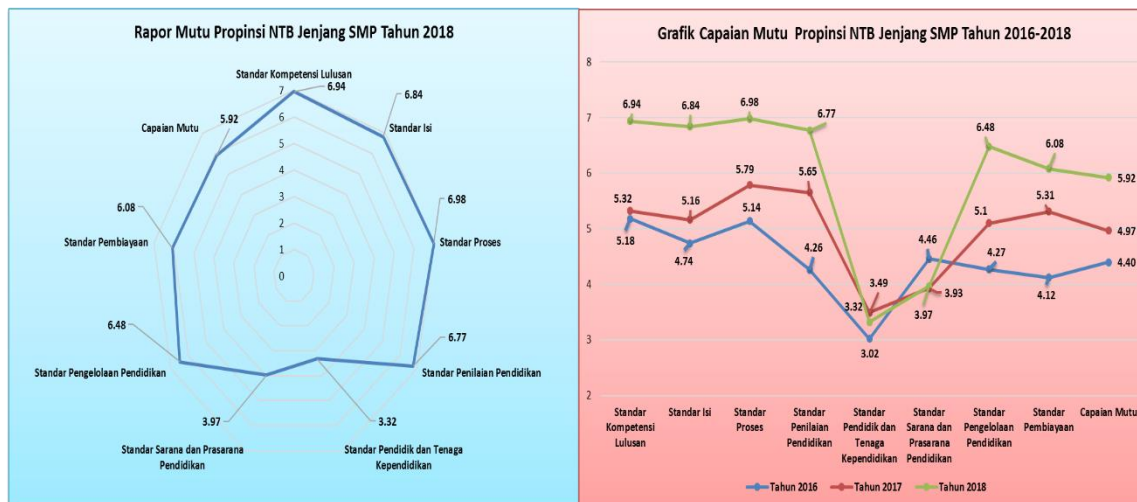
Kategori	Jumlah Sekolah		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Menuju SNP 1	168	70	16
Menuju SNP 2	53	39	37
Menuju SNP 3	560	216	177
Menuju SNP 4	59	567	518
SNP	0	0	0
Jumlah Sekolah Kirim PMP (Diproses)	840	892	748

Perubahan terjadi cukup signifikan dari “menuju SNP 3” ke kategori “menuju SNP 4” dalam rentang tahun 2016 ke tahun 2017. Pada tahun 2016, jumlah sekolah dengan kategori “menuju SNP 3” hampir 67% dari jumlah sekolah yang diproses datanya. Jumlah ini berkurang signifikan pada tahun 2017 dengan persentase pengurangan sebesar 61.43%. Pengurangan jumlah sekolah dengan kategori “menuju SNP 3” juga terjadi pada tahun 2018 sebesar 18.06% dari jumlah tahun 2017. Pengurangan ini lebih dari 83% dibandingkan jumlah sekolah dengan capaian “menuju SNP 3” pada tahun 2016.

Hal yang menggembirakan adalah semakin bertambahnya jumlah sekolah dengan capaian “menuju SNP 4”. Jumlah paling banyak terjadi pada tahun 2017, yaitu sebanyak 567 sekolah atau sekitar 63.57% dari jumlah sekolah yang diproses datanya. Jumlah ini sedikit menurun pada tahun 2018. Faktor penyebabnya bisa jadi karena belum semua sekolah yang mengirim data PMP diproses peta mutunya. Berdasarkan data pada Tabel 5 dan Tabel 8, ada 70 sekolah yang belum keluar peta mutunya. Selain itu, jumlah sekolah yang mengirim data PMP menurun sebanyak 7 sekolah dibandingkan dengan tahun 2017. Terjadinya bencana gempa bisa jadi menjadi penyebab hal tersebut. Sebagai contoh Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah yang terdampak paling parah, tahun 2017 semua SMP mengirim data PMP. Namun, pada tahun 2018 terdapat 11 sekolah yang tidak mengirim. Seperti halnya pada jenjang SD, dalam tiga tahun pemetaan, belum ada sekolah yang masuk dalam kategori SNP.

Secara umum capaian mutu Provinsi NTB untuk jenjang SMP selama tiga tahun mengalami kenaikan relatif rendah. Lihat Gambar 7. Tahun 2018, nilai capaian hanya naik sekitar 19% dari capaian tahun 2017. Berdasarkan kriteria pada Tabel 5, capaian mutu NTB jenjang SMP tahun 2016 dan 2017 “menuju SNP 3” dengan nilai masing-masing

4.40 dan 4.97 (lihat Gambar 7 bagian kanan), sedangkan capaian untuk tahun 2018 sebesar 5.92. Khusus tahun 2018, jika diperhatikan, ada dua standar yang memiliki nilai cukup rendah sehingga nilai capaian secara umum hanya terdongkrak sedikit. Standar sarpras pendidikan naik hanya 1.02% dari tahun 2017 dengan nilai 3.02.



Gambar 7 Grafik Capaian Mutu NTB Jenjang SMP Tahun 2016 – 2018

Hal yang perlu mendapat perhatian lebih adalah capaian mutu untuk standar PTK turun 4.87% dari nilai capaian pada tahun 2017. Untuk tahun 2018, Gambar 7 bagian kanan menunjukkan nilai kedua standar tersebut menyebabkan grafik turun sangat curam. Hal yang berbeda terjadi pada 6 standar yang lain. Keenam standar tersebut memiliki nilai relatif tinggi dengan selisih nilai yang tidak terlalu jauh sehingga grafik yang terbentuk landai. Rata-rata kenaikan sebesar 24.16%. Kenaikan tertinggi terjadi pada standar isi sebesar 32.56%.

Turunnya nilai standar PTK dan sarpras pendidikan perlu dicermati lebih dalam penyebabnya. Tahun 2018 adalah tahun ketiga pemetaan mutu pendidikan dimana sosialisasi tentang manfaat peta mutu sudah masif dilakukan. Infrastruktur aplikasi sudah reaktif bagus. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian a) bahwa data kedua standar ini sebagian besar berasal dari hasil isian dapodik. Berdasarkan fakta yang terjadi selama proses pengumpulan data PMP, aplikasi dapodik sering mengalami pembaharuan. Pembaharuan aplikasi dapodik ini tidak diiringi dengan pembaharuan aplikasi PMP pada saat yang sama. Akibatnya, aplikasi PMP tidak bisa berjalan normal. Hal ini tentu menghambat proses pengumpulan data PMP. Jadi, tidak sinkronnya aplikasi PMP dengan aplikasi dapodik bisa jadi menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai standar PTK dan

sarpras pendidikan. Penyebab lain adalah kemungkinan data PTK dan sarpras tidak diisi lengkap oleh sekolah.

Tabel 9 Capaian Mutu NTB Setiap Standar dan Indikator Jenjang SMP Tahun 2018

No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.94	★★★★★
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.99	★★★★★
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	6.82	★★★★★
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.95	★★★★★
2	Standar Isi	6.84	★★★★★
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6.88	★★★★★
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6.84	★★★★★
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	6.79	★★★★★
3	Standar Proses	6.98	★★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.99	★★★★★
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.98	★★★★★
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.96	★★★★★
4	Standar Penilaian Pendidikan	6.77	★★★★★
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.88	★★★★★
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6.94	★★★★★
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.91	★★★★★
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	6.94	★★★★★
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	6.17	★★★★★
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.32	★★
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.04	★★
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.22	★★★★★
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1.55	★
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	1.27	★
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	1.44	★
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.97	★★★
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.39	★★★
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.35	★★
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2.18	★★
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	6.48	★★★★★
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.97	★★★★★
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.9	★★★★★
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2.29	★★
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.97	★★★★★
8	Standar Pembiayaan	6.08	★★★★★
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.72	★★★★★
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.87	★★★★★
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.65	★★★

Agar mendapatkan informasi yang lebih rinci, perlu dicermati data capaian mutu pada setiap indikator dari masing-masing standar yang ditunjukkan oleh Tabel 9. Data capaian mutu untuk setiap subindikator dapat dilihat pada Lampiran III. Untuk standar PTK, ada tiga indikator yang memiliki nilai yang sangat rendah, yaitu indikator 5.3, 5.4, dan 5.4. Ketiga indikator ini mengukur ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan seperti tenaga administrasi, laboran, dan pustakawan. Data pada Lampiran III mengonfirmasi penyebab rendahnya nilai standar PTK. Data tersebut menyatakan bahwa hampir semua sekolah tidak memiliki kepala tenaga administrasi, kepala tenaga laboratorium, dan kepala tenaga pustakawan. Jikapun ada, persyaratan harus memiliki kualifikasi dan sertifikat sesuai ketentuan tidak terpenuhi sehingga isian dalam dapodik pasti akan dikosongkan.

Tenaga kependidikan di banyak sekolah sering diambil dari unsur guru atau tenaga honorer. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia diberikan tugas tambahan untuk menangani perpustakaan dibantu oleh tenaga honorer. Keduanya tidak memiliki sertifikat sebagai pustakawan. Begitupula laboran. Di jenjang SMP, tenaga laboran diambil dari guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.

Ketersediaan guru di jenjang SMP sesuai dengan kompetensi dan ketentuan juga memiliki nilai yang rendah, yaitu sebesar 3.04. Artinya, indikator ini baru terpenuhi sesuai standar 43%. Jika dicermati berdasarkan subindikator yang ada pada Lampiran II, belum semua guru bersertifikat pendidik. Hal yang perlu didalami adalah nilai subindikator ketersediaan guru untuk semua mata pelajaran yang bernilai nol. Artinya, semua sekolah jenjang SMP di NTB belum memiliki guru untuk semua mata pelajaran. Data pada peta mutu ini “mencurigakan” karena di setiap kabupaten/kota terdapat beberapa SMP yang tergolong favorit dan termasuk sekolah rujukan. Fakta bahwa ada sekolah yang belum tercukupi kebutuhan guru untuk semua mapel memang ada, lebih-lebih di sekolah swasta. Untuk itu, data isian dapodik perlu dikonfirmasi.

Kejadian serupa terjadi pada standar sarpras pendidikan. Banyak subindikator pada standar ini memiliki nilai yang sangat rendah. Beberapa subindikator bisa dijelaskan secara rasional penyebab nilai tersebut sangat rendah, tetapi beberapa yang lain tidak. Misalnya, tidak semua sekolah memiliki ruangan laboratorium IPA atau perpustakaan yang memenuhi standar. Tidak semua sekolah memiliki sarpras pendukung yang sesuai standar atau layak digunakan, seperti ruang pimpinan, ruang guru, ruang UKS, ruang konseling, tempat ibadah, jamban, tempat parkir, dan sarpras pendukung lainnya.

Subindikator-subindikator yang tidak rasional memiliki nilai rendah perlu disandingkan dengan kondisi riil sekolah dan bagaimana isian dapodik setiap sekolah.

c. Capaian Mutu NTB Jenjang SMA

Jumlah sekolah yang mengirim data PMP jenjang SMA tahun 2018 sebanyak 268 sekolah, lebih sedikit 7 sekolah dari data tahun 2017 (lihat Tabel 5). Dari 268 sekolah yang telah mengirim data PMP, sebanyak 245 sekolah yang sudah dikeluarkan peta mutunya per tanggal 2 Maret 2019. Lihat Tabel 10. Secara umum, jumlah sekolah dengan kenaikan capaian SNP semakin banyak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, jumlah sekolah yang memiliki capaian SNP “menuju SNP 1” hanya menyisakan satu sekolah dari 245 sekolah yang memiliki peta mutu. Jumlah ini turun drastis dari jumlah pada tahun 2016 dan 2017. Hal yang sama terjadi pada jumlah sekolah dengan capaian SNP “menuju SNP 2” pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan relatif moderat terjadi pada jumlah sekolah dengan capaian SNP “menuju SNP 3” dari tahun 2016 – 2018.

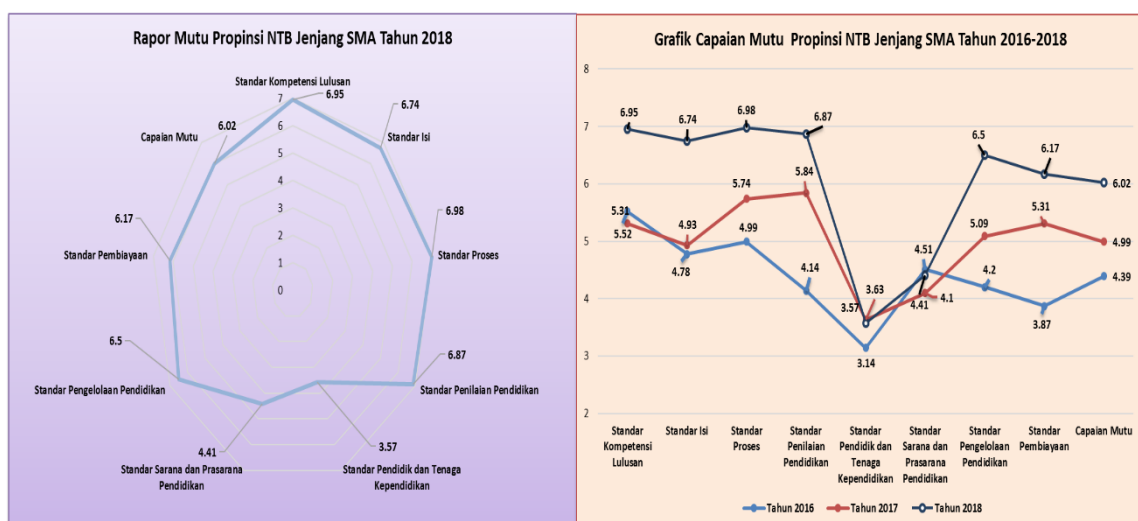
Pada sisi lain, jumlah sekolah dengan kategori “menuju SNP 4” naik tajam. Kenaikan paling banyak terjadi dari tahun 2016 ke tahun 2017 dengan kenaikan melebihi 426%. Tahun 2018 jumlah sekolah dalam kategori ini turun sedikit, selisih 6 sekolah dari tahun 2017. Jumlah pada tahun 2018 ini tentu saja bisa bertambah setelah semua sekolah diolah data mutunya. Penyebab naiknya capaian tersebut dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya. Untuk kategori SNP, sebagaimana pada jenjang SD dan SMP, belum ada satu pun juga sekolah yang memenuhi kriteria itu.

Tabel 10 Distribusi Sekolah Jenjang SMA Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016 – 2018

Kategori	Jumlah Sekolah		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Menuju SNP 1	62	35	1
Menuju SNP 2	27	5	6
Menuju SNP 3	166	70	44
Menuju SNP 4	38	200	194
SNP	0	0	0
Jumlah Sekolah Kirim PMP (Diproses)	293	310	245

*Data per tanggal 2 Maret 2019

Gambar 8 bagian kanan menunjukkan pergerakan capaian mutu untuk setiap standar dalam tiga tahun. Dari grafik ini tampak bahwa pada tahun 2016 hanya standar kompetensi lulusan yang masuk kategori “menuju SNP 4”. Sebanyak 6 standar memiliki capaian “menuju SNP 3”, dan sisanya satu standar hanya mencapai kategori “mencapai SNP 2”. Hasil ini sejalan dengan data pada Tabel 12 yang menyebutkan bahwa jumlah sekolah yang memiliki capaian “menuju SNP 3” mendominasi pada tahun 2016. Hasil pada tahun 2017, ada lima standar yang memiliki capaian “menuju SNP 4”, dua standar “menuju SNP 3”, dan satu standar “menuju SNP 2”. Hasil ini juga mengonfirmasi data pada Tabel 10. Terakhir, capaian tahun 2018 menunjukkan 6 standar memiliki capaian kategori “menuju SNP 4”, masing-masing satu standar masuk kategori “menuju SNP 3” dan “menuju SNP 2”. Selama tiga tahun pemetaan, standar sarpras pendidikan selalu masuk kategori “menuju SNP 2” dan standar PTK selalu masuk dalam kategori “menuju SNP 3”.



Gambar 8 Grafik Capaian Mutu NTB Jenjang SMA Tahun 2016 – 2018

Untuk menjelaskan penyebab belum satu pun sekolah yang mencapai kategori SNP, data capaian setiap indikator dan subindikator pada masing-masing standar perlu ditelusuri. Penjelasan akan menggunakan data tahun 2018. Grafik 8 bagian kiri dan Tabel 11 menunjukkan data capaian mutu untuk setiap standar dan indikator. Capaian mutu jenjang SMA untuk setiap subindikator secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran IV. Untuk standar PTK, kasus yang sama seperti jenjang SMP terjadi juga di jenjang SMA. Ada tiga indikator yang memiliki nilai yang sangat rendah, yaitu indikator 5.3, 5.4, dan 5.4. Ketiga indikator ini mengukur ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan seperti tenaga administrasi, laboran, dan pustakawan. Data pada Lampiran IV mengonfirmasi penyebab rendahnya nilai standar PTK. Data tersebut menyatakan bahwa hampir semua sekolah tidak memiliki kepala tenaga administrasi, kepala tenaga laboratorium, dan kepala tenaga

pustakawan. Jikapun ada, persyaratan harus memiliki kualifikasi dan sertifikat sesuai ketentuan tidak terpenuhi sehingga isian dalam dapodik pasti akan dikosongkan. Hal yang sama juga terjadi pada ketersediaan tenaga laboran, teknisi laboran, tenaga administrasi, atau tenaga pustakawan tidak bisa dipenuhi oleh semua sekolah.

Tabel 11 Capaian Mutu NTB Setiap Standar dan Indikator Jenjang SMATahun 2018

No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.95	★★★★★
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.99	★★★★★
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	6.83	★★★★★
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.97	★★★★★
2	Standar Isi	6.74	★★★★★
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6.82	★★★★★
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6.9	★★★★★
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	6.51	★★★★★
3	Standar Proses	6.98	★★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.98	★★★★★
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.99	★★★★★
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.97	★★★★★
4	Standar Penilaian Pendidikan	6.87	★★★★★
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.87	★★★★★
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6.93	★★★★★
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.91	★★★★★
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	6.92	★★★★★
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	6.72	★★★★★
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.57	★★
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.28	★★
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.5	★★★★★
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1.83	★
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	1.42	★
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	1.6	★
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.41	★★★
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.74	★★★
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.37	★★
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	3.84	★★★
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	6.5	★★★★★
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.97	★★★★★
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.96	★★★★★
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2.31	★★
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.95	★★★★★
8	Standar Pembiayaan	6.17	★★★★★
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.88	★★★★★
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.91	★★★★★
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.73	★★★

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi, tenaga dan teknisi laboran, atau tenaga pustakawan, sekolah sering memberdayakan guru mata pelajaran yang bersesuaian. Misalnya, guru mata pelajaran biologi, fisika, atau matematika diberdayakan sekaligus sebagai kepala laboratorium sekaligus merangkap tenaga laboran di laboratorium biologi, fisika, kimia, atau matematika. Sementara tenaga teknis laboratorium sekolah biasanya mengangkat tenaga honorer. Namun, hal ini tidak bisa diinput dalam dapodik karena kualifikasi dan sertifikat yang dipersyaratkan tidak bisa dipenuhi sehingga isian dalam dapodik akan kosong.

Kepala tenaga pustakawan dan tenaga pustakawan juga kadang tidak bisa dipenuhi oleh sekolah. Berdasarkan data pada Lampiran 17, dari 70 SMA yang telah disurvei secara *online*, sebanyak 73% sekolah yang memiliki kepala tenaga pustakawan dan 27% sekolah tidak memiliki kepala tenaga pustakawan. Namun, jika dirunut apakah kepala tenaga pustakawan itu memiliki pendidikan yang sesuai ketentuan dan bersertifikat, maka diperoleh data bahwa hanya 37% sekolah yang bisa memenuhi ketentuan tersebut. Hal yang sama terjadi pada tenaga pustakawan, dari 57 sekolah yang memiliki tenaga pustakawan, 27 diantaranya memiliki pendidikan yang sesuai syarat dan hanya 22 tenaga pustakawan yang bersertifikat. Sekolah yang tidak memiliki kepala tenaga pustakawan dan/atau tenaga pustakawan memberdayakan guru mata pelajaran untuk menangani perpustakaan. Ada yang menugaskan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, TIK, PKn, guru honorer, dan tenaga administrasi untuk menjadi petugas yang menangani perpustakaan.

Ketidaktersediaan tenaga kependidikan juga terjadi pada tenaga laboran dan tenaga administrasi. Tidak semua SMA dapat memenuhi tenaga laboran dan tenaga administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari 70 sekolah, sebanyak 9 sekolah tidak memiliki kepala tenaga administrasi, tetapi memiliki tenaga administrasi dan ada 3 sekolah yang tidak memiliki kedua-duanya. Untuk tenaga laboran, dari 70 SMA, sebanyak 27% SMA tidak memiliki kepala tenaga laboran maupun tenaga laboran dan 7 sekolah hanya memiliki tenaga laboran. Tidak adanya kepala tenaga laboran maupun tenaga laboran disiasati oleh sekolah dengan memberikan tugas tambahan bagi guru mata pelajaran yang bersesuaian (guru mapel Fisika, Biologi, Kimia, Bahasa Inggris, TIK) sebagai laboran. Tidak hanya menugaskan guru mapel yang bersesuaian, ada juga sekolah yang menugaskan pegawai tidak tetap untuk mengurus laboratorium. Penugasan guru mapel bersesuaian atau tenaga

honorar sebagai laboran tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan karena laboran harus memenuhi persyaratan pendidikan tertentu dan harus bersertifikat. Kondisi tidak terpenuhinya tenaga administrasi, tenaga pustakawan, atau tenaga laboran semakin buruk di sebagian besar sekolah swasta. Ketiadaan kepala dan tenaga administrasi, kepala dan tenaga pustakawan, dan kepala dan tenaga laboran yang sesuai ketentuan tentu saja menyebabkan subindikator-subindikator lainnya tidak bisa diukur sehingga nilainya tidak ada.

Indikator ketersediaan dan kompetensi guru memiliki nilai capaian juga rendah meskipun tidak serendah ketiga indikator yang telah dibahas di atas. Jika dicermati pada Lampiran IV, syarat kualifikasi guru sudah terpenuhi cukup baik dengan nilai 5.94. Begitu pula dengan syarat pendidik harus bersertifikat telah terpenuhi sekitar 61%. Meskipun ketersediaan pendidik dengan kualifikasi minimal S-1/D-4 dan telah bersertifikat telah sebagian besar terpenuhi, ketersediaan pendidik untuk semua mata pelajaran banyak tidak terpenuhi. Fakta menunjukkan berdasarkan pengalaman pada pendampingan Kurikulum 2013, khususnya di sekolah swasta, banyak guru mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Misalnya, guru mata pelajaran Fisika, selain mengajar mata pelajaran Fisika juga mengajar mata pelajaran Matematika dan Kimia sekaligus. Lebih parah lagi, guru yang sama mengajar di lebih dari satu sekolah.

Ruang kelas yang sesuai standar dan layak pakai tidak cukup untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang baik. Sarpras pembelajaran pendukung yang lengkap dan layak juga diperlukan. Data pada Lampiran IV menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah tidak memiliki sarpras pembelajaran yang lengkap dan layak. Sebagai contoh, ruang laboratorium. Banyak ditemukan sekolah tidak memiliki ruang laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, atau komputer. Ada sekolah yang menggunakan ruang kelas yang sebagai laboratorium fisika, kimia, atau biologi yang tidak sesuai standar. Ada sekolah yang memiliki laboratorium, tetapi sudah tidak layak digunakan. Selain fakta-fakta tersebut, data sarpras pendidikan dan PTK sumbernya sebagian besar dari dapodik, maka sumber data asli perlu dicek. Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran data peta mutu yang dikeluarkan karena nilai-nilai capaian mutu pada kedua standar tersebut sangat rendah. Nilai peta mutu NTB adalah hasil agregasi nilai peta mutu setiap sekolah. Oleh karena itu, nilai peta mutu NTB yang rendah disebabkan rendahnya nilai peta mutu setiap sekolah.

d. Capaian Mutu NTB Jenjang SMK

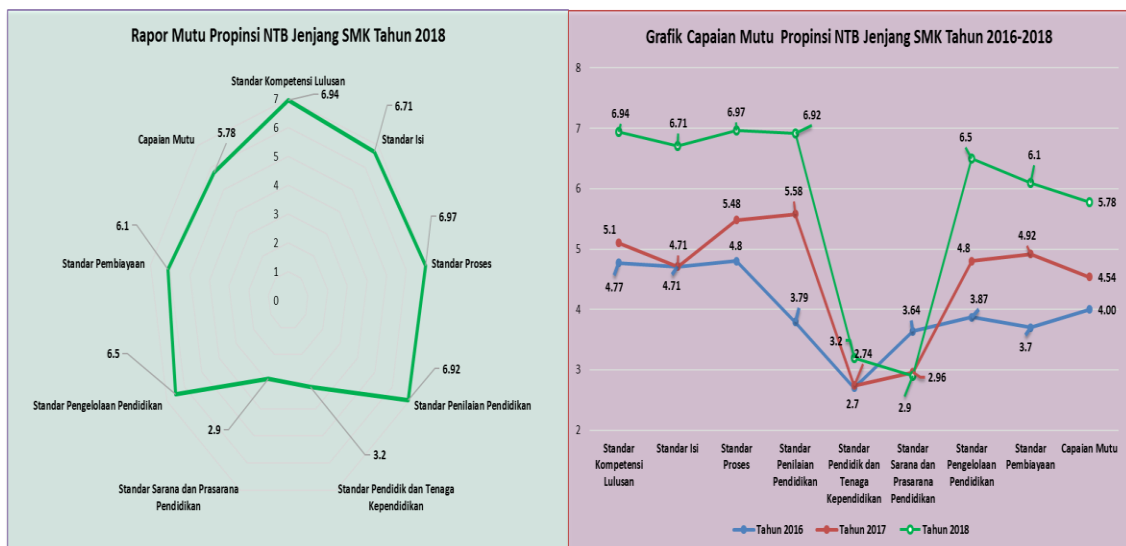
Jumlah sekolah yang mengirim data PMP jenjang SMK tahun 2018 sebanyak 221 sekolah, lebih sedikit 38 sekolah dari data tahun 2017 (lihat Tabel 12). Dari 221 sekolah yang telah mengirim data PMP, sebanyak 202 sekolah yang telah dikeluarkan peta mutunya pertanggal 2 Maret 2019. Secara umum, jumlah sekolah dengan kenaikan capaian SNP semakin banyak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, jumlah sekolah yang memiliki capaian SNP “menuju SNP 1” hanya menyisakan 4 sekolah dari 202 sekolah yang memiliki peta mutu. Jumlah ini turun drastis dari jumlah pada tahun 2016 dan 2017. Penurunan jumlah sekolah juga terjadi pada kategori “menuju SNP 2”. Pada kategori “menuju SNP 3”, jumlah sekolah yang berada pada kelompok tersebut pada tahun 2018 turun hampir 37% dari tahun 2017. Jumlah ini sekira 39.34% dari jumlah sekolah yang memiliki peta mutu pada tahun 2018.

Tabel 12 Distribusi Sekolah Jenjang SMK Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016 – 2018

Kategori	Jumlah Sekolah		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Menuju SNP 1	83	44	4
Menuju SNP 2	34	10	11
Menuju SNP 3	150	126	80
Menuju SNP 4	1	122	107
SNP	0	0	0
Jumlah Sekolah Kirim PMP (Diproses)	268	302	202

Ada perubahan cukup signifikan pada jumlah sekolah dengan kategori “menuju SNP 3” pada tahun 2018. Berkurangnya jumlah sekolah dengan kategori dibawah “menuju SNP 4” berdampak pada meningkatnya jumlah sekolah dengan kategori “menuju SNP 4”. Pada awal dilakukan pemetaan tahun 2016, jumlah sekolah dengan capaian “menuju SNP 4” hanya satu sekolah. Jumlah ini mengalami kenaikan sangat drastis pada tahun 2017. Kenaikan mencapai 121%. Namun, jumlah tersebut sedikit menurun pada tahun 2018. Selain faktor-faktor penyebab yang telah disebutkan di atas, penurunan pada tahun 2018 ini terjadi karena belum semua sekolah yang mengirim data PMP diolah peta mutunya. Selain itu, jumlah sekolah yang mengirim data PMP berkurang dibandingkan tahun 2017.

Jika dicermati berdasarkan capaian pada setiap standar, standar PTK dan standar sarpras pendidikan yang menjadi penyumbang paling besar terhadap banyaknya sekolah yang memiliki capaian kategori dibawah “menuju SNP 4”. Hal ini terjadi selama 3 tahun pelaksanaan pemetaan mutu. Gambar 9 bagian kanan menunjukkan pergerakan capaian mutu untuk setiap standar dalam tiga tahun. Pada tahun 2016, tidak ada satupun standar yang masuk dalam kategori “mencapai SNP 4”. Hasil ini sekilas bertentangan dengan data pada Tabel 12 dimana ada satu sekolah memiliki capaian “menuju SNP 4” pada tahun 2016. Catatan yang harus diperhatikan bahwa capaian ini adalah capaian rata-rata sehingga kemungkinan ada sekolah yang memiliki capaian “menuju SNP 4”. Namun, jumlah sekolah yang memiliki capaian di bawah “menuju SNP 4” sangat banyak sehingga pengaruh satu sekolah tidak signifikan mengubah capaian rata-rata.



Gambar 9 Grafik Capaian Mutu NTB Jenjang SMK Tahun 2016 – 2018

Pada tahun 2017, mayoritas capaian setiap standar mengalami kenaikan meskipun kenaikannya belum bisa mengangkat ke kategori yang lebih tinggi. Dari grafik ini tampak bahwa tiga standar masuk dalam kategori “menuju SNP 4”, yakni standar kompetensi lulusan (5.1), standar proses (5.48), dan standar penilaian pendidikan (5.58). Lagi, standar PTK dan standar sarpras pendidikan menempati posisi paling bawah sehingga menyebabkan grafik turun sangat curam. Kedua standar ini baru dalam capaian “menuju SNP 2”, sedangkan tiga standar sisanya mengelompok dalam “menuju SNP 3”.

Perkembangan cukup pesat terjadi pada tahun 2018. Secara umum, capaian mutu NTB untuk jenjang SMK sebesar 5.78, “menuju SNP 4”. Naik sekira 28% dari capaian pada tahun 2017. Ada empat standar yang telah memenuhi kriteria SNP. Bahkan tiga diantaranya memiliki nilai hampir sempurna. Keempat standar itu adalah standar kompetensi lulusan (6.94), standar isi (6.71), standar proses (6.97), dan standar penilaian pendidikan (6.92). Meskipun standar pembiayaan dan standar pengelolaan pendidikan belum memenuhi SNP, tetapi keduanya memiliki nilai yang sangat tinggi dan masuk kriteria “menuju SNP 4”. Namun, ada paradoks terjadi pada standar PTK dan standar sarpras pendidikan. Kedua standar yang disebutkan terakhir ini memiliki nilai yang sangat rendah dan hal ini terjadi seperti pada ketiga jenjang yang telah dijelaskan sebelumnya.

Delapan standar nasional pendidikan merupakan standar yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk itu, jika ada standar yang memiliki nilai yang disparitasnya terlalu tinggi, perlu ada kecurigaan terhadap data tersebut. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dan sebagaimana data yang ditampilkan pada Tabel 5, sumber data dari standar PTK dan standar sarpras pendidikan adalah isian dapodik. Ada 68 pertanyaan untuk standar PTK yang semuanya diisi melalui format dapodik dan 208 dari 257 butir pertanyaan untuk sarpras pendidikan ditanyakan melalui dapodik. Oleh karena itu, untuk memastikan kebenaran data kedua standar ini perlu dilakukan pemeriksaan tentang validitas data yang diisi.

Tabel 13 menampilkan data capaian setiap indikator pada masing-masing standar untuk jenjang SMK pada tahun 2018. Data lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran V. Nilai indikator 5.1 cukup rendah, 2.74. Jika dicek lebih detail pada Lampiran V, rendahnya nilai ini bukan karena kualifikasi guru tidak terpenuhi (nilai subindikator ini 5.95). Namun, rendahnya nilai indikator ini lebih disebabkan oleh belum terpenuhinya guru untuk setiap mata pelajaran dan sebagian besar guru belum bersertifikat pendidik. Selain itu, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru masih rendah.

Ada yang menarik dari indikator yang menjelaskan tentang kepala sekolah. Walaupun indikator ini bernilai 5.24 (“menuju SNP 4”), nilai beberapa subindikator ternyata sangat rendah. Data pada Lampiran V menunjukkan bahwa nilai subindikator “berpangkat minimal III/c atau setara” dan subindikator “bersertifikat pendidik” sangat rendah, masing-masing 3.26 dan 3.72. Kategori “menuju SNP 2”. Hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah yang diangkat dalam suatu sekolah tidak semuanya memenuhi persyaratan menurut Permendikbud Nomor 28 Tahun 2010. Misalnya, belum semua kepala sekolah yang diangkat bergolongan minimal IIIc dan atau bersertifikat pendidik. Bahkan, berdasarkan nilai

subindikator yang menunjukkan bahwa kepala sekolah yang diangkat harus bersertifikat kepala sekolah nilainya masuk dalam kategori “meunuju SNP 1”. Nilainya hanya 2.4.

Tabel 13 Capaian Mutu NTB Setiap Standar dan Indikator Jenjang SMK Tahun 2018

NO	Standar/Indikator	Nilai	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.94	★★★★★
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.99	★★★★★
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	6.77	★★★★★
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.96	★★★★★
2	Standar Isi	6.71	★★★★★
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6.89	★★★★★
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6.9	★★★★★
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	6.34	★★★★
3	Standar Proses	6.97	★★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.98	★★★★★
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.98	★★★★★
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.96	★★★★★
4	Standar Penilaian Pendidikan	6.92	★★★★★
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.89	★★★★★
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6.92	★★★★★
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.93	★★★★★
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	6.95	★★★★★
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	6.93	★★★★★
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.2	★★
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	2.74	★★
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.24	★★★★
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1.76	★
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	1.18	★
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	1.01	★
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.9	★★
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	2.98	★★
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	1.97	★
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	3.21	★★
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	6.5	★★★★
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.99	★★★★★
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.93	★★★★★
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2.3	★★
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.99	★★★★★
8	Standar Pembiayaan	6.1	★★★★
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.7	★★★★★
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.93	★★★★★
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.68	★★★

Dampak kepala sekolah tidak diangkat melalui prosedur seperti petunjuk Permendikbud Nomor 28 Tahun 2010 adalah kemungkinan kepala sekolah yang diangkat tersebut memiliki kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi yang rendah. Nilai perolehan untuk ketiga kompetensi ini sangat rendah seperti ditunjukkan pada Lampiran V. Kompetensi kepala sekolah yang juga memiliki nilai sangat rendah adalah kompetensi kepribadian dan sosial.

Rendahnya nilai capaian standar PTK berdasarkan Tabel 13 di atas lebih banyak disebabkan oleh tiga indikator, yaitu indikator ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi, tenaga laboran, dan tenaga pustakawan. Ketiga indikator ini memiliki nilai yang sangat rendah, di bawah dua atau masuk kategori “menuju SNP 1”. Tampak dari nilai-nilai yang ditampilkan pada Lampiran V bahwa semua sekolah tidak memiliki kepala tenaga administrasi (Kepala Tata Usaha, KTU), tetapi sebagian besar memiliki tenaga pelaksana urusan administrasi yang berpendidikan sesuai ketentuan. Di lain pihak, ada beberapa sekolah yang memiliki kepala tenaga pustakawan meskipun ada yang tidak sesuai kualifikasi dan belum bersertifikat.

Ada kejanggalan pada data kepala tenaga laboran. Ketersediaan kepala tenaga laboran memiliki nilai nol (kepala tenaga laboran tidak ada) tetapi data yang lain menunjukkan ada nilai pada subindikator kepala tenaga laboran berkualifikasi yang sesuai. Kontradiksi juga terjadi pada tenaga pustakawan. Data ketersediaan tenaga pustakawan dengan data pendidikan tenaga pustakawan saling bertentangan. Data menunjukkan bahwa ada tenaga pustakawan yang berpendidikan sesuai padahal tidak tersedia tenaga pustakawan. Selain itu, nilai kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial sangat rendah. Begitu pula kompetensi tambahan bagi kepala sekolah, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi juga sangat rendah. Kejanggalan nilai ini perlu dicek dan divalidasi dari data isian dapodik.

Standar sarana dan prasarana pendidikan juga memiliki capaian yang sangat rendah, 2.9, “menuju SNP 2”. Ketiga indikator yang mengukur standar ini memiliki nilai yang sangat rendah. Bahkan, satu indikator masuk bintang satu, “menuju SNP 1”. Jika dicermati, data pada Lampiran V menunjukkan bahwa dari 47 subindikator, enam subindikator memiliki capaian “memenuhi SNP”, satu subindikator “menuju SNP 4”, dan dua subindikator “menuju SNP 3”. Banyaknya subindikator, hampir 81%, yang memiliki nilai yang sangat

rendah dan mayoritas bintang satu menimbulkan pertanyaan besar. Maknanya, berdasarkan hasil pemetaan tahun 2018, mayoritas SMK di NTB memiliki sarpras pendidikan yang tidak memenuhi standar. Untuk menetapkan apakah data ini valid atau tidak dan supaya informasi ini tidak menyesatkan, perlu dilakukan verifikasi faktual di lapangan karena menurut Tabel 3, hampir 81% data sarpras pendidikan diperoleh dari isian dapodik.

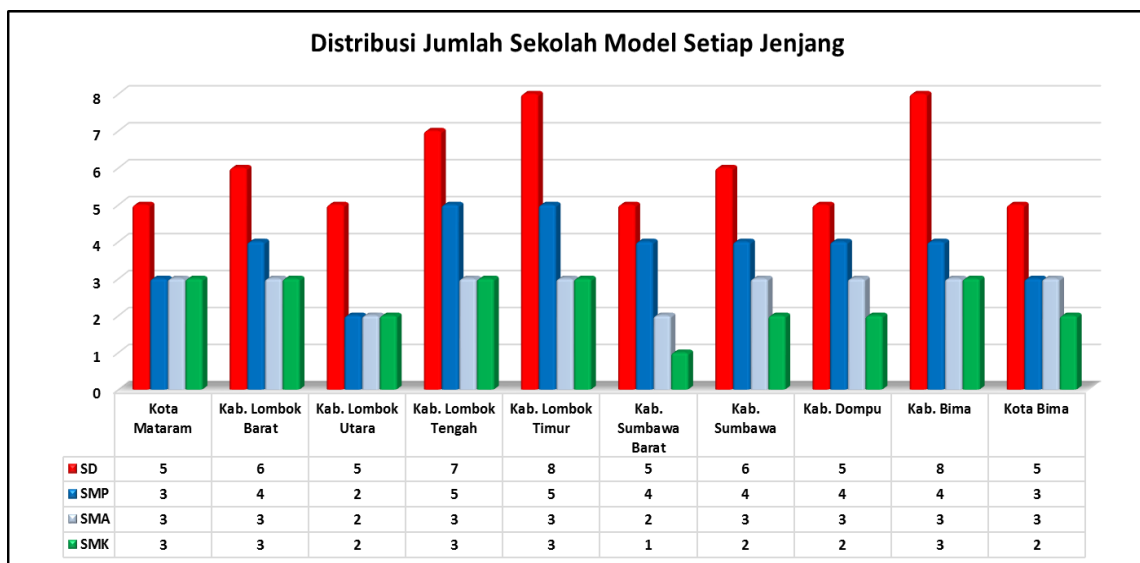
BAB III

RAPOR MUTU SEKOLAH MODEL

Pada bagian ini akan diuraikan tentang capaian mutu sekolah model di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2016 – 2018. Ulasan diberikan setiap jenjang untuk memudahkan membaca dan memahami rapor mutu tersebut. Selain membahas tentang rapor mutu sekolah model, pembahasan juga meliputi sejauh mana efektivitas penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah model dan bagaimana perbandingan hasil pemetaan mutu jika dikonversi ke batas-batas nilai akreditasi.

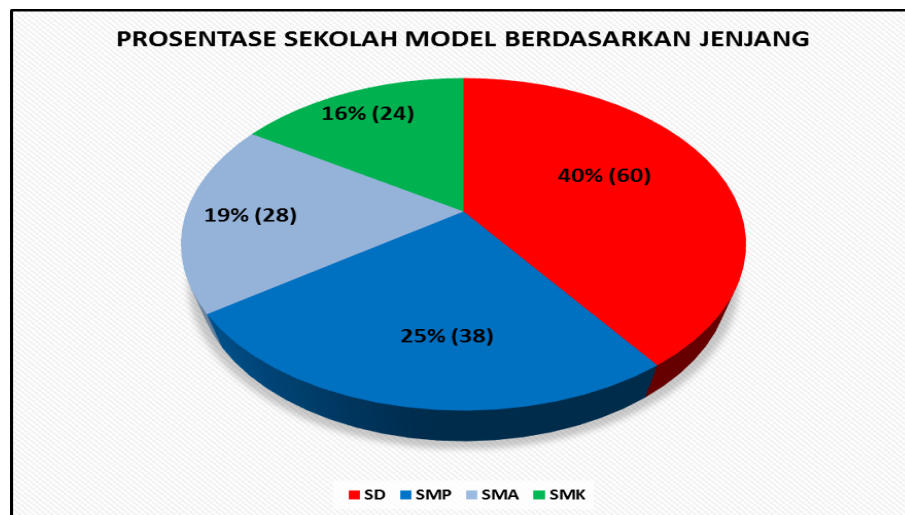
A. Sekolah Model

Sekolah model adalah sekolah yang menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut. Sekolah model diharapkan menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Penetapan sekolah model dilakukan oleh LPMP NTB berdasarkan usulan dari dinas pendidikan dan kebudayaan propinsi dan kabupaten/kota. Usulan dari masing-masing dinas pendidikan dan kebudayaan tersebut kemudian diverifikasi oleh LPMP NTB. Gambar 10 menunjukkan sebaran jumlah sekolah model pada setiap jenjang di 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.



Gambar 10 Distribusi Sekolah Model Setiap Jenjang di 10 Kabupaten/Kota

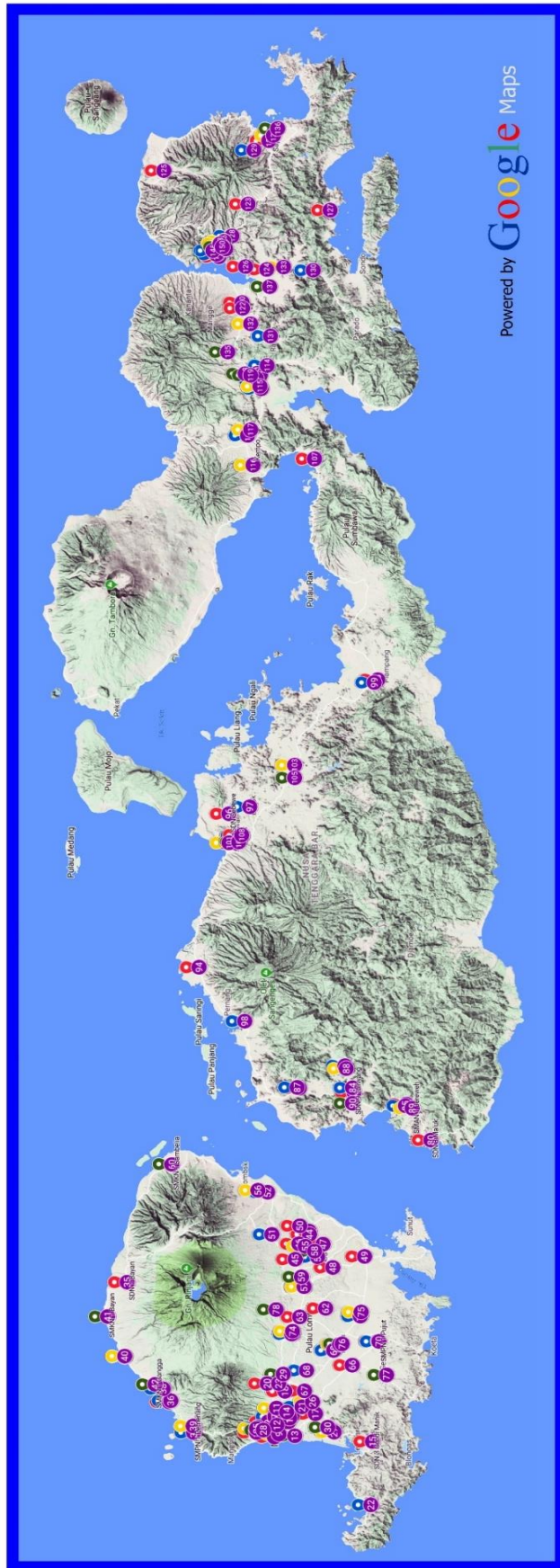
Sekolah model yang ditetapkan adalah sekolah yang telah memenuhi syarat-syarat: akreditasi sekolah minimal B dan belum memenuhi SNP; sekolah telah menerapkan Kurikulum 2013; jumlah rombel minimal 12 untuk jenjang SD dan SMP serta 9 rombel untuk jenjang SMA dan SMK; seluruh komponen sekolah bersedia dan berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan pengembangan sekolah model; ada komitmen dukungan dari pemerintah daerah.



Gambar 11 Persentase Sekolah Model Berdasarkan Jenjang

Pada awal pengembangan sekolah model, tahun 2016, LPMP NTB hanya menetapkan dan membina 10 sekolah model, khusus jenjang SMP. Sejak tahun 2017, kuota sekolah model menjadi 150 sekolah yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LPMP NTB Nomor 280/D7.17/KS/2018 ditetapkan sebanyak 150 sekolah model yang akan dibina oleh LPMP NTB dalam mengimplementasikan SPMI. Sebaran perjenjang 150 sekolah model tersebut terdiri atas 60 SD (40%), 38 SMP (25%), 28 SMA (19%), dan sisanya sebanyak 24 SMK (16%). Distribusi sekolah model di 10 kabupaten/kota setiap jenjang ditunjukkan Gambar 10 dan Gambar 11. Peta distribusi sekolah model ditunjukkan pada Gambar 12 dan dapat juga dilihat melalui alamat [link: http://bit.do/peta-sekmod-ntb](http://bit.do/peta-sekmod-ntb)

Jumlah sekolah model sebanyak 150 sekolah masih sangat sedikit. Hanya 3.11% dari total sekolah di NTB. Berdasarkan dapodik 2018 jumlah sekolah di NTB sebanyak 4.819 sekolah (<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>). Agar implementasi SPMI semakin luas dan lebih banyak lagi sekolah yang menerapkan, sekolah model yang telah ditetapkan harus mengimbaskan pengalaman implemetasi SPMI ke 5 sekolah imbas yang terletak di sekitar sekolah model. Sekolah imbas ini dilibatkan pada seluruh rangkaian kegiatan pendampingan implementasi SPMI bersama sekolah model.



PETA SEBARAN SEKOLAH MODEL BINAAN LPMP NUSA TENGGARA BARAT - 2018

KOTA MATARAM	KAB. LOMBOK BARAT	KAB. LOMBOK UTARA	KAB. LOMBOK TIMUR	KAB. LOMBOK TENGAH	KAB. SUMBAWA BARAT	KAB. SUMBAWA	KAB. DOMPU	KAB. BIMA	KOTA BIMA
1. SDN 1 AMPENAN	1. SDN 3 CENDI MANIK	1. SDN 2 PEREMANG BARAT	1. SDN 3 TEOLOS	1. SDN 1 TENGAH	1. SDN 9 TALIWANG	1. SDN 1 SUMBAWA	1. SDN 2 DOMPU	1. SDN 1 SULA	1. SDN 19 KOTA BIMA
2. SDN 6 MATARAM	2. SDN 1 JERBATAN GANTUNG	2. SDN 2 TANJUNG	2. SDN 3 SELONG	2. SDN 1 DURIAN	2. SDN 3 MALUK	2. SDN 6 SUMBAWA	2. SDN 7 MANGGELEWA	2. SDN 10 RATO KEC. SAPE	2. SDN 55 KOTA BIMA
3. SDN 11 MATARAM	3. SDN 1 BELEKA	3. SDN 3 GONDANG	3. SDN 3 MASBAGIK SELATAN	3. SDN 2 KOPANG	3. SDN 2 SETULUK	3. SDN 1 UMA BERLINGIN	3. SDN 7 PEKAT	3. SDN 9 SULA	3. SDN 02 KOTA BIMA
4. SDN 2 CAKRANEGARA	4. SDN 1 DASAN TERENG	4. SDN 2 KAYANGAN	4. SDN 2 SUKAMULIA	4. SDN 1 JEREMEH	4. SDN 1 JEREMEH	4. SDN 2 UTAN	4. SDN 1 WODA	4. SDN 2 MARIA	4. SDN 11 KOTA BIMA
5. SDN 25 CAKRANEGARA	5. SDN 1 SANDIK	5. SDN 1 BAYAN	5. SDN 1 MONTONG TANGI	5. SDN 2 MANTANG	5. SDN 2 DESA BERU	5. SDN 1 PLAMPANG	5. SDN 5 HUYU	5. SDN 2 TALABU	5. SDN 46 KOTA BIMA
6. SDN 5 MATARAM	6. SDN 1 BATU KUMBUNG	6. SDN 1 TANJUNG	6. SDN 1 PENGKELAK MAS	6. SDN 3 PERUDAK	6. SDN 6 TALIWANG	6. SDN 1 SEBEWE	6. SDN 14 DOMPU	6. SDN 1 TAWALI WERA	6. SDN 8 KOTA BIMA
7. SDN 4 MATARAM	7. SDN 1 KEDIRI	7. SDN 1 PEREMANG	7. SDN 1 SELEBUNG KETANGGA	7. SDN 1 UBUNG	7. SDN 1 JEREMEH	7. SDN 1 MOYOHILIR	7. SDN 11 WODA	7. SDN 10 PANDA PALIBELO	7. SDN 2 KOTA BIMA
8. SDN 7 MATARAM	8. SDN 1 SEKOTONG	8. SDN 1 GANGA	8. SDN 2 BAGIK PAYUNG	8. SDN 2 PRONGAT	8. SDN 1 BRANG REA	8. SDN 1 ALAS	8. SDN 11 MANGGELEWA	8. SDN 10 MARUMBU	8. SDN 7 KOTA BIMA
9. SDN 2 MATARAM	9. SDN 2 LINGSAR	9. SDN 1 PEREMANG	9. SDN 1 AIRMEL	9. SDN 2 PRAYA	9. SDN 1 SETULUK	9. SDN 1 PLAMPANG	9. SDN 11 DOMPU	9. SDN 3 SAPE	9. SDN 3 KOTA BIMA
10. SDN 4 MATARAM	10. SDN 1 GUNINGSARI	10. SDN 1 KAYANGAN	10. SDN 1 PRINGGABAYA	10. SDN 1 PIJUT	10. SDN 1 BRANG REA	10. SDN 3 SUMBAWA	10. SDN 1 WODA	10. SDN 5 LANGGUDU	10. SDN 2 KOTA BIMA
11. SDN 6 MATARAM	11. SDN 1 GUNINGSARI	11. SDN 1 BAYAN	11. SDN 1 TERARA	11. SDN 1 PRAYA TIMUR	11. SDN 1 JEREMEH	11. SDN 1 SUMBAWA	11. SDN 1 KEMPO	11. SDN 1 MONTA	11. SDN 4 KOTA BIMA
12. SDN 1 MATARAM	12. SDN 1 KURIPAN	12. SDN 1 GANGA	12. SDN 1 SANGA	12. SDN 1 BATUKULANG	12. SDN 1 TALIWANG	12. SDN 1 ALAS	12. SDN 1 MANGGELEWA	12. SDN 2 MADAPANGGA	12. SDN 2 KOTA BIMA
13. SDN 9 MATARAM	13. SDN 1 LEMBAR	13. SDN 2 SELONG	13. SDN 1 PRINGGABAYA	13. SDN 2 PRAYA	13. SDN 1 BATUKULANG	13. SDN 1 LUPE	13. SDN 1 WODA	13. SDN 1 MADAPANGGA	13. SDN 3 KOTA BIMA
14. SDN 6 MATARAM	14. SDN 1 GUNINGSARI	14. SDN 1 TERARA	14. SDN 3 SELONG	14. SDN 1 BATUKULANG	14. SDN 1 PRINGGABAYA	14. SDN 3 SUMBAWA	14. SDN 1 WODA	14. SDN 1 BELO	14. SDN 1 SAPE
15. SDN 1 MATARAM	15. SDN 1 NARMADA	15. SDN 1 SIKUR	15. SDN 1 SIKUR	15. SDN 1 PRAYA BARAT	15. SDN 1 LUPOK	15. SDN 1 LUPOK	15. SDN 1 WODA	15. SDN 1 SAPE	15. SDN 5 ROBA
16. SDN 2 MATARAM	16. SDN 2 GERUNG	16. SDN 1 SIKUR	16. SDN 1 SIKUR	16. SDN 1 PRAYA BARAT	16. SDN 1 LUPOK	16. SDN 1 LUPOK	16. SDN 1 WODA	16. SDN 1 SAPE	16. SDN 1 BIMA
17. SDN 1 MATARAM	17. SDN 1 SIKUR	17. SDN 1 SIKUR	17. SDN 1 SIKUR	17. SDN 1 PRAYA BARAT	17. SDN 1 LUPOK	17. SDN 1 LUPOK	17. SDN 1 WODA	17. SDN 1 SAPE	17. SDN 2 BIMA

Gambar 12 Peta Distribusi Sekolah Model di Nusa Tenggara Barat Tahun 2018

B. Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SD

Ada enam puluh sekolah model jenjang SD yang ditetapkan pada tahun 2017 untuk menjadi pionir dalam melaksanakan SPMI. Lihat data pada BAB II tentang penetapan sekolah model. Sejak dilaksanakan EDS melalui instrumen pemetaan mutu, hampir semua sekolah model jenjang SD melakukan EDS dan mengirimkan datanya ke pusat. Namun, ada beberapa sekolah model yang tidak melakukan EDS sehingga tidak keluar rapor mutunya. Ada juga sekolah model yang telah mengirimkan data, tetapi rapor mutu tidak keluar karena gagal diproses. Sekolah-sekolah model yang tidak keluar rapor mutunya dalam laporan ini tidak dilibatkan dalam analisis. Sekolah-sekolah model yang tidak memiliki rapor mutu ditunjukkan dengan capaian kategori “menuju SNP 1” atau dalam Lampiran 6, 8, 10, dan 12 dinyatakan dengan kode M1. Pada lampiran-lampiran tersebut, sekolah-sekolah model yang kategori capaian mutunya M1 diberi tanda warna oranye pada nilai capaiannya.

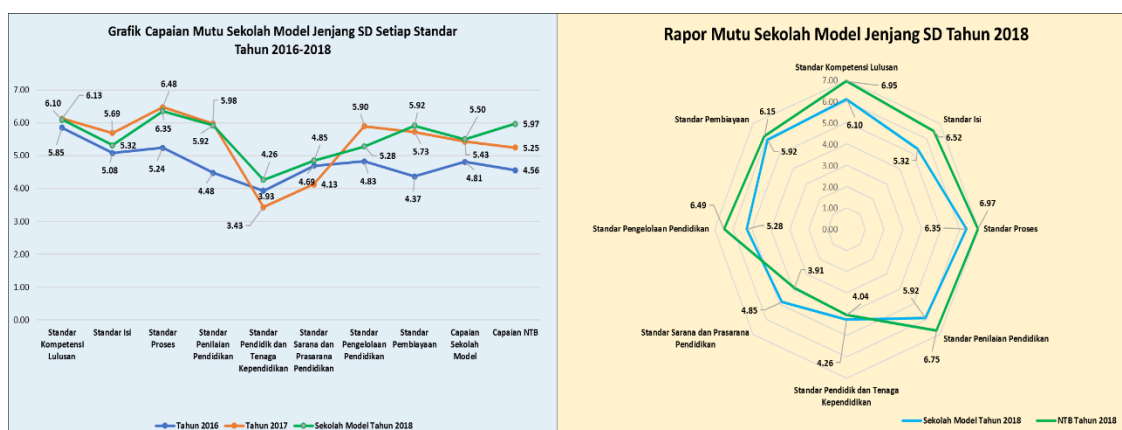
Tabel 14 menunjukkan jumlah sekolah model pada jenjang SD berdasarkan kategori capaian mutu selama tahun 2016 – 2018. Selama tiga tahun pemetaan, jumlah sekolah model yang memiliki capaian dengan kategori “menuju SNP 1” sangat sedikit, masing-masing 1 pada tahun 2016 dan 2017. Jumlah sekolah model pada kategori ini meningkat pada tahun 2018, sebanyak 6 sekolah, paling banyak di Kabupaten Lombok Utara (tiga sekolah). Hal ini disebabkan Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah yang mengalami kerusakan paling parah akibat gempa bumi sehingga sekolah fokus pada pemulihan kondisi. Sementara tiga sekolah yang lain meskipun telah mengirim data, tetapi rapor mutunya tidak keluar karena gagal diproses oleh sistem. Enam sekolah model tersebut selanjutnya tidak dilibatkan dalam perhitungan analisis.

Tabel 14 Distribusi Sekolah Model Jenjang SD Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016 – 2018

Kategori	Jumlah Sekolah		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Menuju SNP 1	1	1	6
Menuju SNP 2	0	2	2
Menuju SNP 3	47	5	3
Menuju SNP 4	12	52	49
SNP	0	0	0
Jumlah	60	60	60

Kategori capaian “menuju SNP 3” mendominasi pada tahun 2016. Lebih dari 78% sekolah model dengan capaian pada kategori ini. Hal ini wajar karena pada tahun tersebut pemetaan kali pertama dilaksanakan. Jumlah sekolah model dengan kategori tersebut pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan cukup signifikan. Sebagian besar sekolah model meningkat capaian mutunya ke kategori “menuju SNP 4”. Hal ini menunjukkan bahwa program penjaminan mutu pendidikan yang telah dilaksanakan oleh sekolah model memiliki dampak positif. Seberapa besar efektivitas penjaminan mutu pendidikan tersebut akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Hal yang menarik dan perlu mendapat perhatian adalah tidak adanya sekolah model yang mencapai kategori SNP. Lebih-lebih pada tahun 2018, tahun ketiga pelaksanaan SPMI. Namun sebaliknya, ada sekolah model yang memiliki capaian “menuju SNP 2” dan “menuju SNP 3”. Sekolah disebut telah mencapai SNP jika semua standar dalam SNP sudah terpenuhi. Capaian pada kategori SNP dihitung berdasarkan rata-rata capaian delapan standar. Artinya, jika salah satu dari delapan standar yang ada belum mencapai SNP maka secara umum capaian sekolah tersebut belum masuk kategori SNP. Namun, jika dilihat per standar, maka suatu sekolah bisa jadi sudah SNP pada standar tertentu. Misalnya, ada sekolah sudah SNP pada standar kompetensi lulusan, tapi belum mencapai SNP pada standar pembiayaan. Ada sekolah yang sudah memenuhi SNP pada standar proses dan standar penilaian pendidikan, tapi bisa jadi belum SNP pada standar pengelolaan. Lihat Gambar 13.



Gambar 13 Grafik Capaian Mutu Sekolah Model Jenjang SD Tahun 2016 – 2018

Gambar 13 bagian kanan menunjukkan rata-rata capaian mutu setiap standar dari 54 sekolah model jenjang SD pada tahun 2018. Capaian mutu sekolah model jenjang SD pada tahun 2018 sebesar 5.50. Artinya, secara umum semua sekolah model jenjang SD baru memenuhi

sekitar 79% SNP. Berdasarkan kriteria pada Tabel 5, tidak satu pun standar yang mencapai SNP. Ada dua standar yang masuk kategori “menuju SNP 3”, yaitu standar sarana dan prasarana pendidikan (4.26) serta standar pendidik dan tenaga kependidikan (4.85).

Capaian sekolah model untuk 6 standar yang lain pada tahun 2018 masuk dalam kategori “menuju SNP 4”. Meskipun masuk kategori “menuju SNP 4”, standar isi (5.32) dan standar pengelolaan pendidikan (5.28) memiliki selisih nilai cukup dekat dengan batas atas nilai kategori “menuju SNP 3”, yaitu 5.06. Tidak adanya standar yang masuk kriteria SNP dan ada standar yang masuk kriteria “menuju SNP 3” atau selisih nilainya cukup dekat dengan batas atas kriteria “menuju SNP 3” memerlukan kajian lebih dalam penyebab hal tersebut terjadi karena sekolah model yang ditetapkan telah melaksanakan SPMI selama dua atau tiga tahun dan akreditasi sekolah-sekolah tersebut minimal B.

Standar sarana dan prasarana pendidikan serta standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), memiliki capaian yang cukup rendah. Hal ini cukup “aneh” dan perlu mendapat perhatian. Sumber data dari dua standar ini sebagian besar dari isian pada dapodik. Oleh karena itu, hal ini perlu dicek apakah rendahnya nilai kedua standar tersebut disebabkan kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diinput dalam aplikasi dapodik atau ada penyebab lainnya. Nilai capaian untuk standar PTK yang rendah tidak sinkron dengan nilai capaian standar proses, standar isi, standar penilaian pendidikan, dan standar kompetensi lulusan. Keempat standar yang disebutkan terakhir ini berhubungan langsung dengan kompetensi PTK. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor penting terpenuhinya proses pembelajaran yang baik dan sesuai standar. Terselenggaranya proses pembelajaran yang baik tentu tidak terlepas dari kemampuan PTK dalam merancang perangkat pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang disyaratkan.

Anomali lainnya adalah rendahnya capaian mutu untuk standar sarpras pendidikan dibandingkan nilai enam standar yang lain. Pada kasus ini, standar sarpras pendidikan memiliki nilai 4.26. Padahal empat standar lain- standar proses, standar isi, standar penilaian pendidikan, dan standar kompetensi lulusan-yang dipengaruhi langsung oleh standar sarpras memiliki nilai yang relatif tinggi. Idealnya, agar PTK dapat melakukan tugasnya dengan maksimal untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi bagus, selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan memerlukan dukungan sarpras pendidikan yang sesuai standar. Tersedianya sarpras pendidikan yang sesuai standar akan

membuat proses pembelajaran menjadi lancar. PTK dan peserta didik juga menjadi nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Agar data pada Gambar 13 tidak menjadi informasi yang menyesatkan, perlu dilihat pada bagian mana dari standar PTK dan standar sarpras pendidikan yang menyebabkan rendahnya nilai kedua standar itu secara keseluruhan. Adanya informasi tentang indikator dan subindikator mana saja yang masih lemah dapat menjadi acuan penyusunan program perbaikan. Tidak hanya pada standar PTK dan sarana dan prasarana pendidikan yang nilainya masih kurang, standar pendidikan dengan nilai yang sudah bagus juga harus ditelaah indikator-indikator mana saja yang harus ditingkatkan.

Perkembangan capaian mutu sekolah model jenjang SD selama tahun 2016 – 2018 relatif stagnan. Kenaikan capaian mutu dari tahun 2016 ke tahun 2017 rata-rata sebesar 13% dan kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 rata-rata sebesar 1.25%. Nilai capaian sekolah model jenjang SD tahun 2018 lebih rendah dari capaian NTB pada jenjang dan tahun yang sama. Pada Gambar 13 bagian kanan tampak bahwa hanya dua standar pada sekolah model yang nilainya melebihi capaian standar NTB. Kedua standar itu adalah standar sarana dan prasarana pendidikan serta standar PTK. Namun, capaian kedua standar tersebut, baik pada sekolah model maupun NTB, masih rendah dan termasuk dalam kategori “menuju SNP 3”.

Gambar 13 bagian kiri menunjukkan progres capaian mutu setiap standar selama tiga tahun. Pada rentang tahun 2017 – 2018, hanya tiga standar yang mengalami kenaikan. Standar sarana dan prasarana pendidikan naik 17.30%, standar PTK naik 24.30%, dan standar pembiayaan naik 3.31%. Walaupun ketiga standar ini mengalami kenaikan, persentase kenaikan relatif rendah karena tahun 2018 adalah tahun ketiga pemetaan saat sosialisasi tentang pentingnya pemetaan mutu pendidikan semakin gencar dilakukan. Selain itu, sebagai sekolah model yang mendapatkan pendampingan dalam melaksanakan SPMI seharusnya memperoleh kenaikan capaian yang tinggi. Hal ini lebih parah lagi ketika enam standar yang lain mengalami penurunan. Penurunan nilai capaian paling tinggi terjadi pada standar standar pengelolaan pendidikan sebesar 10.43%, dari 5.90 menjadi 5.28.

Rata-rata kenaikan capaian mutu pada rentang 2016-2017 sebesar 13%. Ada enam standar yang mengalami kenaikan dan dua standar yang lain turun. Kenaikan paling tinggi terjadi pada standar penilaian pendidikan sebesar 33.48%. Hal yang menarik adalah kenaikan yang

terjadi pada standar kompetensi lulusan, standar isi, kenaikan standar proses, dan standar penilaian pendidikan bertolak belakang dengan capaian pada standar PTK. Standar PTK turun 12.74%. Nilai capaian untuk standar PTK yang rendah tidak sinkron dengan nilai capaian standar proses, standar isi, standar penilaian pendidikan, dan standar kompetensi lulusan. Keempat standar yang disebutkan terakhir ini berhubungan langsung dengan kompetensi PTK. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor penting terpenuhinya proses pembelajaran yang baik dan sesuai standar. Terselenggaranya proses pembelajaran yang baik tentu tidak terlepas dari kemampuan PTK dalam merancang perangkat pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang disyaratkan.

C. Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SMP

Tabel 15 menunjukkan jumlah sekolah model berdasarkan kategori capaian SNP tahun 2016-2018 jenjang SMP. Berdasarkan data pada Tabel 15 tersebut, tidak ada sekolah model dengan capaian “menuju SNP 1” pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 jumlah sekolah model pada kategori ini meningkat dibandingkan pada tahun 2017 dan sama banyak dengan tahun 2016. Berdasarkan data progres pengiriman PMP tahun 2018, lima sekolah model dengan kategori “menuju SNP 1” telah mengirim data PMP dan tercatat “sudah terkirim” dalam sistem. Namun, rapor mutu kelima sekolah model tersebut tidak keluar. Nama-nama sekolah model yang tidak keluar rapor mutunya dapat dilihat pada Lampiran 8 yang ditandai dengan kategori M1 pada kolom “Kategori Capaian Tahun 2018”.

Tabel 15 Distribusi Sekolah Model Jenjang SMP Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016 – 2018

Kategori	Jumlah Sekolah		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Menuju SNP 1	5	0	5
Menuju SNP 2	1	1	0
Menuju SNP 3	26	3	4
Menuju SNP 4	6	34	29
SNP	0	0	0
Jumlah	38	38	38

Tidak keluarnya rapor mutu sekolah disebabkan data yang diterima oleh server PMP tidak lengkap atau kendala server pada saat pemrosesan data. Sekolah-sekolah yang tidak keluar rapor mutunya ini meskipun sudah mengirim agar mengirim ulang untuk diproses ulang.

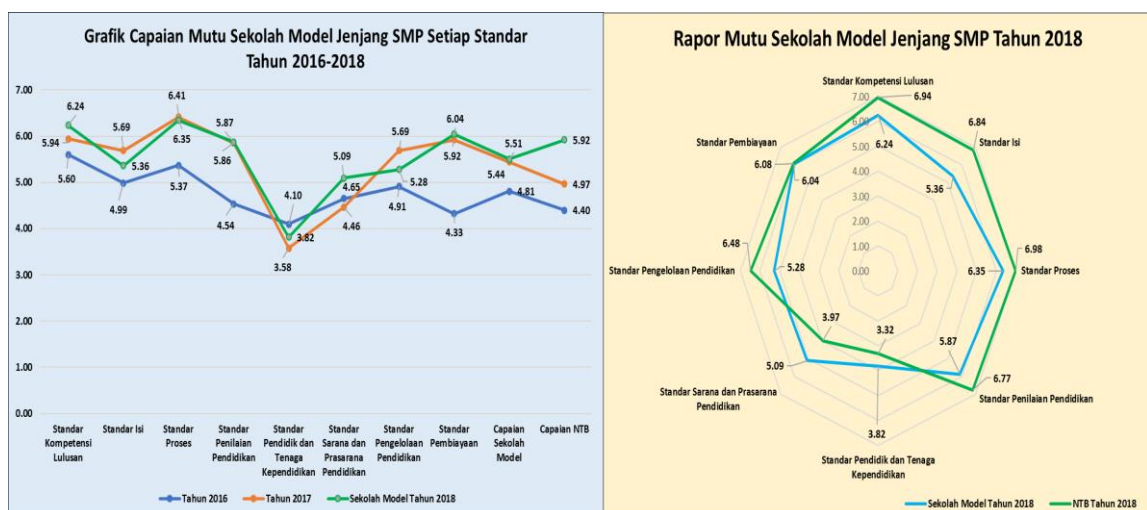
Kelima sekolah yang tidak keluar peta mutunya pada tahun 2018 tidak dilibatkan dalam pengolahan data dan analisis lebih lanjut dalam laporan ini. Nilai capaian mutu setiap sekolah model jenjang SMP dapat dilihat pada Lampiran 8 dan Lampiran 9.

Kategori capaian “menuju SNP 3” mendominasi pada tahun 2016. Lebih dari 68% sekolah model dengan capaian pada kategori ini. Hal ini wajar karena pada tahun tersebut pemetaan kali pertama dilaksanakan. Sementara itu, hasil pemetaan tahun 2017 dan 2018 menunjukkan jumlah sekolah model pada kategori “menuju SNP 3” turun drastis. Mayoritas sekolah model masuk kategori “menuju SNP 4”. Tahun 2017 sebanyak 89.47% dan sedikit menurun pada tahun 2018, sebanyak 29 sekolah atau 76.32%. Hal ini menunjukkan bahwa program penjaminan mutu pendidikan yang telah dilaksanakan oleh sekolah model memiliki dampak positif.

Seperti halnya sekolah model jenjang SD, belum ada sekolah model yang masuk kategori SNP dalam rentang tahun 2016 – 2018. Anomali ini perlu dilakukan pengecekan di lapangan untuk mengetahui penyebabnya karena tahun 2018 adalah tahun ketiga dilakukan pemetaan ketika sosialisasi tentang PMP sangat gencar dilakukan. Infrastruktur pemetaan relatif stabil. Lebih-lebih hal ini terjadi pada sekolah model yang notabene memiliki akreditasi minimal B serta dipilih dan disaring dari banyak sekolah. Berdasarkan data pada Lampiran 15, dari 38 sekolah model 24 diantaranya memiliki akreditasi A dan 9 sekolah model memiliki akreditasi B. Tiga sekolah yang berkreditasi A dan dua sekolah dengan akreditasi B tidak dihitung karena kelima sekolah tersebut peta mutunya tidak keluar pada tahun 2018.

Gambar 14 menunjukkan progres capaian mutu sekolah model jenjang SMP. Secara umum capaian mutu sekolah model jenjang SMP selama tiga tahun mengalami kenaikan sangat rendah. Tahun 2018, nilai capaian hanya naik sekitar 1.13% dari capaian tahun 2017. Kenaikan ini lebih rendah dari nilai peningkatan dari 2016 ke 2017 sebesar 13.18%. Berdasarkan kriteria pada Tabel 5, capaian mutu sekolah model jenjang SMP tahun 2016, 2017, dan 2018 masing-masing “menuju SNP 3” dan “menuju SNP 4” dengan nilai masing-masing 4.81, 5.44, dan 5.51 (lihat Gambar 14 bagian kiri). Jika dicermati, hasil pemetaan tahun 2016 cenderung rendah. Hanya dua standar yang memiliki kategori “menuju SNP 4”, enam standar yang lain masuk kategori “menuju SNP 3”. Hasil ini sejalan dengan data pada Tabel 17 yang menunjukkan bahwa lebih dari 84% sekolah model yang capaian mutunya di bawah kategori “menuju SNP 3”. Artinya, penyebab banyaknya sekolah di bawah kategori “menuju SNP 4” disebabkan enam standar hanya mencapai kategori “menuju SNP 3”.

Hasil pemetaan tahun 2017 dan 2018 relatif tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kenaikan nilai capaian tahun 2018 cukup rendah, hanya sebesar 1.13% dari capaian tahun 2017. Ada tiga standar yang mengalami penurunan nilai capaian dari capaian tahun 2017. standar isi (5.36) turun 5.79%, standar proses (6.35) turun 1.03%, dan standar pengelolaan pendidikan (5.28) turun 7.22%. Nilai capaian standar penilaian pendidikan (5.86) meskipun mengalami kenaikan, persentase kenaikannya sangat rendah, hanya 0.24%. Kenaikan paling tinggi terjadi pada standar sarana dan prasarana pendidikan (5.09) sebesar 14.11%. Pada grafik bagian kanan Gambar 14 tampak bahwa hanya dua nilai standar untuk sekolah model jenjang SMP yang melebihi capaian NTB, yaitu standar PTK dan standar sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan hasil pemetaan tahun 2018.



Gambar 14 Grafik Capaian Mutu Sekolah Model Jenjang SMP Tahun 2016 – 2018

Hal yang perlu mendapat perhatian lebih adalah rendahnya capaian mutu untuk standar PTK (3.82), “menuju kategori 3”. Nilai capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun 2017, naik 6.81%, dan lebih rendah dari capaian tahun 2016. Gambar 24 bagian kiri menunjukkan nilai standar tersebut menyebabkan grafik turun sangat curam. Bahkan untuk capaian pada tingkat NTB, nilai ini hanya masuk kategori “menuju SNP 2” sehingga menyebabkan grafik terjun sangat curam (lihat Gambar 14). Rendahnya nilai standar PTK perlu dicermati lebih dalam penyebabnya. Standar PTK memiliki hubungan yang sangat erat dengan standar proses, standar isi, standar penilaian pendidikan, dan standar kompetensi lulusan. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor penting terpenuhinya proses pembelajaran yang baik dan sesuai standar. Terselenggaranya proses pembelajaran yang baik tentu tidak terlepas dari kemampuan PTK dalam merancang perangkat pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang disyaratkan.

Tahun 2018 adalah tahun ketiga pemetaan mutu pendidikan dimana sosialisasi tentang manfaat peta mutu sudah masif dilakukan. Infrastruktur aplikasi sudah relatif bagus. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa nilai standar PTK sebagian besar berasal dari hasil isian dapodik. Berdasarkan fakta yang terjadi selama proses pengumpulan data PMP, aplikasi dapodik sering mengalami pembaharuan. Pembaharuan aplikasi dapodik ini tidak diiringi dengan pembaharuan aplikasi PMP pada saat yang sama. Akibatnya, aplikasi PMP tidak bisa berjalan normal. Hal ini tentu menghambat proses pengumpulan data PMP. Jadi, tidak sinkronnya aplikasi PMP dengan aplikasi dapodik bisa jadi menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai standar PTK dan sarpras pendidikan. Penyebab lain adalah kemungkinan data PTK dan sarpras tidak diisi lengkap oleh sekolah.

D. Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SMA

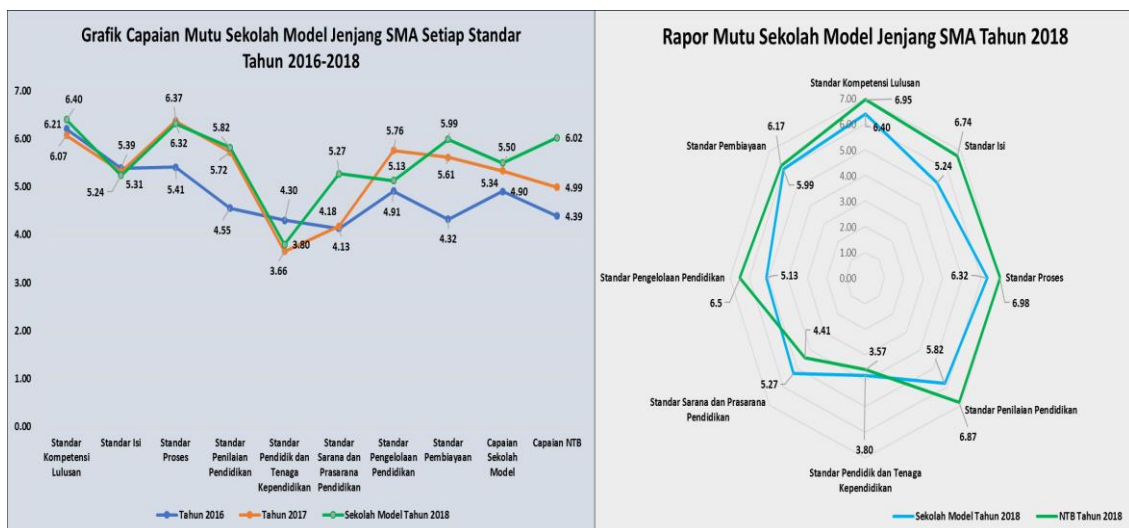
Jumlah sekolah model jenjang SMA sebanyak 28 sekolah. Berdasarkan informasi pada Tabel 16, jumlah sekolah yang memiliki capaian SNP “menuju SNP 1” sebanyak 3 sekolah. Ketiga sekolah model ini tidak keluar peta mutunya karena data PMP sekolah-sekolah tersebut gagal diproses oleh server dan ada sekolah yang tidak mengirim data PMP. Pada kategori “menuju SNP 4”, terdapat sebanyak 23 sekolah model. Jumlah ini terbanyak dalam rentang tiga tahun pemetaan. Namun, meskipun pemetaan telah memasuki tahun ketiga, terdapat dua sekolah yang masih memiliki capaian “menuju SNP 3”. Capaian “menuju SNP 3” paling banyak terjadi pada tahun awal dilaksanakan pemetaan, yaitu sebesar 64.29% atau sebanyak 18 sekolah. Jumlah ini turun drastis pada tahun 2017 dan 2018. Kenaikan jumlah sekolah yang masuk kategori “menuju SNP 4” terjadi sangat tajam pada tahun 2017, sebesar 150% dari tahun 2016.

Tabel 16 Distribusi Sekolah Model Jenjang SMA Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016 – 2018

Kategori	Jumlah Sekolah		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Menuju SNP 1	2	0	3
Menuju SNP 2	0	0	0
Menuju SNP 3	18	8	2
Menuju SNP 4	8	20	23
SNP	0	0	0
Jumlah	28	28	28

Seperti halnya sekolah model jenjang SD dan SMP, belum ada sekolah model jenjang SMA yang masuk kategori SNP dalam rentang tahun 2016-2018. Anomali ini perlu dilakukan pengecekan di lapangan untuk mengetahui penyebabnya karena tahun 2018 adalah tahun ketiga dilakukan pemetaan dan sosialisasi tentang PMP sangat gencar dilakukan. Infrastruktur pemetaan relatif stabil. Lebih-lebih hal ini terjadi pada sekolah model yang memiliki akreditasi minimal B serta dipilih dan disaring dari banyak sekolah. Berdasarkan data pada Lampiran 16, dari 28 sekolah model, satu diantaranya memiliki akreditasi B dan 25 sekolah model memiliki akreditasi A. Dua sekolah yang berkreditasi A dan satu sekolah dengan akreditasi B tidak dihitung karena ketiga sekolah tersebut peta mutunya tidak keluar pada tahun 2018. Nilai capaian mutu setiap sekolah model jenjang SMA dapat dilihat pada Lampiran 10 dan Lampiran 11.

Gambar 15 bagian kanan menunjukkan pergerakan capaian mutu untuk setiap standar dalam tiga tahun. Dari grafik ini tampak bahwa pada tahun 2016 hanya tiga standar kompetensi lulusan yang masuk kategori “menuju SNP 4”. Lima standar yang lain memiliki capaian “menuju SNP 3. Hasil ini sejalan dengan data pada Tabel 18 yang menyebutkan bahwa jumlah sekolah yang memiliki capaian “menuju SNP 3” mendominasi pada tahun 2016. Secara umum, capaian mutu sekolah model jenjang SMA tahun 2016 di atas capaian NTB pada jenjang dan tahun yang sama. Namun, capaian ini nilainya rendah karena masih dalam kategori “menuju SNP 3”.



Gambar 15 Grafik Capaian Mutu Sekolah Model Jenjang SMA Tahun 2016 – 2018

Nilai capaian mutu sekolah model jenjang SMA pada tahun 2017 berada di atas capaian mutu untuk wilayah NTB pada jenjang yang sama. Hasil pemetaan pada tahun ini menggambarkan bahwa ada enam standar yang memiliki capaian “menuju SNP 4”, satu standar “menuju SNP 3”, dan satu standar “menuju SNP 2”. Hasil ini juga mengonfirmasi data pada Tabel 16. Persentase kenaikan capaian mutu pada tahun ini hanya sebesar 8.82% dari capaian mutu tahun 2016. Kenaikan tertinggi terjadi pada standar pembiayaan (5.61) sebesar 29.89%. Sebaliknya, standar sarana dan prasarana pendidikan (4.18) mengalami kenaikan paling rendah, yaitu sebesar 1.27%. Tiga standar yang lain justru mengalami penurunan. Persentase penurunan paling tinggi terjadi pada standar PTK (3.66) sebesar 15.04%. Bahkan, standar ini hanya sampai kategori “menuju SNP 2”. Standar PTK menjadi satu-satunya standar yang dalam tiga tahun pemetaan belum pernah melampaui kategori “menuju SNP 3”. Penurunan capaian standar PTK diiringi dengan turunnya capaian standar yang sangat dipengaruhi oleh standar PTK, yaitu kompetensi lulusan (6.07) sebesar 2.18% dan standar isi (5.31) sebesar 1.47%.

Capaian mutu sekolah model jenjang SMA tahun 2018 hanya naik 3% dari capaian tahun 2017. Meskipun persentase kenaikan hanya sedikit, ada 7 standar yang memiliki capaian pada kategori “menuju SNP 4” dan hanya satu standar masuk kategori “menuju SNP 3”. Kenaikan paling tinggi terjadi pada standar sarana dan prasarana pendidikan (5.27) sebesar 25.99%. Nilai capaian pada standar ini melebihi capaian NTB. Lihat grafik sebelah kanan pada Gambar 15. Walaupun capaian mutu standar penilaian pendidikan (5.82) meningkat, persentase peningkatan hanya sebesar 1.70%. Kenaikan yang rendah juga terjadi pada standar PTK (3.80) sebesar 3.83%. Nilai capaian PTK ini tergolong sangat rendah karena masuk kategori “menuju SNP 3”. Nilai capaian PTK yang rendah ini juga terjadi pada capaian pada tingkat provinsi NTB. Pada Gambar 15 bagian kanan tampak grafik PTK untuk NTB (grafik warna hijau) sedikit berada di dalam grafik PTK sekolah model (grafik berwarna biru).

Rendahnya capaian mutu standar PTK tentu memengaruhi standar-standar yang lain yang berhubungan dengan standar PTK. Standar PTK memiliki hubungan yang sangat erat dengan standar proses, standar isi, standar penilaian pendidikan, dan standar kompetensi lulusan. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor penting terpenuhinya proses pembelajaran yang baik dan sesuai standar. Terselenggaranya proses pembelajaran yang baik tentu tidak terlepas dari kemampuan PTK dalam merancang perangkat pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang disyaratkan. Jika diperhatikan,

standar isi (5.24) turun 1.35% dan standar proses (6.32) turun 0.90%, dan standar pengelolaan pendidikan (5.13) turun 10.86%. Nilai capaian standar penilaian pendidikan (5.86) meskipun mengalami kenaikan, tetapi persentase kenaikannya sangat rendah, hanya 0.24%.

E. Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SMK

Sebagai catatan awal bahwa berdasarkan data distribusi sekolah model pada Gambar 10, ada 24 sekolah model jenjang SMK. Namun, ada satu sekolah model (SMKN 1 Sambelia) dalam 3 tahun pemetaan tidak memiliki peta mutu atau peta mutunya belum keluar. Untuk itu, dalam laporan ini sekolah tersebut dikeluarkan dari pengolahan dan analisis data. Selanjutnya, berdasarkan data pada Tabel 17, tahun 2016, ada 8 sekolah yang capaian mutunya masuk kategori “menuju SNP 1”. Kedelapan sekolah ini setelah ditelusuri dalam progres pengiriman data PMP ternyata tidak mengirim data PMP karena tidak melakukan pemetaan. Untuk selanjutnya, kedelapan sekolah ini dikeluarkan dalam perhitungan mencari rata-rata capaian mutu tahun 2016. Jadi, rata-rata capaian mutu sekolah model jenjang SMK tahun 2016 hanya didasarkan pada 15 sekolah model.

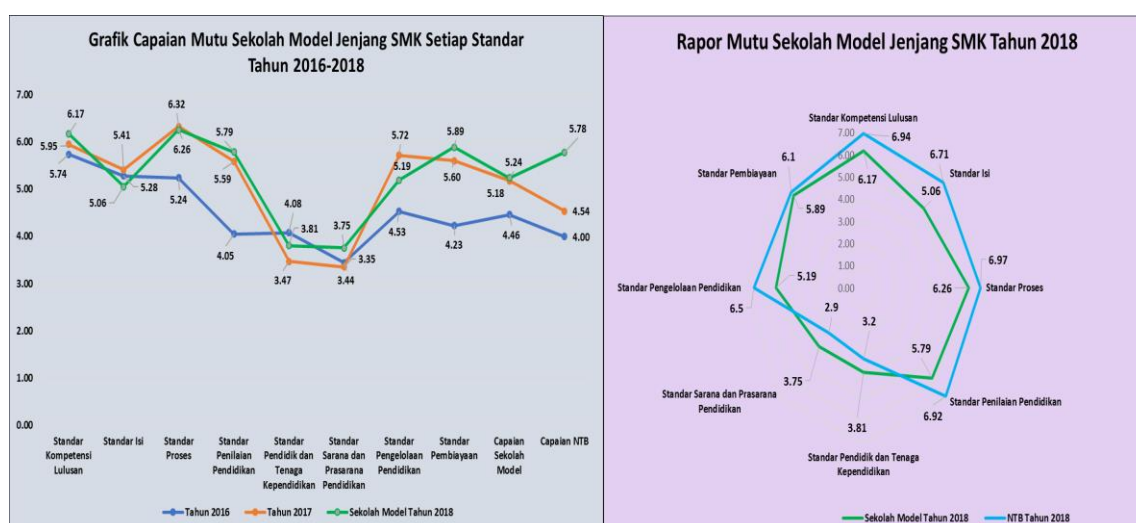
Tabel 17 Distribusi Sekolah Model Jenjang SMK Berdasarkan Capaian Mutu Tahun 2016 – 2018

Kategori	Jumlah Sekolah		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Menuju SNP 1	8	2	0
Menuju SNP 2	1	0	0
Menuju SNP 3	13	8	5
Menuju SNP 4	1	13	18
SNP	0	0	0
Jumlah	23	23	23

Secara umum, jumlah sekolah model jenjang SMK yang mengalami kenaikan capaian SNP semakin banyak pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2018, tidak ada sekolah yang memiliki capaian SNP di bawah kategori “menuju SNP 3”. Jumlah ini turun drastis dari jumlah pada tahun 2016 dan 2017. Artinya, delapan sekolah yang tidak mengirim data PMP tahun 2016 telah mengirim data PMP pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2017 masih ada dua sekolah yang tidak mengirim atau tidak diproses oleh server datanya. Jumlah sekolah pada kategori “menuju SNP 3” pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan masing-masing 38.46% dan 61.54% dari tahun 2016.

Kenaikan sangat drastis terjadi pada jumlah sekolah model dengan kategori “menuju SNP 4”. Pada tahun 2016, hanya ada satu sekolah model yang mendapatkan kategori “menuju SNP 4”. Jumlah ini meningkat tajam mencapai 120% pada tahun 2017 dan 160% pada tahun 2018. Hal tersebut tidak mengagetkan karena tahun 2016 adalah tahun pertama dilakukan pemetaan dimana kendala dalam proses pengumpulan data sangat banyak. Seiring waktu, kendala-kendala yang terjadi pada tahun 2016 diperbaiki dan disempurnakan pada tahun 2017 dan 2018. Namun demikian, sama seperti sekolah model jenjang SD, SMP, dan SMA, belum ada satupun sekolah model yang masuk kategori “SNP”.

Gambar 16 bagian kiri merupakan grafik progres capaian mutu sekolah model jenjang SMK dalam tiga tahun, tahun 2016 – 2018. Jika dicermati berdasarkan capaian pada setiap standar, standar PTK dan standar sarpras pendidikan yang menjadi penyumbang paling besar terhadap belum maksimalnya capaian mutu sekolah model. Hal ini terjadi selama 3 tahun pelaksanaan pemetaan mutu. Delapan standar nasional pendidikan merupakan standar yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk itu, jika ada standar yang memiliki nilai yang disparitasnya terlalu tinggi maka perlu ada kecurigaan terhadap data tersebut. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dan sebagaimana data yang ditampilkan pada Tabel 1, sumber data dari standar PTK dan standar sarpras pendidikan adalah isian dapodik. Ada 68 pertanyaan untuk standar PTK dan semuanya ditanyakan melalui format isian dapodik dan 208 dari 257 butir pertanyaan untuk sarpras pendidikan ditanyakan melalui dapodik. Oleh karena itu, untuk memastikan kebenaran data kedua standar ini, perlu dilakukan pemeriksaan tentang validitas data yang diisi.



Gambar 16 Grafik Capaian Mutu Sekolah Model Jenjang SMK Tahun 2016 – 2018

Secara umum, capaian mutu sekolah model jenjang SMK mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan paling besar terjadi dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 13.23%. Kenaikan pada tahun 2018 hanya sebesar 1.20% dari tahun 2017. Jika dibandingkan dengan capaian NTB selama tiga tahun, capaian mutu sekolah model jenjang SMK lebih rendah dari capaian mutu NTB terjadi pada tahun 2018. Capaian dua tahun sebelumnya selalu lebih tinggi. Pada tahun 2016, hanya tiga standar yang masuk dalam kategori “mencapai SNP 4”, yaitu standar kompetensi lulusan (5.74), standar isi (5.28), dan standar proses (5.24). Lima standar yang lain masuk kategori “menuju SNP 3”. Hal ini menyebabkan capaian mutu sekolah model jenjang SMK pada tahun 2016 juga hanya sampai kategori “menuju SNP 3”. Hasil ini lebih tinggi sedikit dari capaian mutu Provinsi NTB pada tahun yang sama. Hasil ini sejalan dengan data pada Tabel 17, mayoritas sekolah model capaian mutunya di bawah “menuju SNP 4”. Hanya satu sekolah model yang mencapai kategori “menuju SNP 4”.

Pada tahun 2017, capaian 6 standar mengalami kenaikan meskipun kenaikannya mayoritas belum bisa mengangkat ke kategori yang lebih tinggi. Kenaikan capaian sekolah model jenjang SMK mencapai 13.23% dari tahun 2016. Bahkan, capaian ini jauh melebihi capaian NTB yang hanya pada kategori “menuju SNP 3” dengan nilai capaian sebesar 4.54. Dari grafik ini tampak bahwa 6 standar masuk dalam kategori “menuju SNP 4”, yakni standar kompetensi lulusan (5.95), standar penilaian pendidikan (5.59), dan standar pembiayaan (5.60). Tiga standar yang lain yaitu standar isi (5.41), standar proses (6.32), dan standar pengelolaan pendidikan (5.72) memiliki nilai paling tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2016 dan 2018. Lagi, standar PTK dan standar sarpras pendidikan menempati posisi paling bawah sehingga menyebabkan grafik turun sangat curam. Bahkan, capaian kedua standar ini terendah selama tiga tahun pemetaan dan hanya “menuju SNP 2”.

Perkembangan capaian mutu pada tahun 2018 relatif sama dengan capaian mutu tahun 2017. Selisih nilai masing-masing standar sangat kecil. Kenaikan capaian hanya 1.20% dari tahun 2017. Ada 3 standar yang mengalami kenaikan pencapaian dibandingkan capaian tahun 2017 dengan nilai capaian cukup tinggi, yaitu standar pembiayaan (5.89), standar penilaian pendidikan (5.79), dan standar kompetensi lulusan (6.17). Dua standar yang lain juga mengalami kenaikan, tetapi nilai capaiannya sangat rendah dan masuk kategori “menuju SNP 3”. Kedua standar itu adalah standar sarana prasarana pendidikan (3.75) dan standar PTK (3.81). Meskipun nilai standar PTK lebih tinggi dari capaian tahun 2017, nilai ini masih lebih rendah dari capaian tahun 2016.

Nilai capaian mutu tahun 2018 juga lebih rendah dari capaian wilayah NTB pada tahun yang sama. Grafik diagram laba-laba pada Gambar 16 di sebelah kanan menggambarkan capaian mutu setiap standar pada tahun 2018 yang disandingkan dengan capaian mutu Provinsi NTB pada jenjang SMK. Jika diperhatikan, grafik dengan garis warna hijau (grafik capaian sekolah model) hampir semuanya berada di dalam grafik yang berwarna biru (grafik capaian NTB). Artinya, nilai capaian standar sekolah model lebih rendah dari capaian NTB. Hanya dua standar yang titik sudut grafik capaian mutu sekolah model yang berada di luar titik grafik capaian NTB, yaitu standar sarana dan prasarana pendidikan serta standar PTK.

F. Indeks Efektivitas Penjaminan Mutu Pendidikan (IE)

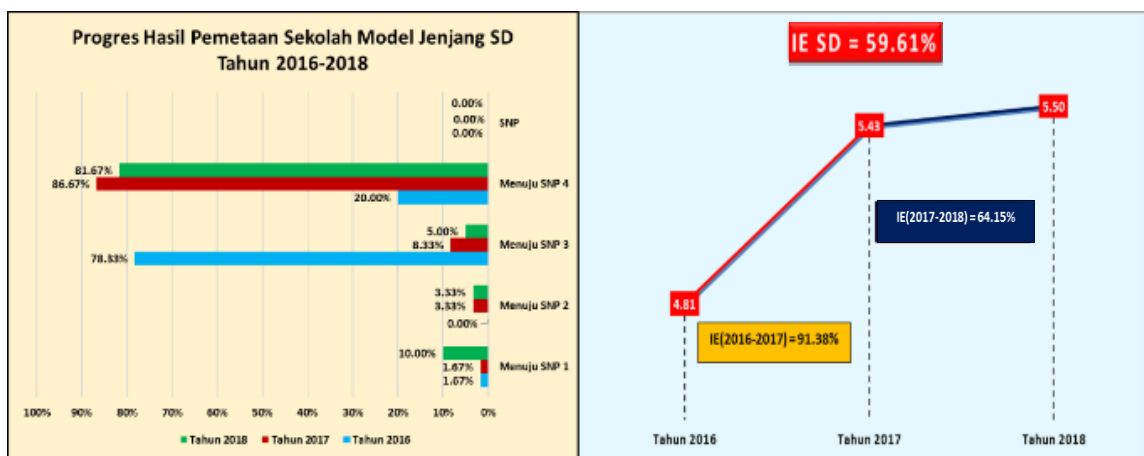
Di atas telah dipaparkan bahwa hasil pemetaan yang dilakukan selama tiga tahun menunjukkan perkembangan yang positif. Secara kuantitatif jumlah sekolah yang mengalami kenaikan capaian terus bertambah dalam dua tahun terakhir. Saat kali pertama dilakukan pemetaan pada tahun 2016, hasil pemetaan mayoritas pada level “menuju SNP 3” pada semua jenjang. Pada pemetaan tahun 2017 dan tahun 2018, terjadi penurunan jumlah sekolah yang memiliki capaian mutu di bawah kategori “menuju SNP 3”. Penurunan ini diiringi dengan kenaikan jumlah sekolah yang memiliki capaian mutu dalam kategori “menuju SNP 4”, baik hasil pemetaan untuk sekolah model atau hasil pemetaan pada tingkat NTB pada semua jenjang. Distribusi sekolah berdasarkan capaian mutu tersebut dapat dilihat pada Tabel 8, 10, 12, dan 14 untuk tingkat Provinsi NTB, sedangkan untuk sekolah model dapat dilihat pada Tabel 16 – 19.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, khususnya di sekolah model akan digunakan ukuran Indeks Efektivitas (IE). IE yang akan dihitung dalam laporan ini adalah IE untuk sekolah model. IE adalah perbandingan jumlah sekolah model yang mengalami kenaikan capaian mutu terhadap total sekolah model yang memiliki rapor mutu pada rentang waktu pemetaan tertentu. IE dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi, ada tiga IE pada setiap jenjang. IE pertama, selanjutnya ditulis IE (2016-2017), digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas penjaminan mutu pendidikan pada tahun 2016 – 2017. IE kedua, selanjutnya ditulis IE (2017-2018), digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas penjaminan mutu pendidikan pada tahun 2017 – 2018. IE ketiga, selanjutnya hanya ditulis IE, digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penjaminan mutu pendidikan pada rentang tahun 2016 – 2018.

Perhitungan IE didasarkan pada rata-rata capaian setiap sekolah model. Sekolah model yang rapor mutunya tidak keluar dikeluarkan dari perhitungan. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, sumber data rapor mutu adalah dapodik dan instrumen PMP. Jika salah satu dari sumber itu pada suatu sekolah model tidak lengkap, rapor mutu dari sekolah model tersebut dinyatakan tidak lengkap. Jika ada sekolah model yang mengalami hal tersebut, sekolah itu tidak akan dimasukkan dalam perhitungan. Sekolah model dikeluarkan dari perhitungan hanya berlaku pada rentang tahun dilakukannya perhitungan IE. Contoh, suatu sekolah model pada tahun 2016 tidak keluar peta mutunya, tetapi pada tahun 2017 dan 2018 rapor mutu sekolah itu keluar. Sekolah model tersebut tidak akan dilibatkan dalam perhitungan IE (2016-2017) dan IE (2016-2018). Namun, sekolah dimaksud akan dimasukkan dalam perhitungan untuk mencari IE (2017-2018). Sekolah-sekolah yang dikeluarkan dari perhitungan IE pada Lampiran 6 – 13 ditandai dengan warna kolom oranye.

a. IE Sekolah Model Jenjang SD

Jumlah sekolah model jenjang SD sebanyak 60 sekolah. Sebanyak dua sekolah tidak dilibatkan dalam mencari IE karena masing-masing satu sekolah tidak keluar peta mutunya pada tahun 2016 dan tahun 2017. Berdasarkan grafik sebelah kanan pada Gambar 17, IE-SD (2016-2017) sebesar 91.38%. Pada kasus ini, berdasarkan data pada Lampiran 6, kolom “Progres” dan subkolom “2016-2017”, jumlah sekolah model yang mengalami kenaikan capaian mutu sebanyak 53 sekolah dan 5 sekolah dengan capaian mutu menurun. Sekolah yang mengalami kenaikan capaian mutu ditandai dengan kata “naik” dan sekolah yang menurun capaian mutunya ditandai dengan kata “turun” pada subkolom “2016-2017”.



Gambar 17 Indeks Efektivitas PMP Sekolah Model Jenjang SD

Jika dicermati lebih jauh, selain nilai IE-SD (2016 -2017) yang sangat tinggi, grafik IE-SD (2016-2017) memiliki kemiringan yang sangat curam. Kemiringan yang tajam ini menunjukkan bahwa kenaikan nilai capaian mutu yang dialami oleh sekolah model menyebabkan sekolah model tersebut berubah kategori capaian mutunya, naik ke level yang lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh capaian mutu sekolah model jenjang SD tahun 2016 sebesar 4.81 (menuju SNP 3) dan capaian mutu tahun 2017 sebesar 5.43 dengan kategori meningkat satu level “menuju SNP 4”. Grafik sebelah kiri pada Gambar 17 menunjukkan persentase sekolah yang memiliki capaian di bawah “menuju SNP 4” semakin menurun pada tahun 2017. Pada tahun 2016, terdapat 78.33% sekolah dengan capaian “menuju SNP 3”. Persentase turun drastis pada tahun 2017 menjadi hanya 8.33%. Sebaliknya, persentase sekolah dengan kategori “menuju SNP 4” naik dari 20.00% menjadi 86.67%.

IE-SD (2017-2018) tercatat sebesar 64.15%. Efektivitas penjaminan mutu pendidikan turun sekitar 27% dari IE-SD (2016-2017). Jika ditelusuri data pada Lampiran 6 dan 7, ada 7 sekolah sekolah model yang tidak memiliki peta mutu pada tahun 2017 dan 2018. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan jumlah sekolah model yang memiliki peta mutu pada rentang 2016 dan 2017. Oleh karena itu, untuk menghitung IE-SD (2017-2018) hanya melibatkan sebanyak 53 sekolah model. Dari 53 sekolah model yang memiliki peta mutu, sebanyak 34 sekolah yang mengalami kenaikan capaian mutu dan 19 sekolah mengalami penurunan capaian. Jika dilihat pada Gambar 17 bagian kiri, penurunan sebesar 5% terjadi pada kategori “menuju SNP 4”.

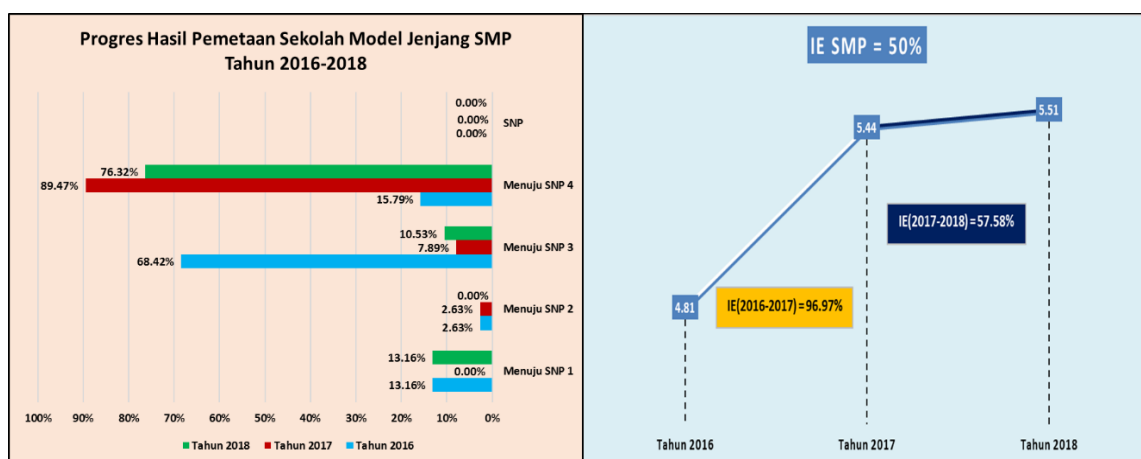
Ada beberapa argumen yang bisa dimunculkan untuk menjelaskan penyebab IE-SD (2017-2018) turun. *Pertama*, aplikasi PMP yang sering mengalami pembaharuan. *Kedua*, beberapa sekolah model yang telah mengirim data PMP, tetapi rapor mutunya tidak keluar karena gagal diproses server pusat. *Ketiga*, ada kejadian gempa yang melanda beberapa kabupaten sehingga menyebabkan sekolah tidak mengirim data PMP karena fokus penanganan pascagempa. *Keempat*, ada sekolah yang masih kurang peduli terhadap pentingnya pemetaan internal sehingga pengisian instrumen PMP dilakukan tanpa memerhatikan kondisi riil sekolah.

Secara umum, dalam tiga tahun pemetaan, efektivitas penjaminan mutu pendidikan sebesar 59.61%. Hasil ini diperoleh dari perhitungan yang melibatkan 52 sekolah model jenjang SD yang memiliki rapor mutu. IE SD sebesar 59.61% memiliki makna bahwa dari 52 sekolah model jenjang SD, 31 sekolah diantaranya konsisten menunjukkan kenaikan

capaian mutu selama tiga tahun. Hal ini berarti bahwa program penjaminan mutu pendidikan yang telah dilaksanakan oleh sekolah model melalui pendampingan LPMP NTB memiliki dampak positif. Sekolah-sekolah tersebut terus melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahun sebelumnya. Data sekolah tersebut terdapat pada Lampiran 6, kolom “progres” dan subkolom “2016-2018”. Sekolah yang konsisten mengalami kenaikan capaian mutu ditandai dengan kata “naik” dan sekolah yang fluktuatif capaian mutunya ditandai dengan kata “turun” pada subkolom “2016-2018”.

b. IE Sekolah Model Jenjang SMP

Grafik pada Gambar 18 menunjukkan bagaimana efektivitas penjaminan mutu pendidikan di sekolah model jenjang SMP. Berdasarkan informasi pada grafik sebelah kanan Gambar 18, IE-SMP (2016-2017) tercatat sebesar 96.97%. Perhitungan IE-SMP (2016-2017) ini didasarkan pada 33 sekolah model jenjang SMP karena pada tahun 2016 ada lima sekolah model yang tidak memiliki rapor mutu. Daftar lima sekolah model tersebut dapat dilihat pada Lampiran 8 dengan mencermati kolom ”Capaian SNP” pada subkolom “Tahun 2016” yang diberi warna oranye atau pada kolom “Kategori” dengan subkolom “Tahun 2016” dengan kategori M1.



Gambar 18 Indeks Efektivitas PMP Sekolah Model Jenjang SMP

Nilai IE-SMP (2016-2017) sebesar 96.97% merupakan nilai yang sangat tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di sekolah model jenjang SMP berdampak sangat positif. Ada 32 sekolah model dari 33 sekolah model yang memiliki nilai capaian mutu pada tahun 2017 yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil

pada tahun 2016. Data sekolah tersebut terdapat pada Lampiran 8, kolom “progres” dan subkolom “2016-2017”. Sekolah yang mengalami kenaikan capaian mutu ditandai dengan kata “naik” dan sekolah yang turun capaian mutunya ditandai dengan kata “turun” pada subkolom “2016-2017”.

Grafik IE-SMP (2016-2017) memiliki kemiringan yang sangat curam. Penyebabnya adalah kenaikan nilai capaian mutu yang tinggi sehingga mengakibatkan perubahan kategori capaian mutu. Capaian mutu sekolah model jenjang SMP tahun 2016 sebesar 4.81 (menuju SNP 3) dan capaian mutu tahun 2017 sebesar 5.44 dengan kategori meningkat satu level “menuju SNP 4”. Jika diperhatikan grafik sebelah kiri pada Gambar 18, perubahan terjadi pada tiga kategori, yaitu kategori “menuju SNP 1”, kategori “menuju SNP 3”, dan kategori “menuju SNP 4”. Pada kategori “menuju SNP 1”, tahun 2016 terdapat 13.16% sekolah pada capaian ini dan kategori tersebut tidak ada pada tahun 2017. Perubahan drastis terjadi pada kategori “menuju SNP 3”, yaitu persentase sekolah pada kategori ini tahun 2017 turun tajam menjadi 7.89% dibandingkan jumlah pada tahun 2016 sebesar 68.42%. Pada kategori “menuju SNP 4”, persentase sekolah dengan capaian ini melonjak tinggi, dari 15.79% pada tahun 2016 menjadi 89.47% pada tahun 2017.

Sebagaimana terjadi di jenjang SD, IE-SMP (2017-2018) mengalami penurunan yang sangat tinggi. IE-SMP (2017-2018) hanya sebesar 57.58%. Perhitungan IE-SMP (2017-2018) juga didasarkan pada 33 sekolah karena 5 sekolah model tidak memiliki rapor mutu pada tahun 2018. Data kelima sekolah model tersebut terdapat pada Lampiran 8 pada kolom “capaian SNP” dan subkolom “Tahun 2018” yang diberi warna oranye. Untuk itu, kelima sekolah tersebut dikeluarkan dari perhitungan IE-SMP (2017-2018) dan IE SMP. Dari 33 sekolah model yang memiliki rapor mutu, 19 sekolah menunjukkan capaian dengan tren naik. Nama-nama sekolah tersebut dapat dilihat pada Lampiran 8, kolom “Progres” dan subkolom “2017-2018”. Jika dilihat pada Gambar 18 sebelah kiri, terjadi penurunan jumlah sekolah dengan capaian pada kategori “menuju SNP 4” pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Namun, jumlah sekolah pada kategori “menuju SNP 3” pada tahun 2018 mengalami kenaikan.

Secara umum, dalam tiga tahun pemetaan, efektivitas penjaminan mutu pendidikan di sekolah model jenjang SMP sebesar 50%. Hasil ini diperoleh dari perhitungan yang melibatkan 28 sekolah model jenjang SMP yang memiliki rapor mutu. Sepuluh sekolah model tidak dilibatkan dalam perhitungan karena sekolah-sekolah tersebut tidak keluar

peta mutunya. Masing-masing 5 sekolah pada tahun 2016 dan 5 sekolah pada tahun 2018. IE SMP sebesar 50% memiliki makna bahwa hanya 14 sekolah model jenjang SMP dari 28 sekolah model jenjang SMP konsisten menunjukkan kenaikan capaian mutu selama tiga tahun. Data kedua puluh delapan sekolah tersebut terdapat pada Lampiran 8, kolom “Progres” dan subkolom “2016-2018”. Sekolah yang mengalami kenaikan capaian mutu secara terus menerus selama tiga tahun ditandai dengan kata “naik” dan sekolah yang naik turun capaian mutunya ditandai dengan kata “turun”.

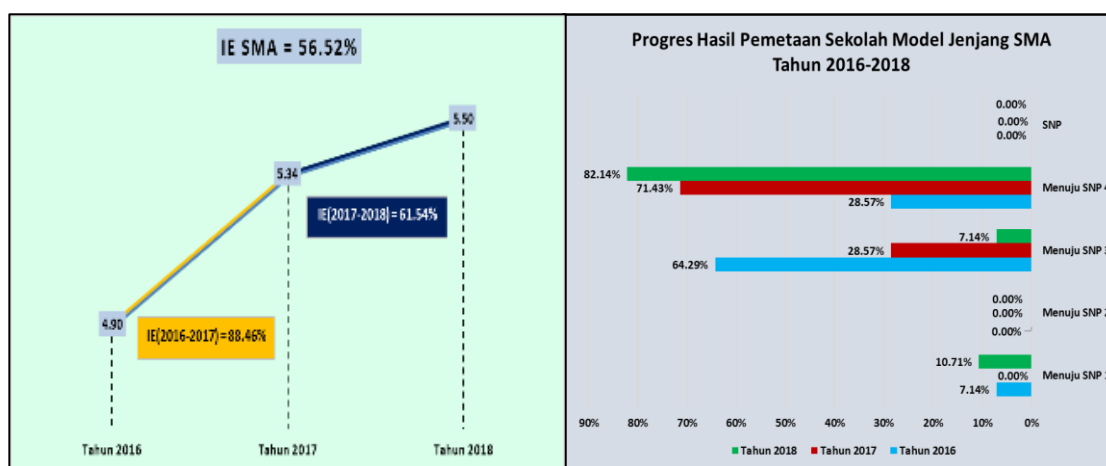
Rendahnya IE SMP disebabkan beberapa alasan. *Pertama*, aplikasi PMP yang sering mengalami pembaharuan. *Kedua*, beberapa sekolah model yang telah mengirim data PMP tetapi rapor mutunya tidak keluar karena gagal diproses server pusat. *Ketiga*, ada kejadian gempa yang melanda beberapa kabupaten sehingga menyebabkan sekolah tidak mengirim data PMP karena fokus penanganan pascagempa. *Keempat*, ada sekolah yang masih kurang peduli terhadap pentingnya pemetaan internal sehingga pengisian instrumen PMP dilakukan tanpa memerhatikan kondisi riil sekolah. IE SMP yang rendah ini menunjukkan bahwa dampak penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah model belum maksimal. Jikapun ada sekolah yang mengalami tren positif jumlahnya sedikit.

c. IE Sekolah Model Jenjang SMA

Ada 28 sekolah model jenjang SMA. Pada tahun 2016, ada dua sekolah yang tidak mengirim data PMP sehingga rapor mutunya tidak ada. Data dapat dilihat pada Lampiran 10, kolom “Capaian SNP” dan subkolom “Tahun 2016”. Dua sekolah ini meskipun memiliki rapor mutu pada tahun 2017 tidak dimasukkan dalam perhitungan IE-SMA (2016-2017) dan IE SMA. Gambar 19 menunjukkan indeks efektivitas penjaminan mutu pendidikan di sekolah model pada jenjang SMA tahun 2016 – 2018. Berdasarkan grafik sebelah kiri pada Gambar 19 tersebut tampak bahwa IE-SMA (2016-2017) sebesar 88,46%. Artinya, mayoritas sekolah model jenjang SMA mengalami kenaikan capaian mutu pada tahun 2017 dibandingkan capaian mutu pada tahun 2016. Lampiran 10, kolom “Progres” dan subkolom “2016-2017”, memberikan data bahwa dari 26 sekolah model, ada 3 sekolah model jenjang SMA yang mengalami penurunan capaian mutu pada tahun 2017 dibandingkan dengan hasil pada tahun 2016.

Grafik IE-SMA (2016-2017) memiliki gradien yang sangat curam. Hal ini disebabkan kenaikan nilai capaian mutu diiringi dengan perubahan kategori capaian mutu. Hal ini ditunjukkan oleh capaian mutu sekolah model jenjang SMA tahun 2016 sebesar 4.90 (menuju

SNP 3) dan capaian mutu tahun 2017 sebesar 5.34 dengan kategori meningkat satu level “menuju SNP 4”. Data pada grafik bagian kanan Gambar 19 menjelaskan bahwa capaian mutu kategori “menuju SNP 1” tidak muncul lagi pada tahun 2017. Sementara itu, persentase sekolah dengan capaian “menuju SNP 3” pada tahun 2016 sebesar 64.29% turun drastis menjadi 28.57% pada tahun 2017. Penurunan jumlah sekolah dengan capaian “menuju SNP 3” pada tahun 2017 diiringi dengan meningkatnya capaian “menuju SNP 4”. Capaian “menuju SNP 4” pada tahun 2016 sebesar 28.57% meningkat tajam menjadi 71.43% pada tahun 2017. Hal ini bermakna bahwa program penjaminan mutu pendidikan pada tahun 2017 berhasil memberikan dampak yang positif bagi satuan pendidikan dalam memenuhi 8 SNP.



Gambar 19 Indeks Efektivitas PMP Sekolah Model Jenjang SMA

Pada pemetaan tahun 2018, ada 3 sekolah model yang tidak keluar peta mutunya. Ketiga sekolah tersebut telah mengirim data PMP tetapi gagal diproses oleh server PMP. Data ketiga sekolah model itu dapat dilihat pada Lampiran 10, kolom “Capaian SNP” dan subkolom “Tahun 2018” yang berwarna oranye. Selanjutnya, ketiga sekolah itu tidak dilibatkan dalam perhitungan IE-SMA (2017-2018) dan IE SMA. Berdasarkan informasi pada grafik sebelah kiri pada Gambar 19, IE-SMA (2017-2018) sebesar 61.54%. Nilai ini turun hampir 27% dari IE-SMA (2016-2017). Data pada Lampiran 10, kolom “Progres 2017-2018”, menunjukkan 9 sekolah mengalami penurunan nilai capaian pada tahun 2018, lebih banyak 6 sekolah dibandingkan tahun 2017.

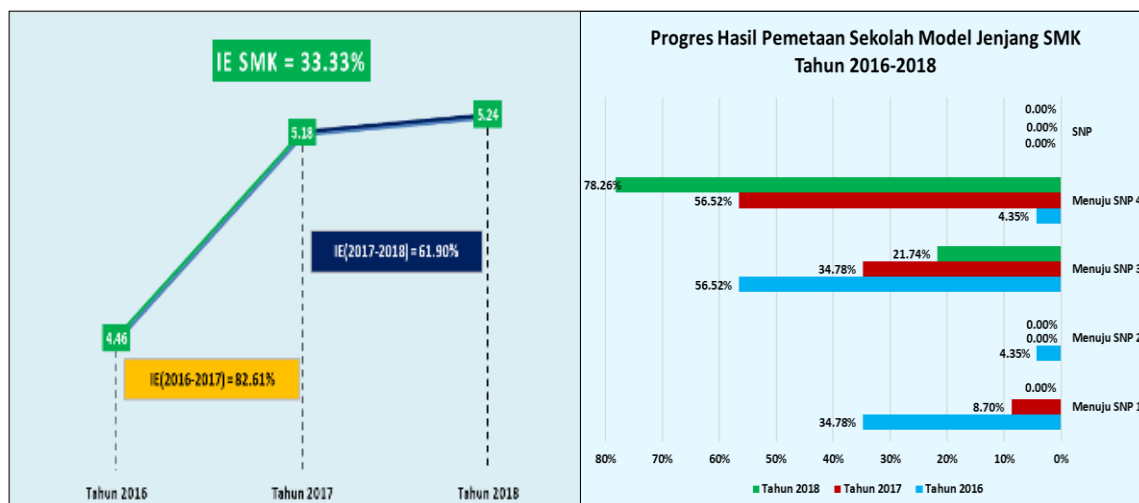
Progres pada Gambar 19 sebelah kanan sepintas bertolak belakang dengan nilai IE (2017-2018) yang mengalami penurunan. Secara kuantitas jumlah sekolah pada kategori “menuju SNP 3” pada tahun 2018 turun dibandingkan tahun 2017. Begitupula dengan jumlah sekolah

dengan kategori “menuju SNP 4” meningkat pada tahun 2018 dibandingkan jumlah pada tahun 2017. Pengukuran IE tidak hanya berdasarkan perubahan nilai capaian yang menyebabkan perpindahan kategori tetapi juga memerhatikan perubahan nilai capaian pada kategori yang sama. Misalnya, suatu sekolah pada tahun 2017 memiliki capaian 5.93 dan nilai capaian pada tahun 2018 sebesar 5.54. Kedua nilai ini masuk pada kategori yang sama, yaitu “menuju SNP 4”. Namun, nilai capaian sekolah tersebut mengalami penurunan. Penurunan nilai capaian pada kategori yang sama inilah yang juga dipotret oleh IE. Data pada Lampiran 10 menunjukkan bahwa dari 9 sekolah yang mengalami penurunan nilai capaian, 8 sekolah mengalami penurunan nilai capaian meskipun tetap pada kategori yang sama. Penurunan nilai capaian tersebut tidak menyebabkan perubahan kategori ke level yang lebih rendah.

Jika dicermati data pada Lampiran 10 kolom “Capaian SNP” tahun 2016 dan tahun 2018, ada 5 sekolah model jenjang SMA yang berwarna oranye. Artinya, kelima sekolah tersebut tidak memiliki rapor mutu sehingga tidak dilibatkan dalam perhitungan mencari IE SMA. IE SMA dihitung dari capaian mutu 23 sekolah model SMA. Grafik bagian kiri Gambar 19 menunjukkan bahwa IE SMA kurang dari 60%. Rendahnya IE SMA disebabkan oleh banyaknya sekolah yang mengalami penurunan capaian mutu pada tahun 2018 ditambah 5 sekolah yang tidak memiliki peta mutu. Hanya 13 sekolah yang menunjukkan konsistensi perbaikan SNP selama tiga tahun pemetaan. Sisanya mengalami fluktuasi nilai capaian. Lihat data pada Lampiran 10, kolom “progres 2016-2018”. Ada sekolah pada tahun 2017 meningkat nilai capaian mutunya tetapi pada tahun 2018 turun. Begitupula sebaliknya. Beberapa alasan lain penyebab rendahnya IE telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

d. IE Sekolah Model Jenjang SMK

Jika dibandingkan dengan IE pada tiga jenjang yang lain, IE SMK paling rendah. Hanya sebesar 33.33%. Artinya, hanya sepertiga sekolah model jenjang SMK yang konsisten menunjukkan peningkatan capaian mutu selama tiga tahun. Dua pertiga yang lain mengalami fluktuasi. Dari 15 sekolah yang dilibatkan dalam perhitungan IE SMK, hanya 5 sekolah yang konsisten menunjukkan tren perubahan capaian SNP yang positif. Data sekolah yang mengalami kenaikan secara konsisten selama tiga tahun dan data sekolah yang nilai capaian mutunya fluktuatif dapat dilihat pada Lampiran 12, kolom “progres 2016-2018”. Rendahnya IE SMK disebabkan banyaknya sekolah model jenjang SMK yang tidak mengirim data PMP pada tahun 2016. Ada 9 sekolah yang tidak memiliki peta mutu tahun 2016 sehingga jumlah sekolah yang dimasukkan dalam perhitungan IE 15 sekolah. Gambar 20 menunjukkan bagaimana IE penjaminan mutu pendidikan di sekolah model jenjang SMK selama 3 tahun.



Gambar 20 Indeks Efektivitas PMP Sekolah Model Jenjang SMK

Pada tahun 2017, capaian mutu sekolah model jenjang SMK sebesar 5.18 dengan kategori “menuju SNP 4”. Nilai ini meningkat satu level lebih tinggi dari capaian mutu pada tahun 2016 yang berada pada kategori “menuju SNP 3” dengan nilai 4.46. Perubahan kategori capaian mutu yang naik satu level menyebabkan grafik IE-SMK (2016-2017) memiliki kecuraman yang sangat tajam. Nilai IE-SMK (2016-2017) sebesar 82.61%. Mayoritas sekolah model mengalami kenaikan capaian mutu pada pemetaan tahun 2017.

Jika dicermati lebih jauh, pada tahun 2017, grafik sebelah kanan pada Gambar 201 menunjukkan bahwa jumlah sekolah pada kategori “menuju SNP 1” berkurang sampai 26% dari tahun 2016. Hal yang sama terjadi pada kategori “menuju SNP 2” dan kategori “menuju SNP 3”. Penurunan persentase sekolah dengan kategori di bawah “menuju SNP 4” diiringi dengan peningkatan persentase sekolah pada kategori “menuju SNP 4”. Persentase sekolah dengan kategori “menuju SNP 4” meningkat drastis pada tahun 2017 dibandingkan persentase pada tahun 2016. Peningkatan sampai 52%. Salah satu penyebabnya adalah sekolah yang tidak mengirim data PMP pada tahun 2016 mengisi data PMP dan capaian mutunya pada kategori “menuju SNP 4”. Banyaknya sekolah yang mengalami perpindahan kategori ke level yang lebih tinggi menunjukkan efektivitas penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh sekolah model di bawah pendampingan LPMP NTB cukup tinggi.

Grafik IE-SMK (2017-2018) relatif landai dibandingkan dengan grafik IE-SMK (2016-2017). Nilai IE-SMK (2017-2018) hanya sebesar 61.90%. Data pada Lampiran 12, kolom “Progres 2017-2018” menunjukkan bahwa ada 8 sekolah yang mengalami penurunan

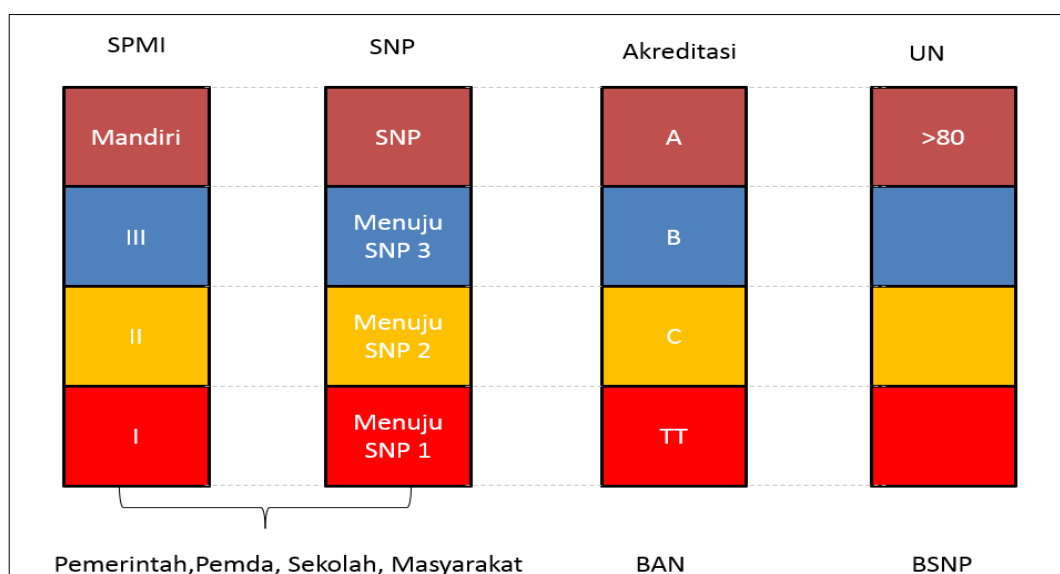
capaian mutu pada tahun 2018. Meskipun 14 sekolah mengalami kenaikan capaian mutu, kenaikan nilai capaian tersebut tidak banyak menyebabkan perpindahan kategori sekolah ke level yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai capaian sekolah model jenjang SMK pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang relatif konstan. Selisihnya hanya 6%. Kenaikan yang terjadi cenderung dalam bentuk kenaikan nilai capaian pada rentang yang sama. Secara kuantitatif, persentase sekolah pada kategori “menuju SNP 4” bertambah meskipun tidak setajam peningkatan pada tahun 2017. Sekolah pada kategori “menuju SNP 1” tidak muncul lagi dan persentase sekolah dengan capaian “menuju kategori SNP 3” tidak berkurang banyak.

G. Komparasi Hasil Pemetaan dengan Hasil Akreditasi oleh BAN-S/M

Bagian ini akan memaparkan bagaimana hasil peta mutu yang diperoleh dari penilaian diri sekolah secara internal akan disandingkan dengan hasil peta mutu melalui penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu eksternal merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standardisasi pendidikan, dalam rangka implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan khususnya pemenuhan 8 SNP. Salah satu pihak eksternal yang melakukan penjaminan mutu pendidikan adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Akreditasi sekolah yang dilakukan oleh BAN-S/M merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan. Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu satuan pendidikan yang berkelanjutan, serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan.

Pada dasarnya penjaminan mutu pendidikan baik yang dilaksanakan secara internal oleh satuan pendidikan maupun pihak eksternal bertujuan untuk mengetahui apakah satuan pendidikan atau program telah memenuhi atau melampaui SNP. Jadi, keduanya mengukur hal yang sama, yaitu sejauh mana suatu satuan pendidikan telah memenuhi SNP. SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas satuan pendidikan. Oleh karena itu, alat ukur penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun secara eksternal dikembangkan mengacu pada SNP. Hasil penjaminan mutu pendidikan melalui kedua cara ini adalah tersedianya peta mutu pendidikan berdasarkan SNP. Acuan yang sama dalam pengembangan alat ukur

penjaminan mutu pendidikan tersebut mengisyaratkan bahwa jika seluruh proses dilakukan dengan baik dan benar maka hasil penjaminan mutu pendidikan menunjukkan hasil yang konsisten. Artinya, jika penilaian pada suatu standar secara internal oleh sekolah yang dilakukan dengan jujur hasilnya “baik” maka hasil penilaian oleh pihak luar yang juga dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku hasilnya seharusnya sejalan. Lihat ilustrasi pada Gambar 21.



Gambar 21 Ilustrasi Konsistensi Hasil Evaluasi Internal dengan Evaluasi Eksternal

Peta mutu yang dihasilkan melalui penjaminan mutu internal oleh sekolah dengan pengisian instrumen evaluasi diri yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki skala yang berbeda dengan peta mutu hasil akreditasi oleh BAN-S/M. Peta mutu hasil internal menggunakan skala 0-7 dan dinyatakan dalam 5 kategori. Di lain pihak, peta mutu yang dihasilkan oleh BAN-S/M dihitung berdasarkan skala 0-100 dan hasilnya dikelompokkan menjadi 4 kategori. Lihat Tabel 5. Agar kedua hasil dari sumber yang berbeda ini dapat dikomparasikan maka keduanya harus memiliki skala yang sama. Oleh karena itu, peta mutu yang dihasilkan secara internal akan dikonversi ke skala yang digunakan oleh BAN-S/M.

Dalam laporan ini, hasil pemetaan yang dikomparasikan hanya hasil pemetaan oleh sekolah model dan sekolah model jenjang SMK tidak termasuk dalam perbandingan tersebut. Alasan kenapa sekolah model jenjang SMK tidak dilibatkan dalam perbandingan hasil pemetaan dengan hasil akreditasi disebabkan akreditasi jenjang SMK dilakukan pada setiap program pendidikan bukan akreditasi satuan pendidikan secara utuh. Di lain pihak, pemetaan mutu

internal dilakukan secara keseluruhan satuan pendidikan bukan pada setiap program pendidikan. Peta mutu yang muncul adalah peta mutu satuan pendidikan bukan peta mutu program pendidikan.

Nilai yang dikonversi ke skala akreditasi adalah nilai capaian mutu yang merupakan nilai rerata capaian 8 SNP. Batasan nilai dan kategori akreditasi dapat dilihat pada Tabel 5. Sekali lagi, perbandingan hasil akreditasi versi pemetaan dengan hasil akreditasi versi BAN S/M dapat dilakukan karena keduanya mengukur hal yang sama yaitu ketercapaian SNP di satuan pendidikan. Hasil pemetaan internal yang dikonversi ke skala akreditasi adalah hasil pemetaan tahun 2018. Hal ini dilakukan karena tahun 2018 adalah tahun ketiga pelaksanaan SPMI dan data akreditasi sekolah model kebanyakan data akreditasi pada tahun 2017 dan 2018. Namun, ada beberapa sekolah model yang tidak memiliki peta mutu pada tahun 2018. Sebagai penggantinya, perbandingan akan didasarkan pada hasil pemetaan tahun 2017. Sekolah model yang menggunakan hasil pemetaan tahun 2017 untuk komparasi dengan akreditasi ditandai dengan warna oranye pada kolom (i) dan (j) dalam Lampiran 6, 8, dan 10. Pada sisi lain, jika sekolah model pada tahun 2017 atau 2018 belum keluar nilai akreditasinya, maka hasil akreditasi yang akan digunakan adalah hasil akreditasi terakhir pada saat sekolah model tersebut diusulkan sebagai sekolah model.

Tabel 18 menunjukkan sebaran sekolah model dengan perubahan akreditasi berdasarkan hasil pemetaan. Data lebih detail dapat dilihat pada Lampiran 6. Kolom (a) menyatakan nilai akreditasi sekolah model berdasarkan penilaian BAN-S/M. Kolom (b) adalah nilai akreditasi hasil konversi nilai pemetaan internal ke skala akreditasi BAN-S/M. Terakhir, kolom (c) menyatakan jumlah sekolah model yang memiliki hasil perbandingan akreditasi internal dengan akreditasi BAN-S/M pada setiap baris yang bersesuaian. Misalnya, pada baris ke tiga, kolom (c) ada sebanyak 8 sekolah. Artinya, ada 8 sekolah model pada saat diusulkan sebagai sekolah model memiliki akreditasi oleh BAN-S/M dengan nilai A tetapi hasil akreditasi berdasarkan konversi nilai pemetaan nilainya C.

Berdasarkan data pada Tabel 20, dari 60 sekolah, hanya 1 sekolah model yang hasil evaluasi internalnya melebihi akreditasi, yaitu SDN Rato (lihat Lampiran 6). Nilai akreditasi sekolah tersebut C dan nilai capaian mutu yang dikonversi ke skala akreditasi adalah B. Sementara itu, ada 7 sekolah dengan akreditasi berdasarkan konversi hasil pemetaan memiliki kategori yang sama dengan kategori akreditasi hasil BAN-S/M. Semua sekolah tersebut memiliki

akreditasi B. Sisanya, hampir 87% sekolah model jenjang SD memiliki hasil pemetaan yang bertolak belakang dengan hasil akreditasi BAN-S/M. Nilai akreditasi hasil konversi semuanya menurun jika dibandingkan dengan hasil akreditasi BAN-S/M. Bahkan 7 sekolah diantaranya memiliki hasil pemetaan termasuk dalam kategori tidak terakreditasi menurut skala akreditasi BAN-S/M padahal akreditasi ketujuh sekolah tersebut A atau B.

Tabel 18 Sebaran Sekolah Model SD Berdasarkan Perbandingan Hasil Akreditasi

No	Kategori Akreditasi Versi BAN	Kategori Akreditasi Hasil Konversi Pemetaan Mutu	Jumlah Sekolah
(a)	(b)	(c)	(d)
1	A	A	0
2	A	B	22
3	A	C	8
4	A	TT	1
5	B	A	0
6	B	B	7
7	B	C	15
8	B	TT	6
9	C	A	0
10	C	B	1
11	C	C	0
12	C	TT	0
Jumlah			60

Apa yang terjadi di sekolah model jenjang SD juga terjadi pada sekolah model jenjang SMP dan SMA. Pada jenjang SMP, lihat Tabel 19, ada 27 sekolah model memiliki akreditasi BAN-S/M dengan nilai A dan 11 sekolah model berakreditasi B. Dari 38 sekolah model jenjang SMP, hanya 4 sekolah yang nilai pemetaannya konsisten dengan nilai akreditasi BAN-S/M. Sisanya, sebanyak 34 sekolah memiliki hasil pemetaan jauh di bawah akreditasi BAN-S/M. Bahkan empat sekolah memiliki nilai pemetaan yang terjun bebas berdasarkan kriteria akreditasi BAN-S/M, yaitu tidak terakreditasi. Sementara itu, pada jenjang SMA, berdasarkan data pada Tabel 20, tidak satupun sekolah model SMA yang nilai pemetaannya konsisten dengan nilai akreditasi BAN-S/M. Dua puluh enam sekolah model dengan akreditasi BAN-S/M bernilai A memiliki nilai pemetaan internal lebih rendah. Hasil pemetaannya setelah dikonversi ke skala akreditasi setara B sebanyak 11 sekolah, setara C sebanyak 12 sekolah, dan 4 sekolah tidak terakreditasi. Dua sekolah yang lain dengan nilai akreditasi BAN-S/M B, nilai pemetaannya setelah dikonversi ke skala akreditasi setara C.

Tabel 19 Sebaran Sekolah Model SMP Berdasarkan Perbandingan Hasil Akreditasi

No	Kategori Akreditasi Versi BAN	Kategori Akreditasi Versi Hasil Pemetaan Mutu	Jumlah Sekolah
(a)	(b)	(c)	(d)
1	A	A	0
2	A	B	9
3	A	C	15
4	A	TT	3
5	B	A	0
6	B	B	4
7	B	C	6
8	B	TT	1
9	C	A	0
10	C	B	0
11	C	C	0
12	C	TT	0
Jumlah			38

Tabel 20 Sebaran Sekolah Model SMA Berdasarkan Perbandingan Hasil Akreditasi

No	Kategori Akreditasi Versi BAN	Kategori Akreditasi Versi Hasil Pemetaan Mutu	Jumlah Sekolah
(a)	(b)	(c)	(d)
1	A	A	0
2	A	B	11
3	A	C	12
4	A	TT	3
5	B	A	0
6	B	B	0
7	B	C	2
8	B	TT	0
9	C	A	0
10	C	B	0
11	C	C	0
12	C	TT	0
Jumlah			28

Hasil ini akan jauh lebih rendah lagi jika kriteria pemeringkatan akreditasi BAN-S/M diterapkan secara ketat pada hasil pemetaan. Bahwa suatu satuan pendidikan akan dinyatakan “terakreditasi” jika memenuhi tiga kriteria tanpa kecuali, yaitu (1) memiliki nilai akhir akreditasi sekurang-kurangnya 71 atau 4.97 pada skala pemetaan internal; (2) nilai komponen standar sarana dan prasarana pendidikan minimal 61 atau 4.27 pada skala pemetaan internal; dan (3) tidak ada nilai komponen pada standar yang lain di bawah 50 atau 3.50 pada skala pemetaan

internal. Maka, berdasarkan data pada Lampiran 7,9, dan 11 serta berdasarkan tiga kriteria pemeringkatan akreditasi BAN-S/M, hanya 65% sekolah model jenjang SD yang memenuhi kriteria terakreditasi dan sisanya tidak terakreditasi. Dari 65% tersebut, hanya 7 sekolah yang hasil pemetaannya sejalan dengan hasil akreditasi BAN-S/M dengan satu sekolah melebihi akreditasi BAN-S/M. Sisanya, hasil pemetaannya lebih rendah dari hasil akreditasi BAN-S/M. Untuk jenjang SMP, ada 26 sekolah model dari 38 sekolah model yang masuk kategori “terakreditasi” berdasarkan tiga kriteria pemeringkatan BAN-S/M. Hanya empat sekolah model jenjang SMP yang hasil pemetaannya setara dengan hasil akreditasi BAN-S/M. Pada jenjang SMA, tercatat 10 sekolah model yang dinyatakan tidak terakreditasi berdasarkan 3 kriteria pemeringkatan BAN-S/M. tidak ada satupun sekolah yang memiliki hasil pemetaan yang konsisten dengan hasil akreditasi BAN-S/M.

Terjadinya ketidakkonsistenan antara hasil pemetaan secara internal yang dilakukan oleh sekolah dengan hasil pemetaan secara eksternal (akreditasi oleh BAN-S/M) tentu mengundang tanya. Apa yang diukur melalui pemetaan secara internal maupun eksternal adalah sama, yaitu sejauh mana suatu sekolah telah memenuhi SNP. Adapun alat ukurnya (instrumen) berbeda namun dikembangkan dari acuan yang sama yaitu SNP. Bahkan, instrumen pemetaan internal banyak mengadopsi instrumen yang digunakan dalam akreditasi. Oleh karena itu, kajian lebih komprehensif tentang perbedaan hasil pemetaan internal dan eksternal ini perlu dilakukan. Kajian lebih lanjut tentang hal tersebut tidak dibahas dan tidak menjadi bagian dalam laporan ini. Untuk pendalaman, beberapa hal kami rekomendasikan untuk dikaji lebih dalam adalah: (1) instrumen pemetaan internal dan eksternal; (2) proses pengisian instrumen; (3) proses validasi isian instrumen; (d) validator; (4) pemenuhan bukti fisik yang diperlukan; (5) penskoran dan penilaian; (6) motivasi satuan pendidikan dalam melaksanakan pemetaan internal dan eksternal; (7) dan lain-lain.

BAB IV

PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SPMI

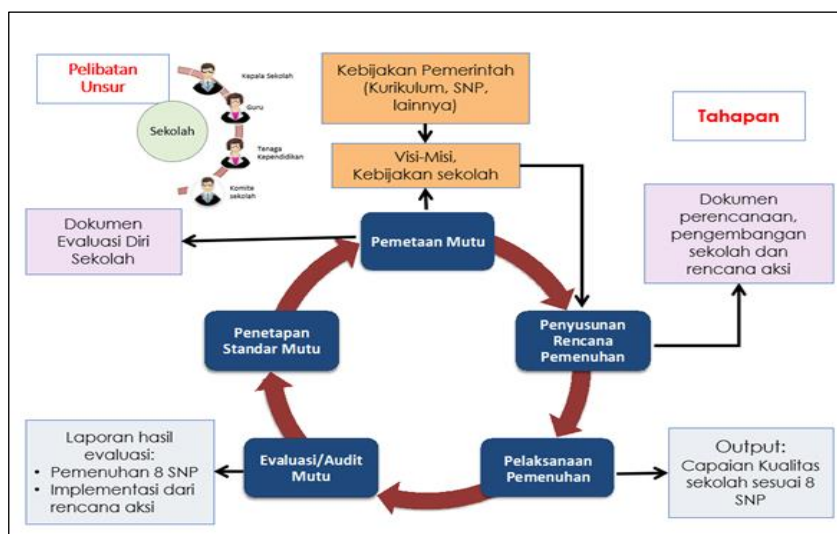
Pada BAB II dan BAB III telah dijelaskan bagaimana peta mutu pendidikan Provinsi NTB dan peta mutu pendidikan sekolah model berdasarkan rapor mutu. Rapor mutu ini merupakan potret diri daerah yang diperoleh dari hasil agregasi seluruh sekolah. Pada bagian ini akan dipaparkan tentang bagaimana satuan pendidikan memanfaatkan rapor mutu tersebut dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di masing-masing sekolah. Pada dasarnya apa yang dipaparkan pada dua BAB sebelumnya merupakan salah satu rangkaian siklus penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan diuraikan di bawah. Dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan, LPMP NTB memberikan pendampingan dalam bentuk beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2017 dan tahun 2018.

A. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 memberikan kewenangan kepada setiap satuan pendidikan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan secara internal. Pengendalian dan pengawasan secara internal oleh setiap satuan pendidikan dilakukan dengan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI merupakan suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan oleh setiap satuan pendidikan guna menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui SNP. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dilakukan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan tersebut.

Implementasi SPMI oleh satuan pendidikan dilakukan melalui lima siklus. Gambar 22 menunjukkan siklus tersebut. Siklus ini merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus yang dimulai dengan pemetaan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan SNP. Hasil pemetaan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah. Proses berikutnya adalah pelaksanaan pemenuhan mutu berdasarkan rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan pemenuhan mutu ini dilakukan baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran.

Guna mengukur ketercapaian pemenuhan mutu yang telah dilaksanakan, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan pemenuhan mutu dilakukan. Monitoring dan evaluasi ini tidak hanya dilakukan pada tahapan pemenuhan mutu, tetapi juga dilakukan pada setiap siklus sistem penjaminan mutu internal. Hasil monitoring dan evaluasi ini kemudian dijadikan dasar oleh satuan pendidikan untuk menetapkan standar baru yang akan dicapai sekaligus sebagai pijakan dalam menyusun strategi peningkatan mutu berikutnya. Penerapan SPMI yang dilakukan secara berkesinambungan dapat membantu satuan pendidikan untuk memastikan peningkatan mutu di sekolah tersebut dari waktu ke waktu berdasarkan capaian mutu sekolah.



Gambar 22 Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal

Seluruh langkah dalam siklus penjaminan mutu dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Satuan pendidikan berperan dalam melaksanakan sistem yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Hal ini untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu dalam rangka memenuhi atau melampaui SNP. Agar sistem tersebut dapat berperan maksimal, sistem itu hendaknya memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut.

- 1) **mandiri dan partisipatif**, yaitu sistem tersebut dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh satuan pendidikan dengan membangun partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan;
- 2) **terstandar**, acuan mutu yang digunakan minimal SNP dan standar baru dapat ditetapkan oleh satuan pendidikan jika telah memenuhi SNP);
- 3) **akurat**, data dan informasi yang digunakan harus jujur dan sesuai dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan;

- 4) **sistematis dan berkelanjutan**, kegiatan penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan secara berkelanjutan mengikuti lima langkah penjaminan mutu yang membentuk suatu siklus yang dilaksanakan secara berurutan dan berkelanjutan membentuk suatu siklus;
- 5) **holistik**, dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait);
- 6) **transparan dan akuntabel**, seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Indikator keberhasilan dari pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan adalah terbentuknya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang mampu melaksanakan seluruh siklus penjaminan mutu secara mandiri dan berkesinambungan. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar. Dampak jangka panjang adalah terbangunnya budaya mutu di satuan pendidikan yang dapat berdampak pada meningkatnya mutu hasil belajar.

Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Satuan pendidikan dimaksud kemudian disebut sebagai sekolah model. Sekolah model adalah sekolah yang menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut. Sekolah model diharapkan dapat memberikan gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di Propinsi Nusa Tenggara Barat pada khususnya. Penjelasan lebih lengkap tentang sekolah model dapat dibaca kembali pada BAB III bagian A.

B. Fasilitator Nasional dan Fasilitator Daerah

Selama proses implementasi SPMI, setiap sekolah model dan sekolah imbas didampingi oleh fasilitator daerah. Fasilitator daerah terdiri atas unsur pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru berprestasi pada setiap jenjang sekolah model. Setiap fasilitator daerah mendampingi 2–3 sekolah model beserta sekolah imbas dari masing-masing sekolah model tersebut. Jumlah fasilitator daerah setiap jenjang di masing-masing kabupaten/kota tergantung pada

banyak sekolah model. Pada tahun 2018, ada 19 fasilitator daerah jenjang SD, 18 jenjang SMP, 20 jenjang SMA/SMK. Rata-rata terdapat 1-2 fasilitator daerah pada setiap jenjang sekolah model.



Gambar 23 Bimtek Penyegaran Fasiltator Daerah

Agar proses pendampingan implementasi SPMI di sekolah model dan sekolah imbas dapat berjalan lancar dan berkualitas, faslitator daerah diberikan bimbingan teknis dan penyegaran tentang materi SPMI. Penyegaran ini meliputi materi teknis, yaitu pola pendampingan yang baru serta materi-materi lain yang merupakan perbaikan dari materi SPMI tahun 2017. Narasumber pada kegiatan ini adalah para fasilitator nasional yang berasal dari unsur widyaiswara LPMP NTB. Daftar fasilitator nasional dan fasilitator daerah ditunjukkan pada Tabel 21 di bawah.

Tabel 21 Daftar Fasilitator Nasional dan Fasilitator Daerah SPMI Tahun 2018

No	Nama	Jenjang	Nama Instansi	Kabupaten/Kota
1	Dr. Wirman Kasmayadi	Widyaiswara	LPMP NTB	-
2	Dr. Samsul Hadi	Widyaiswara	LPMP NTB	-
3	Ahmad Sahid, M. Pd.	Widyaiswara	LPMP NTB	-
4	Anggraini Naskawati, M. Pd.	Widyaiswara	LPMP NTB	-
5	Muh. Saarani, S.Pd	SMK	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Lombok Barat
6	Ruju Ahmad, MT	SMK	SMKN 2 Kuripan	Lombok Barat
7	Baiq Sumarni, S.Si	SMP	Dinas Dikbud	Lombok Barat
8	Hj. Erni Rohanah, S.Pd, M.Si	SD	Dinas Dikbud	Lombok Barat
9	Drs. H. Abd. Rasyid	SD	Dinas Dikbud	Lombok Barat
10	Drs. H. Fatkhurokhman, M.Pd	SMP	Dinas Dikbud	Lombok Barat
11	Musyafak, S.Pd	SMA	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Lombok Barat
12	Rubiman, S.Pd, M.Pd	SMK	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Lombok Timur

No	Nama	Jenjang	Nama Instansi	Kabupaten/Kota
13	Suratno, M.Pd	SMA	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Lombok Timur
14	Saadah, S.Pd.Kn	SMP	Dinas Dikbud	Lombok Timur
15	Agus Sisyanto, S.Si	SMP	Dinas Dikbud	Lombok Timur
16	Sahdi Janap, S.Pd	SD	Dinas Dikbud	Lombok Timur
17	Moh. Sopian Hadi, S.Pd	SD	Dinas Dikbud	Lombok Timur
18	Taufik Agus Tanto, S.Pd	SD	Dinas Dikpora	Lombok Utara
19	Suwarto, S.Pd	SD	Dinas Dikpora	Lombok Utara
20	Drs. Moh.Hakam Yamin, M.Si	SMK	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Lombok Utara
21	Munasip, S.Pd	SMP	Dinas Dikpora	Lombok Utara
22	Moch Fatkoer Rohman, S.Pd	SMA	SMAN 1 Tanjung	Lombok Utara
23	Muhammad Adnan, S.Pd, MM	SD	Dinas Dikpora	Sumbawa Barat
24	Hermansyah, S.Pd, MM	SMP	Dinas Dikpora	Sumbawa Barat
25	Hj. Hibatullah, S.Pd, M.Pd	SD	Dinas Dikpora	Sumbawa Barat
26	Suharli, S.Pd	SMA/SMK	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Sumbawa Barat
27	Suharjo, S.Pd	SMP	Dinas Dikpora	Sumbawa Barat
28	Drs. Ridwan. MH, M.Ap	SMK	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Bima
29	Budiono Basuki, M.pd	SMA	SMAN 2 Soromandi	Bima
30	Drs. Haryanta, M.Pd	SMP	Dinas Dikbudpora	Bima
31	H. Muhamad Iqbal, M.Pd	SMP	Dinas Dikbudpora	Bima
32	Drs. Ridwan H. M Saleh	SD	Dinas Dikbudpora	Bima
33	Sudirman Jafar, S.Pd,MM	SD	Dinas Dikbudpora	Bima
34	Drs. Kasman, S.Pdi, SE, MM	SMA	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Bima
35	Sugeng Prayoga, S.Pd, MM	SMA	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Kota Mataram
36	Hj. Sahariawati, S.Pd	SD	Dinas Pendidikan	Kota Mataram
37	Dra. Ni Nengah Sri Swathi, M.Pd	SMP	Dinas Pendidikan	Kota Mataram
38	Drs. H. Rawinggip, MM.Pd	SMP	Dinas Pendidikan	Kota Mataram
39	Drs. Edy Susilo, M.Pd	SMK	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Kota Mataram
40	Drs. H. Moh. Khalil, M.Pd	SMK	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Lombok Tengah
41	Hj. Siti Khadijah, S.Pd	SD	Dinas Pendidikan	Lombok Tengah
42	Mahdi Hasan, S.Pd	SD	Dinas Pendidikan	Lombok Tengah
43	Drs. Setradip	SMK	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Lombok Tengah
44	Drs. H. Mutawalli	SMP	Dinas Pendidikan	Lombok Tengah
45	Muhamad Tafsir, S.Pd, M.Pd	SMP	Dinas Pendidikan	Lombok Tengah
46	Fatmawati, S.Pd	SMP	Dinas Dikbud	Sumbawa
47	Sudarmin, S.Pd, M.Pd	SMA	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Sumbawa
48	Karwo, S.Pd, M.Pd	SMP	Dinas Dikbud	Sumbawa
49	Juna Idaman, S.Pd, M.Pd	SD	Dinas Dikbud	Sumbawa
50	Fatmawati, S.Pd	SD	Dinas Dikbud	Sumbawa
51	Wisnu Supriyadi, S.Pd	SMK	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Sumbawa
52	Drs.Wahyudi	SMP	Dinas Dikpora	Dompu
53	Atang Mulyadi, S.Pd	SMP	Dinas Dikpora	Dompu
54	H. Ahmad Tirmizi, M.Pd	SD	Dinas Dikpora	Dompu
55	Arnaini, S.Pd	SD	Dinas Dikpora	Dompu
56	Fauziah, S.Pd, M.Pd	SMK	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Dompu
57	Drs. Suaidin	SMA	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Dompu
58	H. Lukman, S.Pd, M.Pd	SD	Dinas Dikbud	Kota Bima
59	H. Muh. Said, S.Pd	SD	Dinas Dikbud	Kota Bima
60	Zainuddin, S.Pd, M.Pd	SMP	Dinas Dikbud	Kota Bima
61	Drs. Usman Syam	SMK	UPT Layanan Dikmen & PK-PLK	Kota Bima

C. Dana Bantuan Pemerintah

Untuk mendukung keterlaksanaan implementasi SPMI di sekolah model dan sekolah imbas, LPMP NTB memberikan dana bantuan pemerintah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap sekolah model. Dana bantuan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pada kegiatan *in service 1*, *on service*, dan *in service 2*. Dana bantuan pemerintah ini bersifat stimulan sehingga diharapkan sekolah model dan sekolah imbas serta pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan untuk ikut berpartisipasi dalam membiayai program tersebut.



Gambar 24 Asistensi Dana Bantuan Pemerintah Sekolah Model

D. Evaluasi Pendampingan SPMI Tahun 2017

Tahun 2018 adalah tahun kedua pendampingan implementasi SPMI di 150 sekolah model dan 750 sekolah imbas. Pelaksanaan SPMI pada tahun 2017 tentu mengalami berbagai macam kendala. Pola pendampingan dalam bentuk *workshop I*, *II*, dan *III* mendapat banyak masukan dari fasilitator daerah dan tim penjaminan mutu pendidikan sekolah (TPMPS). Semua kegiatan pendampingan dilakukan terpusat di sekolah model. Pendampingan implementasi SPMI di sekolah imbas tidak dilakukan. Akibatnya, pelaksanaan SPMI di sekolah imbas tidak ada yang mengontrol sehingga hasilnya tidak optimal.



Gambar 25 Penyegaran dan Evaluasi Sekolah Model

Sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI pada tahun 2017, semua sekolah model dan sekolah imbas diberikan penyegaran tentang SPMI. Kegiatan penyegaran ini sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI pada tahun sebelumnya. Kesulitan dan miskonsep tentang siklus SPMI dibahas pada kegiatan tersebut. Semua peserta dilatih kembali bagaimana melaksanakan siklus SPMI. Pada kegiatan ini peserta didampingi oleh widyaiswara dan fasilitator daerah.

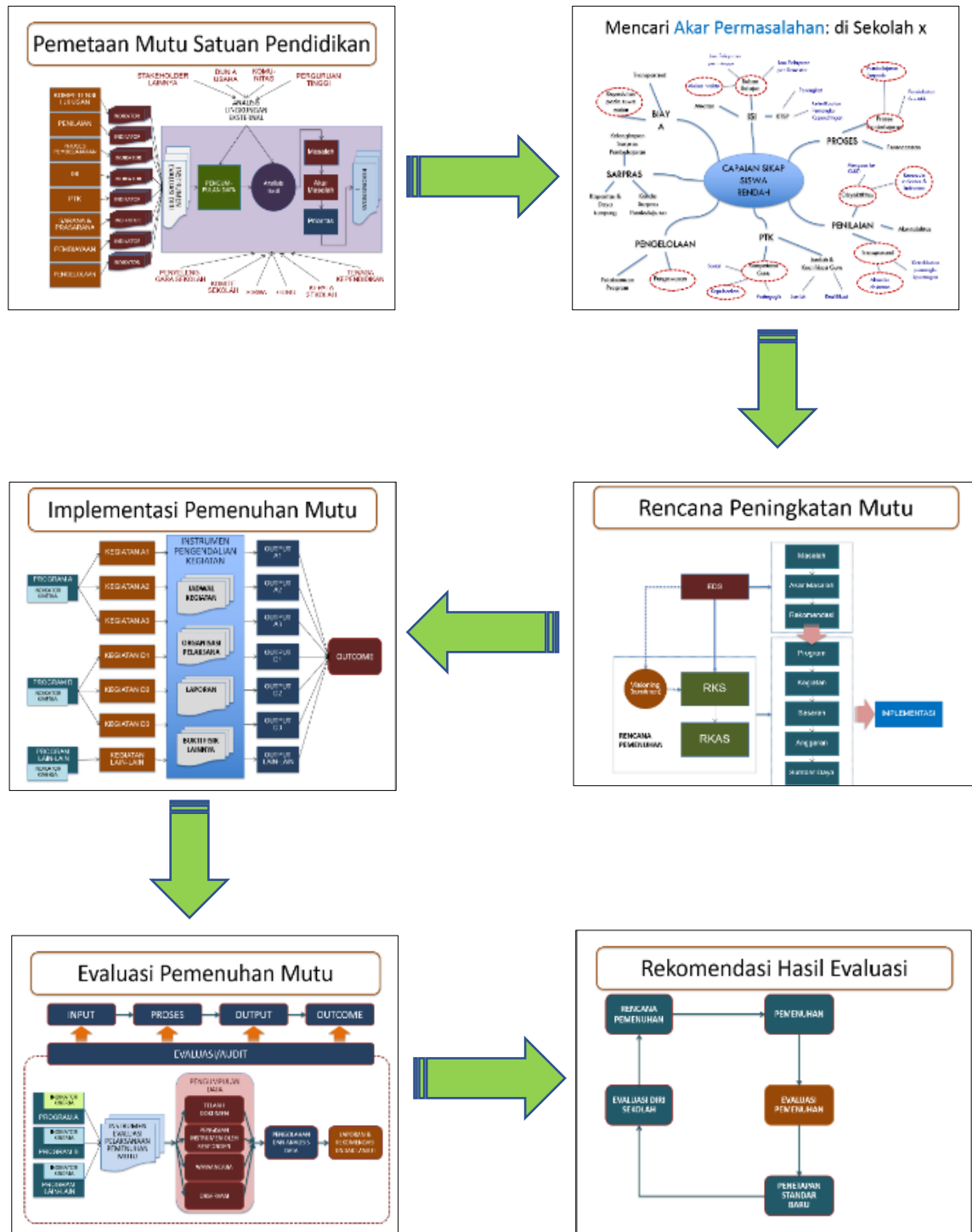
E. Pendampingan Implementasi SPMI

Pelaksanaan SPMI di sekolah model mengacu pada Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 yang meliputi lima siklus. Alur pendampingan SPMI di sekolah model dan sekolah imbas berdasarkan lima siklus tersebut dapat dilihat pada Gambar 26. Agar implementasi SPMI tersebut terkendali dan terukur, LPMP NTB membuat rambu alur kegiatan. Pada tahun 2017, pola pendampingan yang dikembangkan adalah pendampingan menggunakan pendekatan *workshop*. *Workshop* ini dilakukan sebanyak tiga kali dan diselenggarakan terpusat hanya di sekolah model. Kelemahan dari pola ini adalah kehadiran sekolah imbas yang tidak maksimal. Selama kegiatan peserta dari sekolah imbas banyak yang tidak membawa bahan-bahan yang diperlukan. Selain itu, perwakilan sekolah imbas yang hadir pada setiap *workshop* sering berbeda padahal materi pada setiap *workshop* berlainan sehingga perwakilan sekolah imbas tadi menjadi kebingungan.

Terbatasnya dana bantuan pemerintah juga menjadi pemicu kurangnya peran serta sekolah imbas. Pada setiap *workshop*, hanya satu dari perwakilan sekolah imbas yang diundang, yaitu kepala sekolah. Tidak adanya ruang bagi fasilitator daerah untuk mengawal sekolah imbas menindaklanjuti hasil *workshop* adalah faktor lain yang menyebabkan kurang optimalnya hasil implementasi SPMI di sekolah imbas. Dampaknya, *workshop* implementasi SPMI bagi sekolah imbas hanya bersifat informasi dan teori pemahaman tentang SPMI.

Berdasarkan evaluasi pola pendampingan tahun 2017, pendampingan implementasi SPMI pada tahun 2018 dilakukan dengan pola *in service-on service-in service* (selanjutnya ditulis *in-on -in*). Dalam konteks pendampingan SPMI, pendekatan *in service* merupakan suatu proses untuk memperlancar dan mempermudah kepala sekolah dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dalam mengelola 8 SNP melalui penerapan SPMI. Proses ini titik fokusnya adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para kepala sekolah

dan TPMPS tentang implementasi SPMI. Berbeda dengan *in service*, pendekatan *on service* dalam pendampingan SPMI menitikberatkan pada proses belajar dan bekerja berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh pada saat *in service*. Melalui pendekatan *on service*, TPMPS memiliki pengalaman dan ketrampilan yang optimal dalam melaksanakan SPMI di sekolah berdasarkan situasi dan kondisi riil sekolah.



Gambar 26 Alur Pendampingan Implementasi SPMI

Pelaksanaan *in-on -in* tidak hanya terpusat di sekolah model, tetapi juga di sekolah imbas. Pendekatan ini merupakan pengembangan dari pendekatan *workshop* pada tahun 2017. Pada pendekatan *workshop*, peserta lebih cenderung mengedepankan informasi dan penguasaan pengetahuan sementara tindak lanjut terbatas. Pada pendekatan *in-on-in*, selain penguasaan pengetahuan, peserta juga dituntut untuk memiliki ketrampilan untuk mengimplementasikan SPMI secara utuh melalui kegiatan *on*. Penguasaan keterampilan ini diharapkan berlangsung jangka panjang dan berkelanjutan demi terwujudnya budaya mutu di sekolah.

1. *In Service 1*

Kegiatan *in service 1* dilakukan terpusat di sekolah model. Seluruh sekolah imbas diundang ke sekolah model. Pada kegiatan *in service 1*, peserta yang diundang dari sekolah model adalah TPMPs yang terdiri atas kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan wakil kepala sekolah, perwakilan tenaga kependidikan, perwakilan komite sekolah, dan pengawas pembina. Sementara dari sekolah imbas yang diundang adalah kepala sekolah dan pengawas pembina sekolah imbas. Unsur lain yang diundang adalah fasilitator daerah dan unsur dinas pendidikan dan kebudayaan. Narasumber dari kegiatan ini adalah kepala sekolah model, unsur dinas pendidikan dan kebudayaan, serta fasilitator daerah. Pada saat *in service 1*, materi yang dibahas secara umum adalah seluruh siklus SPMI. Namun, titik berat siklus yang dibahas adalah pemetaan mutu dan penyusunan rencana pemenuhan mutu. Tiga siklus yang lain dibahas pada waktu *on* dan *in service 2*.

a. Pemetaan Mutu

Siklus pertama dari SPMI adalah pemetaan mutu sekolah. Pemetaan mutu ini dilaksanakan melalui evaluasi diri sekolah berdasarkan SNP. Peta mutu yang dihasilkan diharapkan dapat menggambarkan informasi mutu sekolah, kekuatan dan kelemahan masing-masing standar, masalah yang dihadapi pada masing-masing standar, akar masalah dan rekomendasi serta strategi kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Rapor mutu sekolah model pada setiap jenjang telah dibahas secara gamblang di BAB III. Namun, pembahasan tersebut berlaku bagi sekolah model sebagai hasil agregasi rapor mutu setiap sekolah model. Pembahasan belum meliputi pemetaan kekuatan dan kelemahan masing-masing sekolah model.

Pada saat melakukan pemetaan, data utama yang digunakan adalah rapor mutu sekolah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Agar hasil pemetaan mutu sekolah komprehensif, data dari sumber lain juga diperlukan sepanjang

masih relevan dengan data pemenuhan SNP. Sumber data lain yang dapat digunakan adalah data akreditasi sekolah, hasil ujian nasional, hasil uji kompetensi guru, sertifikasi guru, serta data-data lain yang dibutuhkan untuk memperkuat hasil peta mutu sekolah. Pemetaan mutu sekolah dimulai dengan melakukan analisis rapor mutu. Setiap sekolah melakukan analisis kelemahan dan kekuatan sekolahnya berdasarkan rapor mutu. Analisis kekuatan dan kelemahan ini meliputi 8 SNP. Contoh analisis kekuatan dan kelemahan diberikan pada bagian lain dalam BAB ini.



Gambar 27 Suasana Diskusi Perencanaan Pemenuhan Mutu

b. Perencanaan Peningkatan Mutu

Hasil analisis peta kelemahan dan kekuatan sekolah berdasarkan rapor mutu kemudian dijadikan dasar untuk menyusun rencana pemenuhan mutu. Selain berdasarkan hasil telaah kelemahan dan kekuatan sekolah berdasarkan rapor mutu, data-data pendukung seperti dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah, dan satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan perlu dijadikan acuan. Penyusunan rencana pemenuhan mutu ini harus rasional, terukur, dapat dicapai dan dilakukan oleh sekolah secara optimal. Hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan serta rencana aksi kegiatan.

2. *On Service*

Sebagai tindak lanjut dari hasil pemetaan mutu dan perencanaan pemenuhan mutu yang diperoleh pada *in service* 1, siklus selanjutnya adalah pelaksanaan pemenuhan mutu. Siklus ini dilaksanakan di sekolah masing-masing. Selama proses pelaksanaan pemenuhan mutu ini, setiap sekolah, baik sekolah model maupun sekolah imbas, didampingi oleh kepala sekolah model dan fasilitator daerah. Pada saat pendampingan

ini, fasilitator daerah memeriksa keterlaksanaan program pemenuhan mutu yang telah dirancang sebelumnya sekaligus memberikan asistensi kepada tim penjaminan mutu pendidikan sekolah terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami selama pelaksanaan pemenuhan mutu. Segala proses dalam pelaksanaan pemenuhan mutu dievaluasi kemudian dijadikan dasar untuk memperbaiki yang kurang. Rentang waktu pelaksanaan *on service* selama 3 bulan sejak *in service* 1 dilaksanakan.

Pendampingan saat *on service* dilakukan lebih intensif karena merupakan momen sekolah menindaklanjuti rencana pemenuhan mutu yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, fasilitator daerah dan kepala sekolah model juga melakukan pendalaman terhadap dua siklus yang telah dilakukan pada saat *in service* 1, khususnya di sekolah imbas. Hal ini dilakukan karena banyak sekolah imbas yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan mutu. Penyebabnya adalah kurang maksimalnya peran perwakilan sekolah imbas saat mengikuti *in service* 1 yang berdampak pada kebingungan dalam melaksanakan siklus pemenuhan mutu pada saat *on service*.



Gambar 28 Geliat *On Service* Pendampingan SPMI di Sekolah Model dan Sekolah Imbas

Pada tahun 2017, semua proses pendampingan siklus SPMI dipusatkan di sekolah model. Akibatnya, perwakilan sekolah imbas yang diundang hanya satu orang karena keterbatasan dana bantah sehingga peran serta sekolah imbas menjadi terbatas. Berdasarkan pengalaman tersebut, pada tahun 2018, pelaksanaan pendampingan SPMI dipecah dengan *on service* dilaksanakan di sekolah model dan sekolah imbas. Tujuannya untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi sekolah untuk bereksplorasi dengan data-data yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Selain itu, sekolah imbas dapat melibatkan lebih banyak lagi TPMPs dalam melaksanakan peningkatan mutu di sekolah sehingga masing-masing memiliki rasa tanggung jawab dalam memajukan sekolah.

Dalam proses pelaksanaan pemenuhan mutu, setiap sekolah melakukan audit mutu internal terhadap keterlaksanaan rencana aksi. TPMPs pada setiap sekolah berdiskusi dengan fasilitator daerah pendampingnya untuk merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu. Berdasarkan hasil evaluasi itu, sekolah merancang perbaikan rencana aksi dan proses pelaksanaan pemenuhan mutu untuk dilaksanakan pada kesempatan berikutnya.

3. *In Service 2*

Untuk mengetahui progres hasil pelaksanaan pemenuhan mutu, seluruh sekolah yang telah melaksanakan dikumpulkan kembali di sekolah model. Peserta yang diundang sama dengan peserta *in service 1*. Pada kegiatan *in service 2*, setiap sekolah diminta untuk memaparkan hasil implementasi SPMI yang telah dilaksanakan. Fasilitator daerah bersama peserta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan siklus tersebut. Hasil evaluasi ini akan memberikan gambaran kepada sekolah apakah akan menetapkan standar baru dalam pemenuhan mutu atau melanjutkan pemenuhan mutu pada standar yang sama tetapi dengan perbaikan.



Gambar 29 Pemilihan *Best Practice* Jenjang SD Perwakilan Kabupaten Sumbawa

F. Diseminasi Hasil Implementasi SPMI

Setelah seluruh rangkaian kegiatan implementasi SPMI baik di sekolah model maupun di sekolah imbas selesai, LPMP NTB mengundang beberapa sekolah model untuk memberikan diseminasi hasil yang telah dicapai. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi keterlaksanaan SPMI di setiap sekolah model dan sekolah imbas. Hal-hal yang

didesiminasikan adalah hasil praktik baik (*best practice*) implementasi SPMI oleh sekolah model.



Gambar 30 Pojok Pameran Produk SPMI Salah Satu Sekolah Model

Selain perwakilan sekolah model yang menjadi peserta diseminasi, LPMP NTB juga mengundang unsur dinas pendidikan dan kebudayaan, perwakilan Kantor Bahasa NTB, BP PAUD dan DIKMAS NTB, dan perwakilan pengawas. Untuk memberikan tambahan pengalaman lain bagi sekolah model, salah satu pemenang lomba bidang numerasi bagi anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan oleh INOVASI juga diundang. Selama pelaksanaan diseminasi beberapa sekolah model di Kota Mataram disediakan ruang untuk memamerkan produk-produk yang dihasilkan selama pelaksanaan SPMI.

Tahun 2018, ada 40 sekolah model yang diundang untuk menyampaikan diseminasi, terdiri atas 19 SD, 9 SMP, 6 SMA, dan 6 SMK. Sekolah-sekolah model tersebut dipilih oleh fasilitator daerah berdasarkan perkembangan pelaksanaan siklus yang diperoleh selama pendampingan. Ke-40 sekolah model itu dipilih mewakili seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Lombok Utara. Perwakilan dari Kabupaten Lombok Utara tidak ada karena semua sekolah dalam proses pemulihan dari dampak gempa. Daftar sekolah model yang menjadi peserta diseminasi SPMI ditampilkan pada Lampiran I.

Untuk memotivasi sekolah model, pola penyelenggaraan diseminasi diatur dalam bentuk lomba praktik baik dari masing-masing sekolah model. Pada kesempatan ini, perwakilan dari

Kabupaten Sumbawa memenangi tiga kategori yaitu, Pemenang II masing-masing jenjang SD dan SMP serta pemenang pertama untuk jenjang SMK. Sementara untuk kategori yang lain tersebar di beberapa kabupaten yang lain. Daftar pemenang diseminasi praktek baik setiap jenjang dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22 Daftar Pemenang Diseminasi Hasil SPMI tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah Model	Keterangan
1	Lombok Timur	SDN 1 Selebung Ketangga	Pemenang I Jenjang SD
2	Sumbawa	SDN 1 Sumbawa	Pemenang II Jenjang SD
3	Lombok Barat	SDN 1 Jembatan Gantung	Pemenang III jenjang SD
4	Kota Bima	SDN 55 Dara Kota Bima	Pemenang III Jenjang SD
5	Sumbawa	SMNP 3 Sumbawa	Pemenang I Jenjang SMP
6	Kota Mataram	SMPN 7 Mataram	Pemenang II Jenjang SMP
7	Lombok Timur	SMPN 1 Pringgabaya	Pemenang III Jenjang SMP
8	Lombok Timur	SMAN 2 Selong	Pemenang I Jenjang SMA
9	Kota Mataram	SMAN 4 Mataram	Pemenang II Jenjang SMA
10	Sumbawa Barat	SMAN 1 Jereweh	Pemenang III Jenjang SMA
11	Sumbawa	SMKN 3 Sumbawa	Pemenang I Jenjang SMK
12	Lombok Tengah	SMKN 1 Kopang	Pemenang II Jenjang SMK
13	Lombok Barat	SMKN 2 Gerung	Pemenang III Jenjang SMK



Gambar 31 Para Menang Diseminasi *Best Practices* SPMI Jenjang SMK

G. Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPMI di Sekolah Model

Tahapan akhir dari implemetasi SPMI tahun 2018 adalah monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pendampingan implementasi SPMI. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana keterlaksanaan implementasi SPMI yang dilakukan oleh sekolah model. Hasil monev ini akan dijadikan dasar untuk evaluasi dan perbaikan

pelaksanaan pendampingan implementasi SPMI pada tahun berikutnya. Instrumen yang digunakan dalam monev ini adalah instrumen yang dikembangkan Satuan Tugas Penjaminan Mutu Pendidikan Pusat. Analisis hasil monev dijelaskan secara rinci di BAB V.

Monev hanya dilakukan di sekolah model dan belum menyentuh sekolah imbas. Dari 150 sekolah model yang ada, sebanyak 130 sekolah model yang dikunjungi untuk dimonev. Komposisinya adalah 54 SD, 34 SMP, 26 SMA, dan 16 SMK. Ada 20 sekolah yang tidak dimonev karena beberapa sebab, yaitu 1) sebagian besar sekolah model yang ada di Kabupaten Lombok Utara sedang dalam masa pemulihan dari pascagempa bumi yang melanda daerah tersebut sehingga melumpuhkan kegiatan pendidikan termasuk implementasi SPMI. Hanya dua sekolah yang bias melanjutkan implementasi SPMI; 2) Beberapa sekolah model baru melaksanakan SPMI karena sekolah model tersebut adalah pengganti sekolah model lama yang beralih menjadi sekolah rujukan; 3) Ada sekolah model yang belum tuntas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan *in* dan *on*.

Instrumen yang digunakan untuk monev pelaksanaan SPMI di sekolah model adalah instrumen yang dikembangkan oleh Satgas penjaminan mutu pusat. Ada empat aspek yang dimonitoring, yaitu 1) proses pendampingan; 2) pemahaman sekolah tentang SPMI pendampingan; 3) hasil pelaksanaan SPMI. Responden dari monev tersebut adalah kepala sekolah dan TPMPS. Selain melakukan monitoring ke sekolah model, evaluasi pelaksanaan SPMI juga dilakukan oleh fasilitator daerah. Petugas monev terdiri atas pejabat struktural, widyaiswara, dan staf seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP NTB.

H. Pelaksanaan Siklus SPMI

Proses penjaminan mutu pendidikan yang terkait dengan identifikasi pencapaian dan prioritas bermanfaat untuk perbaikan pendidikan, menyediakan data untuk pembuatan keputusan berbasis bukti, dan membantu membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan. Identifikasi pencapaian tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan cara evaluasi internal oleh sekolah atau evaluasi diri sekolah (EDS). EDS adalah proses penilaian secara komprehensif atas komitmen sekolah terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. EDS merupakan instrumen bagi sekolah dalam menyusun peta mutunya secara internal. Proses EDS selanjutnya mengacu pada Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang meliputi lima siklus. Lihat Gambar 1 dan Gambar 8.

Bagian terpenting dalam siklus tersebut adalah pelaksanaan pemenuhan mutu. Pemenuhan mutu adalah upaya sekolah dalam melakukan perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan. Pada BAB II dan BAB III telah dijelaskan secara gamblang bagaimana proses pemetaan dilakukan dan bagaimana membaca peta mutu yang dihasilkan. Sebelum melaksanakan pemenuhan mutu, sekolah harus membuat laporan analisis yang berisi deskripsi, analisis, dan refleksi mengenai keadaan, kinerja, dan perangkat pendidikan di sekolah tersebut sebagai hasil kajian dan assesmen yang mendalam yang bersifat internal. Laporan tersebut merupakan dasar dalam peningkatan mutu dan penyusunan rencana kerja tahunan sekolah (RKT). Selain itu, laporan hasil pemetaan internal ini dapat menjadi sumber informasi kebijakan untuk penyusunan program pengembangan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi.

Data peta mutu yang dihasilkan melalui penilaian internal oleh sekolah dapat dimanfaatkan oleh sekolah dalam merumuskan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan tidak hanya sampai pada kriteria minimal SNP, tetapi bisa melebihi SNP. Rumusan itu meliputi kekuatan dan kelemahan sekolah tersebut yang berkaitan dengan pemenuhan 8 SNP. Sekolah dapat melihat potret dirinya dalam hal: (1) peta kompetensi lulusan yang dihasilkan; (2) kesesuaian dan relevansi kurikulum yang dimiliki sekolah untuk menghasilkan kompetensi lulusan yang diharapkan; (3) proses pendidikan yang telah dilaksanakan oleh sekolah dalam membentuk lulusan yang diharapkan; (4) pelaksanaan penilaian yang telah dilaksanakan oleh sekolah dan dampaknya dalam pada peningkatan proses pembelajaran; (5) kondisi pendidik dan tenaga kependidikan serta perannya dalam melakukan transformasi pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap siswa seperti yang diharapkan; (6) ketercukupan, kesesuaian, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan serta pembiayaan dalam pelaksanaan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan seperti yang diharapkan; dan (7) pengelolaan sumber daya sekolah yang menunjang pelaksanaan pendidikan yang bermutu.

Dalam melaksanakan pemenuhan mutu, sekolah harus memiliki data yang jelas sebagai pijakan dalam menentukan prioritas apa yang harus dikerjakan dalam memperbaiki mutu sekolah. Agar dapat menentukan prioritas dan rencana kegiatan yang harus dilakukan maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat analisis kekuatan dan kelemahan sekolah. Dalam hal ini, analisis kekuatan dan kelemahan dilakukan berdasarkan peta mutu sekolah. Sumber data dalam melakukan analisis kekuatan dan kelemahan tidak hanya dari rapor mutu tetapi juga berasal dari sumber lain seperti hasil akreditasi, hasil UN/ASBN, hasil uji kompetensi guru, dapodik, dll.

Analisis kekuatan dan kelemahan berbasis rapor mutu dilakukan pada bagian yang paling kecil yaitu subindikator pada masing-masing indikator dari setiap standar. Kategorisasi kekuatan dan kelemahan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a) Bila sub indikator pada tiap indikator berada pada zona bintang 1, 2, 3, maka semuanya dikelompokkan ke zona lemah.
- b) Bila subindikator pada tiap indikator berada pada zona bintang 1, 2, 3, 4, dan 5, maka bintang 1, bintang 2, dan bintang 3 dikelompokkan ke zona lemah, sedangkan untuk bintang 4 dan bintang 5 dikelompokkan ke zona kuat.
- c) Bila subindikator pada tiap indikator berada pada bintang 4 dan 5, maka subindikator 4 dikelompokkan dalam zona lemah.
- d) Bila subindikator pada tiap indikator hanya berada pada bintang 4 atau bintang 5, maka digunakan pendekatan belah 2.

Jika ada nilai subindikator yang bertentangan dengan fakta di sekolah maka keputusan apakah subindikator itu masuk kategori kekuatan atau kelemahan didasarkan pada hasil perbandingan antara kondisi ideal yang tercantum dalam indikator mutu dengan kondisi sebenarnya. Misalnya, ada subindikator pada hasil pemetaan nilainya sangat tinggi tetapi setelah disandingkan dengan kondisi riil di lapangan bertolak belakang maka subindikator tersebut masuk kelemahan. Sebaliknya, jika ada subindikator yang memiliki nilai rendah berdasarkan hasil pemetaan tetapi faktanya tidak demikian maka subindikator tersebut dimasukkan dalam kategori kekuatan. Namun, hal yang harus diutamakan ketika menggunakan ketentuan tambahan ini adalah kejujuran dari warga sekolah dalam membuat keputusan. Ketidakjujuran dalam membuat keputusan akan membuat hasil analisis menjadi kurang valid.

Contoh berikut menggambarkan hasil analisis kekuatan dan kelemahan suatu sekolah model jenjang SMP. Pada contoh ini, hanya standar isi yang dianalisis karena analisis untuk 7 standar yang lain prosesnya sama. Format yang digunakan dalam contoh tersebut bukan merupakan format baku sehingga format itu dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Langkah-langkah penyiapan dokumen pelaksanaan siklus SPMI secara lengkap tidak dibahas dalam laporan ini. Langkah detail pelaksanaan SPMI dituangkan dalam laporan lain yang merupakan panduan pelaksanaan SPMI. Hal yang perlu digarisbawahi adalah contoh yang ditampilkan dalam laporan ini merupakan contoh penyiapan instrumen pelaksanaan pemenuhan mutu di sekolah. Titik beratnya bukan pada proses menyiapkan dokumen, tetapi bagaimana dokumen itu ditindaklanjuti dan dilaksanakan serta dievaluasi untuk memenuhi atau melampaui SNP di satuan pendidikan. Tabel 23. Menunjukkan rapor mutu tahun 2017 pada standar isi sebagai sumber analisis kekuatan dan kelemahan sekolah yang memiliki rapor mutu tersebut.

Tabel 23 Rapor Mutu untuk Standar Isi SMPN 1 Sakra

Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
2.	Standar Isi	4,88	***
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	3,57	**
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	2,86	**
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	3,87	***
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	3,51	**
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	3,65	**
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	3,96	***
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	4,96	***
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	4,02	***
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	7	*****
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan	3,29	**
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	5,52	****
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	6,11	****
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	6,99	*****
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	5,52	****
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	5,04	***
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6,91	*****

Tabel 24 Hasil Anlisis Kekuatan dan Kelemahan Standar

No	Indikator	Kekuatan	Kelemahan
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan		Memuat karakteristik kompetensi sikap (2,6); Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan (3,7); Memuat karakteristik kompetensi keterampilan (3,51); Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa (3,65); Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran (3,96)
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan (7); Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan (5,52)	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum (4,02); Melewati tahapan operasional pengembangan (3,29)
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku (6,99); Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa (6,91).	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi (5,52); Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal (5,04).

Langkah selanjutnya adalah membuat deskripsi masalah dan akar permasalahan mutu berdasarkan hasil analisis kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan pemetaan masalah dan akar permasalahan tersebut kemudian dibuat rencana program perbaikan. Hasilnya seperti ditunjukkan pada Tabel 25 dan Tabel 26.

Tabel 25 Analisis Masalah dan Akar Masalah serta Rekomendasi Perbaikan

Masalah	Akar Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan	Arah Kebijakan/ Program	Strategi/ Kegiatan
Perangkat pembelajaran belum sesuai rumusan kompetensi lulusan	Perangkat pembelajaran guru belum sepenuhnya Memuat karakteristik kompetensi sikap (2,6); Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan (3,7); Memuat karakteristik kompetensi keterampilan (3,51); Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa (3,65); Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran (3,96)	- Perlu mengembangkan kurikulum yang memuat karakteristik kompetensi sikap, pengetahuan dan kompetensi keterampilan, secara optimal - Dalam mengembangkan dan melaksanakan kurikulum sekolah perlu mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	- Pengembangan perangkat pembelajaran - Pengaturan beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi (Tatap Muka, TT dan KMTT)	- Workshop pengembangan perangkat pembelajaran yang memuat karakteristik kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan - Validasi perangkat pembelajaran oleh kepala sekolah - Penyusunan Dokumen TT dan KMTT
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan belum dikembangkan sesuai prosedur	- Sekolah belum optimal Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum (4,02); - Penyusunan KTSP belum Melewati tahapan operasional pengembangan (3,29) secara lengkap	- Perlu melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum, dan disesuaikan dengan tahapan operasional pengembangannya	- Pengembangan KTSP sesuai prosedur	- Verifikasi perangkat KTSP oleh pengawas pembina - Reviu Dokumen KTSP tahun sebelumnya - Workshop penyusunan KTSP yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pengaturan beban pembelajaran - Validasi dokumen KTSP setiap satuan pendidikan - Pengesahan dokumen KTSP
Sekolah belum sepenuhnya melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	- Pengaturan beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi belum maksimal; - Penyelenggaraan aspek kurikulum pada muatan lokal belum maksimal.	- Perlu Pengaturan beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	- Pengaturan beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi belum	- Validasi dokumen pembelajaran TM, TT, KMTT

Tabel 26 Analisis Kekuatan dan Kelemahan serta Rekomendasi Perbaikan

STANDAR	ANALISIS LINGKUNGAN		MASALAH	AKAR PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	Kekuatan	Kelemahan			
ISI	1) Perangkat pembelajaran yang disusun guru sesuai rumusan kompetensi lulusan 2) Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan 3) Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	1) KTSP belum dikembangkan sesuai prosedur 2) Sekolah jarang melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 3) Perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan belum dikembangkan secara optimal. 4) Sekolah belum mengatur beban belajar berdasarkan kebutuhan	1. Sekolah belum bisa menjamin bahwa perangkat pembelajaran yang disusun guru sudah benar-benar sesuai dengan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan, mengingat standar kompetensi lulusan pada dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan belum memenuhi SNP. 2. Belum optimalnya pelibatan 3. Perangkat KTSP belum dikembangkan sesuai ketentuan 4. Kegiatan pembelajaran yang tertuang dalam KTSP masih fokus pada kegiatan tatap muka dan belum memaksimalkan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.	1. Pemahaman guru terkait kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa belum menyeluruh 2. Kemampuan guru dalam menyusun Perangkat pembelajaran (sikap, pengetahuan dan keterampilan) yang meliputi program tahunan, program semester, silabus, RPP, buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran, lembar tugas terstruktur dan kegiatan mandiri, handout, alat evaluasi dan buku nilai belum optimal. 3. Unsur dalam tim kurikulum sekolah. 4. Masih ada guru yang tidak menyusun sendiri rencana pembelajarannya. 5. Bentuk pendalaman materi yang dilakukan pendidik lebih terfokus pada kegiatan tatap muka.	1. Perlu dikembangkan Perangkat pembelajaran berbasis PPK 2. Perlu penyusunan Perangkat pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan 3. KTSP harus dikembangkan sesuai prosedur, yakni: 1) Memiliki tim yang bertugas mengembangkan kurikulum sekolah, 2) Tim Pengembang Kurikulum meliputi seluruh guru mata pelajaran, konselor atau guru Bimbingan dan Konseling, dan komite sekolah atau penyelenggara pendidikan dibuktikan dengan dokumen penugasan, 3) Sekolah memiliki pedoman 4. Perlu mengoptimalkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP 5. Perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan perlu dikembangkan dengan melewati tahapan operasional pengembangan, yaitu: 1) Tahapan analisis, 2) Tahapan Penyusunan, 3) Tahapan penetapan yang dilakukan kepala sekolah berdasarkan hasil rapat dewan pendidik sekolah dengan melibatkan komite sekolah, 4) Tahapan pengesahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya 6. Sekolah harus Memiliki perangkat kurikulum meliputi: • Pedoman kurikulum • Pedoman muatan lokal • Pedoman kegiatan ekstrakurikuler 7. Sekolah perlu mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi berupa kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur 8. Perlu ada workshop pengembangan tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
					• Pedoman pembelajaran • Pedoman penilaian hasil belajar oleh pendidik • Pedoman bimbingan dan konseling • Pedoman evaluasi kurikulum • Pedoman pendampingan pelaksanaan kurikulum • Pedoman pendidikan kepramukaan

Langkah-langkah yang ditunjukkan pada Tabel 23-26 adalah langkah sederhana dalam merancang pelaksanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan internal. Ketika melaksanakan pemenuhan mutu, sekolah harus berpijak pada data hasil pemetaan dalam membuat perencanaan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS). Perencanaan tidak hanya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi tetapi juga untuk meningkatkan mutu sekolah. Pemetaan yang merupakan siklus awal dalam SPMI perlu dikaitkan dengan proses perencanaan sekolah karena sebagai kerangka kerja untuk perubahan dan perbaikan. Proses ini secara mendasar dapat menunjukkan seberapa baik kinerja sekolah, bagaimana sekolah mengetahui kinerjanya, serta bagaimana sekolah dapat meningkatkan kinerjanya. Hal ini berkaitan dengan kriteria untuk perencanaan pengembangan sekolah dan indikator yang relevan dengan SNP dan bukti-bukti apa saja yang dimiliki oleh sekolah yang dapat menunjukkan pencapaiannya.

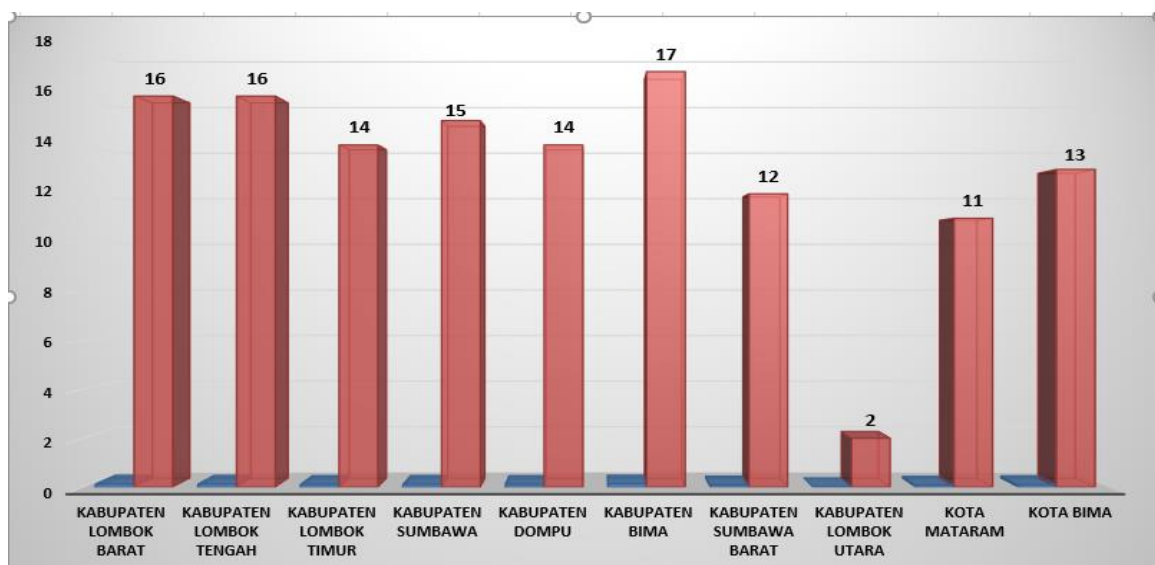
Agar pelaksanaan SPMI dapat menghasilkan dampak yang maksimal, maka pemetaan yang dilakukan sebagai siklus pertama SPMI harus dilakukan dengan motivasi intrinsik dan semua pihak, khususnya pimpinan sekolah harus mendukung penuh. Pemetaan tersebut agar dilakukan secara objektif, jujur, bertanggung jawab, dan akuntabel karena hasilnya akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan sekolah, dasar dalam menetapkan solusi permasalahan serta memilih solusi yang efektif dan efisien, menyusun strategi dan rencana pengembangan dan perbaikan program sekolah secara berkelanjutan.

BAB V

ANALISIS HASIL MONITORING DAN EVALUASI

A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Tahapan akhir dari implementasi SPMI tahun 2018 adalah monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pendampingan implementasi SPMI. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana keterlaksanaan implementasi SPMI yang dilakukan oleh sekolah model. Hasil monev ini akan dijadikan dasar untuk evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pendampingan implementasi SPMI pada tahun berikutnya. Instrumen yang digunakan dalam monev ini adalah instrumen yang dikembangkan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada tiga aspek yang dimonev, yaitu 1) proses pendampingan; 2) pemahaman sekolah tentang SPMI; dan 3) hasil implementasi SPMI. Responden dari monev tersebut adalah kepala sekolah dan TPMPS. Petugas monev terdiri atas pejabat struktural, widyaiswara, dan staf seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP NTB. Untuk kelengkapan data, evaluasi pelaksanaan SPMI juga dilakukan oleh fasilitator daerah.



Gambar 32 Distribusi Sekolah Model Sasaran Monev SPMI

Monev hanya dilakukan di sekolah model dan belum menyentuh sekolah imbas. Dari 150 sekolah model yang ada, sebanyak 130 sekolah model yang dikunjungi untuk dimonev dan tersebar di 10 kabupaten/kota dengan distribusi seperti ditunjukkan pada Gambar 32. Komposisinya adalah 54 SD, 34 SMP, 26 SMA, dan 16 SMK. Ada 20 sekolah yang tidak

dimonev karena beberapa sebab, yaitu 1) sebagian besar sekolah model yang ada di Kabupaten Lombok Utara sedang dalam masa pemulihan dari pascagempa bumi yang melanda daerah tersebut sehingga melumpuhkan kegiatan pendidikan termasuk implementasi SPMI. Hanya dua sekolah yang bisa melanjutkan implementasi SPMI; 2) Beberapa sekolah model baru melaksanakan SPMI karena sekolah model tersebut adalah pengganti sekolah model lama yang beralih menjadi sekolah rujukan; 3) Ada sekolah model yang belum tuntas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan *in* dan *on* saat monev dilaksanakan.

B. Hasil Monitoring dan Evaluasi

a. Proses Pelaksanaan Pendampingan SPMI

Selama melaksanakan siklus SPMI, sekolah model didampingi oleh setiap fasilitator daerah. Secara umum fasilitator daerah yang mendampingi sekolah model memiliki kompetensi yang baik dalam memberikan layanan teknis kepada sekolah model. Pendampingan implementasi SPMI rata-rata dilakukan sebanyak 3 kali. Pendampingan dilakukan saat pelaksanaan *in* dan *on*. Pada Bab IV telah dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan pendampingan *in* dan *on*. Pola pendampingan *in* dan *on* ini dianggap efektif oleh sebagian besar sekolah model. Pola ini memberikan kesempatan bagi sekolah model untuk internalisasi implementasi SPMI secara mandiri.

Berdasarkan hasil monitoring, secara umum sekolah model telah melaksanakan proses implementasi SPMI sesuai dengan pedoman yang ada. Sekolah model telah melakukan sosialisasi tentang SPMI kepada warga sekolah agar setiap unsur di sekolah model tersebut memiliki informasi yang cukup tentang SPMI. Mayoritas sekolah model melibatkan unsur-unsur seperti pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan perwakilan orang tua dalam implementasi SPMI di sekolah masing-masing dalam melakukan evaluasi diri sekolah, perencanaan pemenuhan mutu sekolah, dan pelaksanaan pemenuhan mutu sekolah. Namun, pelibatan perguruan tinggi, dunia usaha/industri, lembaga pemeritahan, dan masyarakat sekitar dalam implementasi SPMI oleh sekolah model masih sangat rendah, kurang dari 25%. Hal yang perlu menjadi perhatian lebih adalah pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPMI di sekolah model yang cukup rendah. Rata-rata 16% sekolah model yang melibatkan pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan implementasi SPMI. Perhatikan data pada Gambar 33.



Gambar 33 Tingkat Keterlibatan Stake Holder Pendidikan dalam Pelaksanaan SPMI

Data pada Tabel 27 menunjukkan bentuk keterlibatan semua *stake holder* pendidikan dalam pelaksanaan SPMI di sekolah model. Berdasarkan data pada tabel tersebut, mayoritas sekolah model melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan komite sekolah/orang tua dalam berbagai kegiatan pelaksanaan SPMI sesuai dengan perannya masing-masing. Hal yang menarik adalah beberapa sekolah model memasukkan unsur perwakilan masyarakat (25 sekolah model), dunia usaha dan dunia industri (8 sekolah model), serta pemerintah daerah (17 sekolah model) dalam tim penjaminan mutu sekolah. Keterlibatan unsur-unsur tersebut dalam tim penjaminan mutu pendidikan sekolah tentu

diharapkan dapat memudahkan sekolah model dalam menjalankan pemenuhan mutu sekolah sehingga terjadi akselerasi terbentuknya budaya mutu di sekolah karena ada kontrol dari pihak luar. Namun, cukup banyak sekolah model yang belum melibatkan unsur perwakilan masyarakat (52 sekolah model), dunia usaha dan dunia industri (80 sekolah model), serta pemerintah daerah (39 sekolah model) dalam berbagai kegiatan implementasi SPMI.

Tabel 27 Bentuk Keterlibatan *Stake Holder* Pendidikan dalam Pelaksanaan SPMI

Bentuk Keterlibatan	Kepala Sekolah	Pengawas Sekolah	Guru	Komite/ Orang Tua	Perwakilan Masyarakat	DUDI	Pemerintah Daerah
Belum ada	0.00%	0.00%	0.00%	3.08%	40.31%	62.50%	30.23%
Hadir dalam aktivitas sistem penjaminan mutu internal	98.46%	95.38%	99.23%	84.62%	35.66%	12.50%	49.61%
Tergabung dalam tim penjaminan mutu sekolah	100.00%	76.15%	96.92%	71.54%	19.38%	6.25%	13.18%
Memberikan pendapat dan penilaian terhadap kondisi sekolah	95.38%	89.23%	96.15%	87.69%	49.61%	17.19%	41.86%
Mengusulkan kontribusi yang akan diberikan	89.23%	76.92%	90.00%	76.15%	37.21%	17.19%	32.56%
Menyepakati kerjasama dengan sekolah	88.46%	65.38%	75.38%	64.62%	24.81%	18.75%	25.58%
Menjalankan kesempatan yang ditetapkan untuk penjaminan mutu	87.69%	66.92%	87.69%	58.46%	27.13%	10.16%	18.60%
Menjadi penanggungjawab kegiatan pemenuhan mutu	96.15%	36.92%	40.00%	20.00%	6.98%	4.69%	13.18%
Mitra kerjasama kegiatan pemenuhan mutu	73.08%	66.15%	63.85%	60.00%	40.31%	27.34%	45.74%
Lainnya	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.78%	0.78%

Pola pendampingan yang diberikan oleh para fasilitator daerah kebanyakan dalam bentuk layanan konsultasi dan diskusi bersama dalam kerja kelompok. Cara ini dianggap paling efektif dalam pelaksanaan pendampingan. Materi pendampingan yang pelaksanaannya lebih banyak pada saat jam efektif sekolah tapi di luar jam pembelajaran tersebut fokus membahas beberapa hal seperti: pelaksanaan evaluasi diri sekolah, penyusunan perencanaan program pemenuhan mutu; bedah, penyusunan dan perbaikan dokumen sekolah; penjaringan keterlibatan pemangku kepentingan dalam program sekolah; pembentukan tim penjaminan mutu sekolah; pengembangan pengelolaan keuangan; pengembangan pengelolaan sarana prasarana; pengembangan pembelajaran intra dan ekstrakurikuler, pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Materi-materi tersebut selain materi yang ditetapkan dalam siklus SPMI tetapi ada juga materi hasil pengembangan masing-masing sekolah model.

Hasil evaluasi proses pendampingan menggambarkan bahwa sekolah model mengharapkan agar pendampingan SPMI dilakukan secara berkesinambungan dengan frekuensi yang lebih sering. Materi pendampingan agar lebih substantif dan aplikatif, tidak lagi didominasi oleh teori. LPMP perlu mengawal kualitas penyelenggaraan pendampingan oleh sekolah model agar dapat menghasilkan luaran yang maksimal dan bisa berdampak nyata bagi perbaikan mutu sekolah. Selain itu, agar proses pendampingan lebih efektif, pelibatan pengawas pembina sekolah model dalam pendampingan perlu dioptimalkan. Pendampingan tidak hanya dilakukan oleh fasilitator daerah, tetapi juga oleh pengawas pembina, baik pengawas pembina sekolah model maupun pengawas pembina sekolah imbas. Fokus pendampingan tidak hanya di sekolah model sebagai penerima dana bantuan pemerintah, tetapi pendampingan di sekolah imbas juga perlu ditingkatkan frekuensi dan kualitasnya.

b. Pemahaman Sekolah tentang SPMI

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab IV bahwa pendampingan implementasi SPMI di sekolah model dan sekolah imbas dilaksanakan dengan pola *in* dan *on*. Pendampingan *in* dilaksanakan dua kali dan terpusat di sekolah model dengan mengundang seluruh anggota dari sekolah imbas. Sedangkan pendampingan *on* dilaksanakan di masing-masing sekolah secara terpisah. Pada saat *in*, anggota TPMPs dari setiap sekolah diberikan bimtek tentang bagaimana melakukan analisis peta mutu sekolah dan penyusunan rencana pemenuhan mutu. Setiap sekolah kemudian menindaklanjuti hasil bimtek pada waktu *in* di sekolah masing-masing.

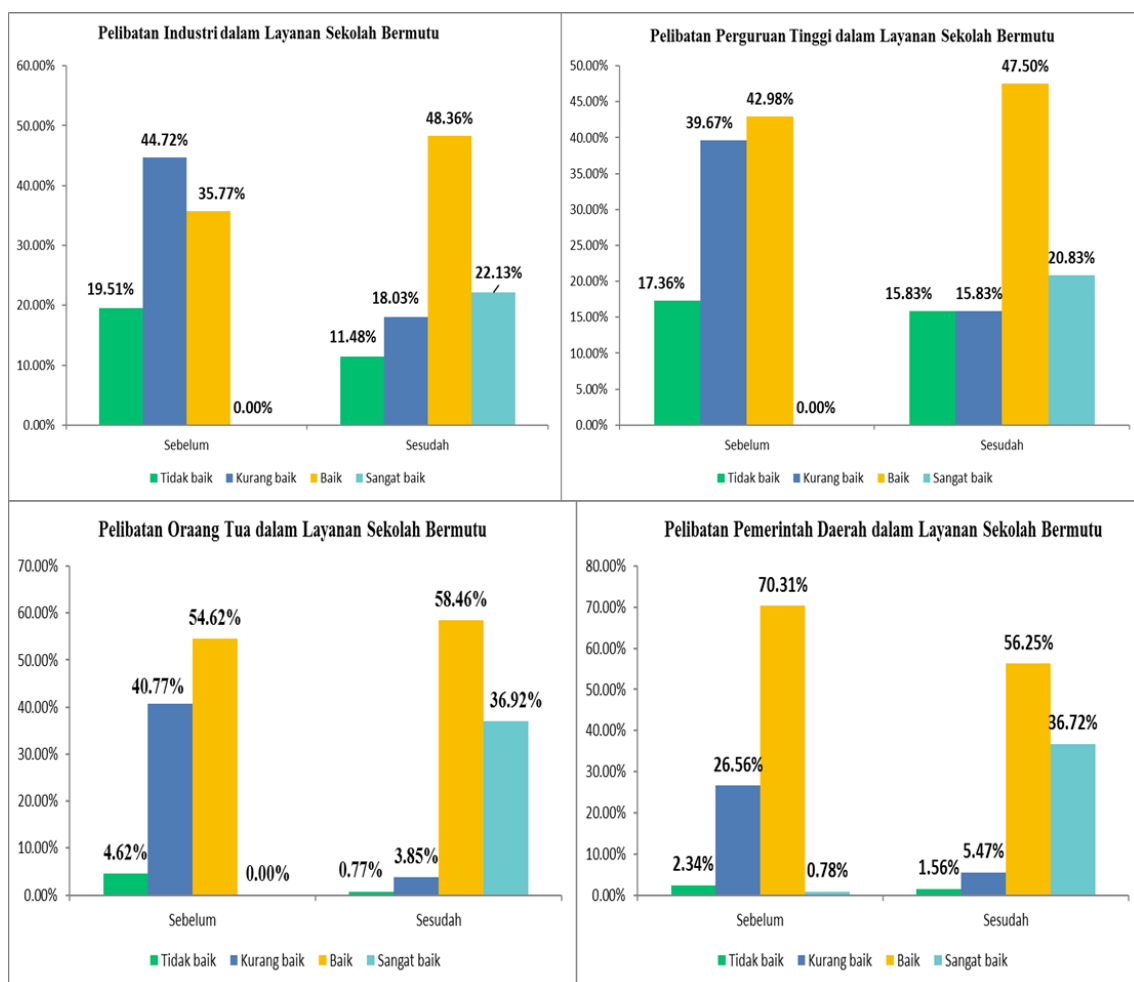
Selama proses pelaksanaan pemenuhan mutu ini, setiap sekolah, baik sekolah model maupun sekolah imbas, didampingi oleh kepala sekolah model dan fasilitator daerah. Pada saat pendampingan ini, fasilitator daerah memeriksa keterlaksanaan program pemenuhan mutu yang telah dirancang sebelumnya sekaligus memberikan asistensi kepada tim penjaminan mutu pendidikan sekolah terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami selama pelaksanaan pemenuhan mutu. Selain itu, segala proses dalam pelaksanaan pemenuhan mutu dievaluasi kemudian dijadikan dasar untuk memperbaiki yang kurang. Tujuan kegiatan pendampingan SPMI saat *on* dilaksanakan di sekolah model dan sekolah imbas adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi sekolah untuk bereksplorasi dengan data-data yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Selain itu, sekolah imbas dapat melibatkan lebih banyak lagi TPMPS dalam melaksanakan peningkatan mutu di sekolah sehingga masing-masing memiliki rasa tanggung jawab dalam memajukan sekolah.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa secara kuantitatif hampir 64% sekolah menyatakan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tujuan pendidikan nasional, standar nasional pendidikan serta bagaimana penyelenggaraan pendidikan yang baik setelah mendapatkan pendampingan SPMI. Sisanya, sebanyak 36% mengaku memiliki pemahaman yang baik. Tingkat pemahaman sekolah yang sangat baik tentang sistem pendidikan nasional sedikit berbeda dengan tingkat pemahaman sekolah tentang SPMI. Hanya 45% sekolah menyatakan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang SPMI, sisanya 55% pemahamannya baik. Tingkat pemahaman sekolah tentang SPMI ini sejalan dengan kemampuan sekolah dalam melaksanakan seluruh rangkaian siklus SPMI. Dari 130 sekolah yang dievaluasi, sebanyak 42% sekolah model yang menyatakan memiliki kemampuan yang sangat baik. Sisanya, 58% menyatakan kemampuannya baik.

c. Hasil Implementasi SPMI

Tujuan jangka panjang implementasi SPMI adalah terbentuknya budaya mutu di sekolah. Budaya mutu sudah berlangsung di sekolah jika seluruh warga sekolah memiliki kesadaran yang tinggi dalam memberikan layanan bermutu sesuai SNP. Layanan bermutu tersebut berlangsung secara mandiri tanpa harus menunggu intervensi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Selain itu, budaya mutu menuntut satuan pendidikan memberikan layanan bermutu sesuai SNP secara mandiri dan berkelanjutan. Agar budaya mutu dapat terbentuk dengan baik, komitmen antarwarga sekolah dalam mendukung layanan sekolah bermutu harus baik. Komitmen warga sekolah ini harus dibangun atas

dasar keterbukaan, kepedulian, dan kerja sama antarwarga sekolah dalam memberikan layanan bermutu sesuai SNP. Hasil monev menunjukkan bahwa setelah melaksanakan SPMI, secara kuantitatif, hampir semua sekolah model menyadari pentingnya memberikan layanan bermutu secara mandiri dan berkelanjutan sesuai SNP. Kesadaran ini didukung oleh tingginya komitmen antarwarga sekolah dalam melaksanakan budaya mutu di sekolah. Kerja sama antarwarga sekolah terjalin dengan baik yang didasari oleh keterbukaan dan kepedulian dalam memenuhi SNP.



Gambar 34 Tingkat Pelibatan *Stake Holder* Pendidikan dalam Layanan Sekolah Bermutu

Terciptanya budaya mutu di sekolah tidak bisa berjalan sendiri tanpa pelibatan *stake holder* di luar sekolah. Sekolah perlu melibatkan orang tua siswa dalam mendukung layanan sekolah yang bermutu. Guna membangun jejaring dan menguatkan sumber daya manusia yang dimiliki sekolah, sekolah perlu menjalin kerja sama dengan kalangan industri dan perguruan tinggi. Selain itu, dukungan masyarakat sekitar sekolah dan tidak

kalah pentingnya adalah dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu juga sangat diperlukan. Berdasarkan hasil monev, sekitar 30% sekolah model menyatakan peran perguruan tinggi dan kalangan industri masih kurang baik. Untuk itu, sekolah model perlu terus menjalin komunikasi dengan pihak luar, khususnya dunia usaha dan dunia industri serta perguruan tinggi sehingga layanan sekolah bermutu dapat berjalan dengan maksimal.

Implementasi SPMI merupakan langkah terpadu dalam memenuhi SNP. Sekolah harus memastikan bagaimana mutu proses pembelajaran yang diberikan oleh sekolah terhadap SNP. Mutu proses pembelajaran yang baik akan didukung oleh materi pembelajaran yang baik dan diajarkan oleh tenaga kependidikan dengan kualitas yang baik pula. Untuk mencapai itu semua, dukungan sarana prasarana pendidikan sangat penting di bawah manajemen pengelolaan sekolah yang baik. Hasil monev menunjukkan bahwa setelah melaksanakan SPMI, hampir semua sekolah model menyatakan bahwa mutu pada setiap standar SNP telah tercapai dengan baik.

Secara kuantitatif, tingkat pemahaman sekolah tentang SPMI rata-rata baik. Namun, sekolah belum maksimal dalam melaksanakan setiap siklus SPMI. Sekolah belum bisa melakukan tahapan SPMI secara mandiri dan tahapan siklus SPMI cenderung dilakukan sebatas administrasi. Dalam tiga tahun pemetaan, hasil pemetaan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. *Pertama*, kepala sekolah dan TPMPS belum memahami secara utuh tentang pentingnya SPMI sehingga motivasi untuk melaksanakan SPMI kurang maksimal. *Kedua*, adanya kepala sekolah model yang belum definitif sehingga yang bersangkutan ragu dalam mengambil keputusan yang berdampak pada pelaksanaan SPMI di sekolah tersebut. *Keempat*, adanya pergantian kepala sekolah sehingga kepala sekolah yang baru belum memahami SPMI yang berakibat pada pelaksanaan SPMI yang kurang terarah.

Kelima, pengawas pembina sekolah model maupun sekolah imbas tidak terlibat secara aktif dalam mengawal SPMI di sekolah binaannya masing-masing. *Keenam*, kompetensi pengawas pembina relatif beragam dalam memahami SPMI yang berdampak pada kualitas pelaksanaan SPMI. *Ketujuh*, anggota TPMPS yang hadir pada setiap kegiatan SPMI sering tidak sama sehingga informasi yang diterima tidak utuh dan menyebabkan terkendalanya pelaksanaan SPMI. *Kedelapan*, tidak semua rencana pemenuhan mutu

yang tertuang di dalam RKS/RKAS dapat terlaksana mengingat rencana kerja sekolah masih menggunakan tahun pelajaran (kecuali RKAS BOS). *Kesembilan*, kurangnya waktu untuk latihan dan internalisasi bagi setiap komponen sekolah dalam memahami dan menerapkan kerangka kerja SPMI karena. *Kesepuluh*, dana bantuan pemerintah yang minim untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan SPMI yang melibatkan sekolah imbas.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Proses penjaminan mutu pendidikan yang terkait dengan identifikasi pencapaian dan prioritas bermanfaat untuk perbaikan pendidikan, menyediakan data untuk pembuatan keputusan berbasis bukti, dan membantu membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan. Identifikasi pencapaian tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan cara evaluasi internal oleh sekolah atau evaluasi diri sekolah (EDS). EDS adalah proses penilaian secara komprehensif atas komitmen sekolah terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. EDS merupakan instrumen bagi sekolah dalam menyusun peta mutunya secara internal. Peta mutu setiap sekolah kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan peta mutu wilayah, baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional.

LPMP NTB telah mengawal pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan mulai dari pengumpulan data peta mutu, pemetaan mutu, implementasi SPMI, dan melakukan monev terhadap pelaksanaan SPMI oleh sekolah model. Seluruh kegiatan tersebut telah dipaparkan pada BAB-BAB sebelumnya. Berikut adalah hasil yang menjadi kesimpulan dalam laporan ini.

a. Peta Mutu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jenjang SD

Secara umum, capaian mutu Propinsi NTB di setiap jenjang pada tahun 2018 dalam kategori “menuju SNP 4”. Belum ada sekolah yang mencapai kategori SNP. Pada jenjang SD, dari 2.692 sekolah yang terdaftar dalam progres pengiriman data PMP, sebanyak 78% sekolah memiliki kategori “menuju SNP 4”. Sisanya, tersebar pada kategori yang lain di bawah kategori “menuju SNP 4”. Sebanyak 483 sekolah yang belum memiliki rapor mutu karena ada yang tidak mengirim (188 sekolah) dan ada yang belum keluar peta mutunya (295 sekolah). Rata-rata capaian mutu dari 8 SNP sebesar 5.97, kategori “menuju SNP 4”. Ada tiga standar yang memenuhi SNP, yaitu standar kompetensi lulusan (6.95), standar proses (6.97), dan standar penilaian pendidikan (6.75). Tiga standar lain yaitu, standar isi, standar pengelolaan pendidikan, dan standar pembiayaan meskipun belum mencapai SNP, memiliki capaian yang cukup tinggi masing-masing 6.52, 6.15, dan 6.49. Capaian

tiga standar ini relatif konsisten dengan tiga standar sebelumnya yang sudah SNP. Sisanya, dua standar yang lain, yaitu standar sarana dan prasarana pendidikan serta standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), memiliki capaian yang cukup rendah, masing-masing 4.04 dan 3.91.

Jenjang SMP

Sebanyak 518 sekolah atau sekitar 69% dari jumlah sekolah yang diproses datanya memiliki capaian SNP dalam kategori “menuju SNP”. Kategori ini mendominasi capaian SNP di jenjang SMP pada tahun 2018. Sisanya terdistribusi pada kategori-kategori lain di bawah “menuju SNP 4”. Ada 72 sekolah yang tidak mengirim data PMP dan 75 sekolah sudah mengirim data, tetapi belum keluar peta mutunya. Secara umum, rata-rata capaian mutu SNP pada jenjang SMP sebesar 5.92, kategori “menuju SNP 4”. Sebanyak empat standar telah mencapai SNP, yaitu standar kompetensi lulusan (6.94), standar isi (6.84), standar proses (6.98), dan standar penilaian pendidikan (6.77). Dua standar masuk kategori “menuju SNP 4”, yaitu standar pembiayaan (6.08) dan standar pengelolaan pendidikan (6.48). Standar sarana dan prasarana pendidikan serta standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), memiliki capaian yang cukup rendah, masing-masing 3.97 dan 3.32. capaian untuk dua standar ini lebih rendah dari capaian tahun 2017. Bahkan, capaian standar sarana dan prasarana pendidikan lebih rendah dari capaian pada tahun 2016.

Jenjang SMA

Secara umum memiliki nilai rata-rata nilai capaian SNP tahun 2018 sebesar 6.02, kategori “menuju SNP 4”. Empat standar memiliki capaian memenuhi SNP, yaitu standar standar kompetensi lulusan (6.95), standar isi (6.74), standar proses (6.98), dan standar penilaian pendidikan (6.87). Dua standar masuk kategori “menuju SNP 4”, yaitu standar pembiayaan (6.17) dan standar pengelolaan pendidikan (6.50). Standar sarana dan prasarana pendidikan serta standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), memiliki capaian yang cukup rendah, masing-masing 3.57 dan 4.41. Jumlah sekolah yang mengirim dan diproses datanya sebanyak 245 sekolah. Sebanyak 46 sekolah tidak mengirim data dan 23 sekolah belum keluar peta mutunya. Dari 245 sekolah yang diproses datanya, sebanyak 79% memiliki kategori “menuju SNP 4” dan sisanya di bawah kategori itu.

Jenjang SMK

Jumlah sekolah yang telah mengirim data dan diproses peta mutunya sebanyak 202 sekolah. Sebanyak 30 sekolah yang tidak mengirim dan 19 sekolah telah mengirim data, tetapi peta mutunya gagal diproses oleh server PMP. Peta mutu untuk jenjang SMK didominasi pada kategori “menuju SNP 4”. Sebanyak 107 sekolah dari 202 sekolah yang mengirim dan diproses peta mutunya memiliki capaian “menuju kategori 4”. Capaian mutu jenjang SMK pada tahun 2018 sebesar 5.78, kategori “menuju SNP 4”. Empat standar memiliki capaian memenuhi SNP, yaitu standar kompetensi lulusan (6.94), standar isi (6.71), standar proses (6.97), dan standar penilaian pendidikan (6.92). Dua standar masuk kategori “menuju SNP 4”, yaitu standar pembiayaan (6.50) dan standar pengelolaan pendidikan (6.1). Standar sarana dan prasarana pendidikan serta standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), memiliki capaian yang sangat rendah, masing-masing 2.74 dan 2.96. Capaian untuk kedua standar yang terakhir ini paling rendah dibandingkan capaian standar yang sama pada jenjang SD, SMP, dan SMA.

b. Peta Mutu Sekolah Model

Jenjang SD

Ada enam puluh sekolah model jenjang SD. Hasil pemetaan tahun 2018 menunjukkan sebanyak 49 sekolah model jenjang SD memiliki capaian dalam kategori “menuju SNP 4”, sisanya memiliki capaian SNP di bawah kategori tersebut. Ada 6 sekolah model SD yang tidak mengirim data atau belum keluar peta mutunya. Secara umum, capaian mutu sekolah model jenjang SD sebesar 5.50, pada kategori “menuju SNP 4”. Capaian ini lebih rendah dari capaian NTB dengan nilai sebesar 5.97 walaupun pada kategori yang sama. Nilai kedelapan standar SNP belum ada yang memenuhi SNP bahkan beberapa standar capaiannya lebih rendah dari capaian tahun 2017. Nilai masing-masing standar sebagai berikut. Standar kompetensi lulusan (6.10), standar isi (5.32), standar proses (6.35), standar penilaian pendidikan (5.92), standar PTK (4.26), standar sarana dan prasarana pendidikan (4.85), standar pengelolaan pendidikan (5.28), dan standar pembiayaan (5.92).

Jenjang SMP

Dari 38 sekolah model SMP, belum ada sekolah model yang memenuhi SNP. Mayoritas sekolah model jenjang SMP memiliki capaian “menuju SNP 4” pada tahun 2018. Ada 29 sekolah model yang memiliki kategori tersebut, sisanya memiliki capaian lebih rendah. Ada 5 sekolah model yang belum mengirim data atau belum keluar peta mutunya karena

gagal diproses oleh server. Nilai capaian SNP sekolah model jenjang SMP sebesar 5.51, lebih rendah dari capaian NTB sebesar 5.92. Nilai kedelapan standar SNP belum ada yang memenuhi SNP bahkan beberapa standar capaiannya lebih rendah dari capaian tahun 2017. Nilai masing-masing standar sebagai berikut. Standar kompetensi lulusan (6.24), standar isi (5.36), standar proses (6.35), standar penilaian pendidikan (5.87), standar PTK (3.82), standar sarana dan prasarana pendidikan (3.97), standar pengelolaan pendidikan (5.28), dan standar pembiayaan (6.04).

Jenjang SMA

Dari 28 sekolah model SMA, belum ada sekolah model yang memenuhi SNP. Mayoritas sekolah model jenjang SMA memiliki capaian “menuju SNP 4” pada tahun 2018. Ada 23 sekolah model yang memiliki kategori tersebut, sisanya memiliki capaian lebih rendah. Ada 3 sekolah model yang belum mengirim data atau belum keluar peta mutunya karena gagal diproses oleh server. Nilai capaian SNP sekolah model jenjang SMA sebesar 5.50, lebih rendah dari capaian NTB sebesar 6.02. Nilai kedelapan standar SNP belum ada yang memenuhi SNP bahkan beberapa standar capaiannya lebih rendah dari capaian tahun 2017. Nilai masing-masing standar sebagai berikut. Standar kompetensi lulusan (6.40), standar isi (5.24), standar proses (6.32), standar penilaian pendidikan (5.82), standar PTK (3.80), standar sarana dan prasarana pendidikan (5.27), standar pengelolaan pendidikan (5.13), dan standar pembiayaan (5.99).

Jenjang SMK

Dari 23 sekolah model SMK, belum ada sekolah model yang memenuhi SNP. Mayoritas sekolah model jenjang SMK memiliki capaian “menuju SNP 4” pada tahun 2018. Ada 18 sekolah model yang memiliki kategori tersebut, sisanya memiliki capaian lebih rendah. Nilai capaian SNP sekolah model jenjang SMK sebesar 5.24, lebih rendah dari capaian NTB sebesar 5.78. Nilai kedelapan standar SNP belum ada yang memenuhi SNP bahkan beberapa standar capaiannya lebih rendah dari capaian tahun 2017. Nilai masing-masing standar sebagai berikut. Standar kompetensi lulusan (6.17), standar isi (5.06), standar proses (6.26), standar penilaian pendidikan (5.79), standar PTK (3.81), standar sarana dan prasarana pendidikan (3.75), standar pengelolaan pendidikan (5.19), dan standar pembiayaan (5.89).

c. Indeks Efektivitas Penjaminan Mutu Pendidikan

Indeks Efektivitas (IE) adalah perbandingan jumlah sekolah model yang mengalami kenaikan capaian mutu terhadap total sekolah model yang memiliki rapor mutu pada rentang waktu pemetaan tertentu. IE dinyatakan dalam bentuk persentase. Perhitungan IE didasarkan pada sekolah model yang memiliki rapor mutu. IE penjaminan mutu pendidikan untuk jenjang SD sebesar 59.61%. Artinya, sebanyak 59.61% sekolah model jenjang SD yang mengalami kenaikan capaian mutu secara konsisten selama rentang 2016 – 2018, sisanya memiliki capaian mutu yang fluktuatif. Untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK sebesar 50%, 56.52%, dan 33.33% sekolah model pada masing-masing jenjang yang konsisten menunjukkan perbaikan selama 3 tahun.

d. Komparasi Hasil Pemetaan dengan Hasil Akreditasi oleh BAN-S/M

Penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan baik secara internal oleh setiap satuan pendidikan maupun secara eksternal yang dilakukan oleh BAN-S/M bertujuan untuk mengetahui apakah satuan pendidikan atau program telah memenuhi atau melampaui SNP. Keduanya mengukur hal yang sama, yaitu sejauh mana suatu satuan pendidikan telah memenuhi SNP. SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Hasil komparasi menunjukkan bahwa mayoritas nilai capaian mutu sekolah model pada semua jenjang jika dikonversi ke skala akreditasi menunjukkan hasil yang lebih rendah dari hasil akreditasi. Terjadinya perbedaan antara hasil penilaian internal dengan hasil penilaian eksternal perlu pendalaman lebih lanjut penyebabnya.

e. Implementasi SPMI di Sekolah Model

Pelaksanaan SPMI di sekolah model mengacu pada Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 yang meliputi lima siklus. Pendampingan implementasi SPMI pada tahun 2018 dilakukan dengan pola *in service-on service-in service*. Pola ini memberikan kesempatan lebih luas bagi sekolah dalam melaksanakan siklus SPMI. Pada saat *in service* 1, materi yang dibahas secara umum adalah seluruh siklus SPMI. Namun, titik berat yang dibahas adalah pemetaan mutu dan penyusunan rencana pemenuhan mutu. Tiga siklus yang lain dibahas pada waktu *on* dan *in service* 2. Selama proses implementasi SPMI, setiap sekolah model dan sekolah imbas didampingi oleh fasilitator daerah. Fasilitator daerah terdiri atas unsur pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru berprestasi pada setiap jenjang sekolah model. Setiap fasilitator daerah mendampingi 2–3 sekolah model beserta sekolah imbas

dari masing-masing sekolah model tersebut. Hasil implementasi SPMI kemudian didesiminasikan oleh seluruh sekolah model, minimal ke sekolah imbas. Ada 40 sekolah model yang menyampaikan diseminasi di tingkat provinsi.

Bagian terpenting dalam siklus SPMI adalah pelaksanaan pemenuhan mutu yang merupakan upaya sekolah dalam melakukan perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan. Sebelum melaksanakan pemenuhan mutu, sekolah harus membuat laporan analisis yang berisi deskripsi, analisis, dan refleksi mengenai keadaan, kinerja, dan perangkat pendidikan di sekolah tersebut sebagai hasil kajian dan assesmen yang mendalam dan bersifat internal. Laporan tersebut menjadi dasar dalam peningkatan mutu dan penyusunan rencana kerja sekolah. Selain itu, laporan hasil pemetaan internal ini dapat menjadi sumber informasi kebijakan untuk penyusunan program pengembangan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi.

Data peta mutu yang dihasilkan melalui penilaian internal oleh sekolah dapat dimanfaatkan oleh sekolah dalam merumuskan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan tidak hanya sampai pada kriteria minimal SNP, tetapi bisa melebihi SNP. Rumusan itu meliputi kekuatan dan kelemahan sekolah tersebut yang berkaitan dengan pemenuhan 8 SNP. Sekolah dapat melihat potret dirinya dalam hal: (1) peta kompetensi lulusan yang dihasilkan; (2) kesesuaian dan relevansi kurikulum yang dimiliki sekolah untuk menghasilkan kompetensi lulusan yang diharapkan; (3) proses pendidikan yang telah dilaksanakan oleh sekolah dalam membentuk lulusan yang diharapkan; (4) pelaksanaan penilaian yang telah dilaksanakan oleh sekolah dan dampaknya dalam pada peningkatan proses pembelajaran; (5) kondisi pendidik dan tenaga kependidikan serta perannya dalam melakukan transformasi pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap siswa seperti yang diharapkan; (6) ketercukupan, kesesuaian, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan serta pembiayaan dalam pelaksanaan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan seperti yang diharapkan; dan (7) pengelolaan sumber daya sekolah yang menunjang pelaksanaan pendidikan yang bermutu.

f. Evaluasi Pendampingan Implementasi SPMI

Hasil evaluasi proses pendampingan menggambarkan bahwa sekolah model mengharapkan agar pendampingan SPMI dilakukan secara berkesinambungan dengan frekuensi yang lebih sering. Materi pendampingan agar lebih substantif dan aplikatif, tidak

lagi didominasi oleh teori. LPMP perlu mengawal kualitas penyelenggaraan pendampingan oleh sekolah model agar dapat menghasilkan luaran yang maksimal dan bisa berdampak nyata bagi perbaikan mutu sekolah. Selain itu, agar proses pendampingan lebih efektif, pelibatan pengawas pembina sekolah model dalam pendampingan perlu dioptimalkan. Pendampingan tidak hanya dilakukan oleh fasilitator daerah, tetapi juga oleh pengawas pembina, baik pengawas pembina sekolah model maupun pengawas pembina sekolah imbas. Fokus pendampingan tidak hanya di sekolah model sebagai penerima dana bantuan pemerintah, tetapi pendampingan di sekolah imbas juga perlu ditingkatkan frekuensi dan kualitasnya.

B. Saran Pengembangan

Kajian dalam laporan ini dominan didasarkan pada data rapor mutu hasil evaluasi diri sekolah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Agar hasil lebih komprehensif, kajian lebih lanjut perlu data tambahan dari sumber lain seperti Neraca Pendidikan Daerah, data hasil ujian nasional, data hasil akreditasi sekolah oleh BAN-S/M, dan sumber data lain yang relevan. Beberapa hasil dalam laporan ini juga perlu pendalaman lebih lanjut secara kualitatif disebabkan karena laporan ini lebih banyak bersifat deskriptif kuantitatif. Contoh, perbandingan hasil pemetaan internal oleh sekolah model dengan hasil akreditasi oleh BAN-S/M yang sangat berbeda signifikan. Analisis lebih komprehensif diperlukan untuk menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan yang sangat kontras tersebut.

Analisis lebih dalam juga perlu dilakukan terhadap rendahnya kenaikan capaian mutu pada tahun 2018 dibandingkan dengan capaian mutu tahun 2017. Indeks efektivitas penjaminan mutu pendidikan di sekolah model tahun 2017-2018 lebih rendah dari indeks efektivitas penjaminan mutu pendidikan tahun 2016-2017. Kenaikan capaian mutu tahun 2018 terhadap capaian mutu tahun 2017 sangat landau, sedangkan kenaikan capaian mutu tahun 2017 terhadap capaian mutu tahun 2016 sangat curam.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi semua pihak dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Untuk hasil yang lebih komprehensif, kami berharap ada kajian yang lebih dalam terhadap hal-hal yang belum tuntas dibahas dalam laporan ini dan hal-hal yang memerlukan pendalaman lebih jauh. Semoga mutu pendidikan di NTB semakin baik.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sekolah Model Peserta Diseminasi Hasil SPMI Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah Model
1	Kota Mataram	SDN 2 Cakranegara
2		SMPN 7 Mataram
3		SMAN 4 Mataram
4		SMKN 9 Mataram
5	Kabupaten Lombok Barat	SDN 1 Jembatan Gantung
6		SDN 1 Dasan Tereng
7		SMPN 1 Kediri
8		SMKN 2 Gerung
9		SMAN 1 Lembar
10	Kabupaten Lombok Tengah	SDN 1 Kopang
11		SDN 2 Sengkol
12		SMPN 1 Batukliang
13		SMKN 1 Kopang
14		SMAN 1 Praya Timur
15	Kabupaten Lombok Timur	SDN 1 Selebung Ketangga
16		SMPN 1 Pringgabaya
17		SMPN 1 Sakra
18		SMAN 1 Terara
19		SMAN 2 Selong
20		SMKN 1 Sikur
21	Kabupaten Sumbawa Barat	SDN 2 Seteluk
22		SDN 9 Taliwang
23		SMPN 6 Taliwang
24		SMAN 1 Jereweh
25	Kabupaten Sumbawa	SDN 6 Sumbawa
26		SDN 1 Sumbawa
27		SMNP 3 Sumbawa
28		SMAN 3 Subawa
29		SMKN 3 Sumbawa
30	Kabupaten Dompu	SDN 05 Hu'U
31		SMPN 4 Dompu
32	Kota Bima	SDN 55 Dara Kota Bima
33		SDN 19 Rabangodu Utara Kota
34		SMPN 7 Kota Bima
35		SMKN 3 Kota Bima
36	Kabupaten Bima	SDN Talabiu
37		SMPN 1 Monta
38		SMPN 3 Sape
39		SMAN 1 Belo
40		SMKN 1 Bima

Lampiran 2 Rapor Mutu NTB Jenjang SD Tahun 2016-2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.43	★★★★	5.68	★★★★	6.95	★★★★★
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap		★	6.76	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6.68	★★★★★	6.76	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak	6.78	★★★★★	6.81	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6.72	★★★★★	6.79	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6.75	★★★★★	6.81	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6.74	★★★★★	6.79	★★★★★	7	★★★★★
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6.65	★★★★	6.78	★★★★★	6.96	★★★★★
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6.31	★★★★	6.69	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6.8	★★★★★	6.8	★★★★★	7	★★★★★
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6.53	★★★★	6.69	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6.77	★★★★★	6.83	★★★★★	7	★★★★★
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan		★	3.51	★★	6.86	★★★★★
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	3.85	★★★	3.51	★★	6.86	★★★★★
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan		★	6.01	★★★★	6.96	★★★★★
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	5.38	★★★★	5.6	★★★★	6.92	★★★★★
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	5.39	★★★★	5.59	★★★★	6.89	★★★★★
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	5.67	★★★★	6.1	★★★★	6.98	★★★★★
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	5.61	★★★★	6.12	★★★★	6.98	★★★★★
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6.66	★★★★	6.61	★★★★	6.99	★★★★★
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	5.92	★★★★	6.07	★★★★	6.98	★★★★★
2	Standar Isi	4.84	★★★	5.38	★★★★	6.52	★★★★
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan		★	5.62	★★★★	6.84	★★★★★
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	6.64	★★★★	5.16	★★★★	6.64	★★★★
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6.53	★★★★	5.73	★★★★	6.96	★★★★★
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	6.62	★★★★	5.24	★★★★	6.94	★★★★★
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	6.7	★★★★★	5.95	★★★★	6.83	★★★★★
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	6.71	★★★★★	6.04	★★★★	6.84	★★★★★
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur		★	5.45	★★★★	6.79	★★★★★
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	2.59	★★	4.72	★★★	6.68	★★★★★
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	4.08	★★★	6.79	★★★★★	6.99	★★★★★
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan		★	4.33	★★★	6.6	★★★★
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan		★	5.97	★★★★	6.91	★★★★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan		★	5.38	★★★★	5.93	★★★★
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	2.68	★★	6.91	★★★★★	7	★★★★★
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi		★	2.14	★★	2.74	★★
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	6.4	★★★★	6.56	★★★★	6.98	★★★★★
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa		★	6.51	★★★★	6.99	★★★★★
3	Standar Proses	5.13	★★★★	6.18	★★★★	6.97	★★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan		★	6.52	★★★★	6.99	★★★★★
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	4.87	★★★	6.66	★★★★	6.99	★★★★★
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6.6	★★★★	6.69	★★★★★	6.99	★★★★★
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	4.68	★★★	6.18	★★★★	6.98	★★★★★
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	5.71	★★★★	6.56	★★★★	6.99	★★★★★
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat		★	6.28	★★★★	6.97	★★★★★
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6.64	★★★★	6.71	★★★★★	6.67	★★★★★
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6.46	★★★★	6.65	★★★★	6.99	★★★★★
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	3.94	★★★	6.46	★★★★	6.99	★★★★★
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	5.97	★★★★	6.46	★★★★	6.99	★★★★★
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6.36	★★★★	6.62	★★★★	6.99	★★★★★
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6.33	★★★★	6.6	★★★★	6.99	★★★★★
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	5.93	★★★★	6.41	★★★★	6.99	★★★★★
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	5.91	★★★★	6.39	★★★★	6.99	★★★★★
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6.48	★★★★	6.68	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	4.27	★★★	6.65	★★★★	6.99	★★★★★
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	4.29	★★★	6.68	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa		★	5.85	★★★★	6.99	★★★★★
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	1.96	★	5.22	★★★★	6.99	★★★★★
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	3	★★	6.05	★★★★	6.99	★★★★★
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	5.24	★★★★	6.7	★★★★★	6.99	★★★★★
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran		★	6.09	★★★★	6.97	★★★★★
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif		★	5.52	★★★★	6.94	★★★★★
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik		★	6.23	★★★★	6.99	★★★★★
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	4.55	★★★	6.12	★★★★	6.97	★★★★★
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	5.12	★★★★	6.21	★★★★	6.95	★★★★★
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	4.61	★★★	6.09	★★★★	6.96	★★★★★
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	4.65	★★★	6.38	★★★★	6.99	★★★★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.23	★★★	5.74	★★★★	6.75	★★★★★
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi		★	6.26	★★★★	6.88	★★★★★
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	4.42	★★★	6.49	★★★★	6.78	★★★★★
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	4.89	★★★	6.04	★★★★	6.98	★★★★★
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel		★	5.43	★★★★	6.94	★★★★★
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	4.42	★★★	5.7	★★★★	6.95	★★★★★
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	3.79	★★★	5.15	★★★★	6.92	★★★★★
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti		★	6.17	★★★★	6.93	★★★★★
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	4.06	★★★	6.45	★★★★	6.99	★★★★★
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	4.32	★★★	5.89	★★★★	6.87	★★★★★
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek		★	5.29	★★★★	6.93	★★★★★
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	3.71	★★★	5.2	★★★★	6.92	★★★★★
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	4.41	★★★	5.62	★★★★	6.96	★★★★★
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	3.74	★★★	5.06	★★★★	6.92	★★★★★
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur		★	5.58	★★★★	6.08	★★★★
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	4.06	★★★	5.98	★★★★	6.89	★★★★★
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	4.42	★★★	5.87	★★★★	6.97	★★★★★
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai		★	4.89	★★★	4.38	★★★
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.57	★★	3.95	★★★	4.04	★★★
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan		★	6.24	★★★★	5.01	★★★
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	5.81	★★★★	2.46	★★	4.9	★★★
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang	6.28	★★★★	0.22	★	6.85	★★★★★
5.1.4.	Bersertifikat pendidik		★	6.67	★★★★★	3.81	★★★
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4.1	★★★	4.07	★★★	4.07	★★★
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	4.6	★★★	4.55	★★★	4.56	★★★
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★	0	★
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan		★	4.33	★★★	5.9	★★★★
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6.38	★★★★	6.38	★★★★	6.41	★★★★
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6.4	★★★★	6.5	★★★★	6.49	★★★★
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan		★	0	★	6.54	★★★★
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	6.44	★★★★	3.27	★★	6.47	★★★★
5.2.5.	Bersertifikat pendidik		★	0	★	6.17	★★★★
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah		★	0	★	4.08	★★★
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	2.82	★★		★	2.8	★★
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	3.14	★★		★	3.12	★★
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	3.03	★★	2.98	★★	3.01	★★
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	2.3	★★	2.66	★★	2.26	★★
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	3.1	★★	2.89	★★	3.07	★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan		★	2	★★	1.06	★
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi		★		★	0.09	★
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat		★		★	0.04	★
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat		★		★		★
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	4.13	★★★	3.5	★★	3.64	★★
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	2.41	★★	2.05	★★	2.14	★★
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★		★
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik		★		★		★
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★		★		★
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan		★	0	★	0.79	★
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium		★	0	★	0	★
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai ketentuan		★	0	★	0.01	★
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat		★		★		★
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai ketentuan		★		★	0.01	★
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0	★	0	★	0	★
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan		★		★		★
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0	★		★	0	★
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan		★	0	★	6.98	★★★★★
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★		★
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★		★		★
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik		★		★		★
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan		★	0	★	0.28	★
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan		★	0	★	0.56	★
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai ketentuan		★	0	★	0.4	★
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat		★		★		★
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai ketentuan		★		★	0.35	★
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0	★	0	★	0	★
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan		★		★	0.59	★
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★		★		★
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik		★		★		★
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik		★		★		★
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★		★
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik		★		★		★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.54	★★★	3.98	★★★	3.91	★★★
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai		★	4.54	★★★★	4.36	★★★★
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	7	★★★★★	6	★★★★		★
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	5.76	★★★★	6.02	★★★★	5.94	★★★★
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan		★	5.53	★★★★	6.98	★★★★★
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa		★		★	3.08	★★
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan		★	4.79	★★★	6.2	★★★★
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan		★	1.73	★	2.31	★★
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak		★	1.62	★	2.02	★★
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	1.67	★	3.89	★★★	4.66	★★★
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar		★	0	★	0.01	★
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	1.47	★	1.27	★	1.9	★
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar		★	0	★	0	★
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	1.73	★	4.12	★★★	5.01	★★★
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai		★	0	★	0	★
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai		★	2.33	★★	0	★
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai		★		★	6.97	★★★★★
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak		★	1.93	★	2.21	★★
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar		★	1.14	★	1.19	★
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar		★	0.43	★	0.27	★
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar		★	0.37	★	0.34	★
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar		★	0.1	★	0.12	★
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	5.62	★★★★	3.09	★★	3.28	★★
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar		★	0.14	★	0.15	★
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar		★		★		★
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak		★	5.39	★★★★	6.92	★★★★★
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai		★	4.86	★★★	6.9	★★★★★
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai		★	3.49	★★	1.08	★
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai		★	1.46	★	1.53	★
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai		★	0.79	★	1.94	★
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai		★	0.61	★	0.64	★
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar		★	0.99	★	3.08	★★
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai		★		★		★
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai		★	6.37	★★★★	6.97	★★★★★
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.54	★★★	5.45	★★★★	6.49	★★★★
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan		★	6.08	★★★★	6.98	★★★★★
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6	★★★★	6.3	★★★★	6.99	★★★★★
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	5.99	★★★★	6.11	★★★★	6.97	★★★★★
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	4	★★★	5.84	★★★★	6.97	★★★★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan		★	6	★★★★★	6.92	★★★★★
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	4.54	★★★	5.61	★★★★★	6.78	★★★★★
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	4.96	★★★	6.33	★★★★★	6.98	★★★★★
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	5.85	★★★★★	5.91	★★★★★	6.9	★★★★★
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	5.3	★★★★★	6.29	★★★★★	6.98	★★★★★
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	5.1	★★★★★	5.58	★★★★★	6.95	★★★★★
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	4.83	★★★	6.29	★★★★★	6.94	★★★★★
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan		★	1.86	★	2.3	★★
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	2.96	★★		★		★
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan		★	5.48	★★★★★	6.94	★★★★★
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	3.14	★★		★	0	★
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik		★	5.82	★★★★★	6.9	★★★★★
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	3.03	★★		★	0	★
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	2.3	★★		★	0	★
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen		★	5.92	★★★★★	6.97	★★★★★
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	4.86	★★★	5.92	★★★★★	6.97	★★★★★
8	Standar Pembiayaan	4.19	★★★	5.64	★★★★★	6.15	★★★★★
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang		★	6.9	★★★★★	6.92	★★★★★
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	0	★	6.86	★★★★★	6.88	★★★★★
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	0	★	6.86	★★★★★	6.88	★★★★★
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7	★★★★★	6.98	★★★★★	6.99	★★★★★
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan		★	6.68	★★★★★	6.9	★★★★★
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6.71	★★★★★	6.68	★★★★★	6.9	★★★★★
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik		★	3.78	★★★	4.64	★★★
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	4.08	★★★	0.23	★	0.23	★
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	4.3	★★★	5.62	★★★★★	6.97	★★★★★
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	2.22	★★	5.77	★★★★★	6.71	★★★★★

Lampiran 3 Rapor Mutu NTB Jenjang SMP Tahun 2016-2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.18	★★★★	5.32	★★★★	6.94	★★★★★
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap		★	6.71	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6.46	★★★★	6.72	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak	6.61	★★★★	6.76	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6.47	★★★★	6.73	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6.55	★★★★	6.76	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6.45	★★★★	6.73	★★★★★	7	★★★★★
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6.41	★★★★	6.73	★★★★★	6.94	★★★★★
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6.03	★★★★	6.65	★★★★	6.99	★★★★★
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6.59	★★★★	6.75	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6.24	★★★★	6.61	★★★★	7	★★★★★
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6.57	★★★★	6.79	★★★★★	7	★★★★★
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan		★	2.66	★★	6.82	★★★★★
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	3.18	★★	2.66	★★	6.82	★★★★★
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan		★	6.21	★★★★	6.95	★★★★★
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	5.56	★★★★	5.94	★★★★	6.91	★★★★★
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	5.48	★★★★	5.72	★★★★	6.86	★★★★★
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	5.8	★★★★	6.27	★★★★	6.99	★★★★★
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6.13	★★★★	6.44	★★★★	6.99	★★★★★
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6.53	★★★★	6.66	★★★★	6.99	★★★★★
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	5.99	★★★★	6.23	★★★★	6.99	★★★★★
2	Standar Isi	4.74	★★★	5.16	★★★★	6.84	★★★★★
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan		★	5.05	★★★	6.88	★★★★★
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	6.45	★★★★	4.58	★★★	6.63	★★★★
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6.35	★★★★	5.03	★★★	6.94	★★★★★
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	6.45	★★★★	4.69	★★★	6.94	★★★★★
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	6.49	★★★★	5.46	★★★★	6.93	★★★★★
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	6.49	★★★★	5.5	★★★★	6.93	★★★★★
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur		★	5.49	★★★★	6.84	★★★★★
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	2.71	★★	4.79	★★★	6.74	★★★★★
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	4.41	★★★	6.72	★★★★★	6.99	★★★★★
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan		★	4.4	★★★	6.71	★★★★★
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan		★	6.04	★★★★	6.94	★★★★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan		★	5.76	★★★★★	6.79	★★★★★
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	2.44	★★	6.92	★★★★★	6.99	★★★★★
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi		★	5.02	★★★	6.24	★★★★★
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	5.97	★★★★★	5.89	★★★★★	6.93	★★★★★
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa		★	6.52	★★★★★	6.99	★★★★★
3	Standar Proses	5.14	★★★★★	5.79	★★★★★	6.98	★★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan		★	6.37	★★★★★	6.99	★★★★★
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	4.85	★★★	6.56	★★★★★	6.98	★★★★★
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6.43	★★★★★	6.57	★★★★★	6.99	★★★★★
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	4.95	★★★	6.22	★★★★★	6.98	★★★★★
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6.16	★★★★★	6.12	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat		★	5.96	★★★★★	6.98	★★★★★
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6.84	★★★★★	6.93	★★★★★	6.83	★★★★★
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6.27	★★★★★	6.54	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	3.94	★★★	6.48	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6	★★★★★	6.47	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6.3	★★★★★	6.58	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6.27	★★★★★	6.56	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	5.97	★★★★★	6.43	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	5.95	★★★★★	6.41	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6.42	★★★★★	6.64	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	4.23	★★★	6.61	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	4.02	★★★	6.57	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa		★	6.01	★★★★★	6.98	★★★★★
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	2.33	★★	5.57	★★★★★	6.97	★★★★★
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	3.58	★★	6.15	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	4.99	★★★	6.61	★★★★★	6.99	★★★★★
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran		★	5.99	★★★★★	6.96	★★★★★
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif		★	5.34	★★★★★	6.95	★★★★★
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik		★	6.16	★★★★★	6.98	★★★★★
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	4.34	★★★	6.07	★★★★★	6.97	★★★★★
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	4.67	★★★	6.12	★★★★★	6.94	★★★★★
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	4.7	★★★	6.02	★★★★★	6.96	★★★★★
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	4.69	★★★	6.24	★★★★★	6.99	★★★★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.26	★★★	5.65	★★★★	6.77	★★★★★
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi		★	6.28	★★★★	6.88	★★★★★
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	4.48	★★★	6.43	★★★★	6.78	★★★★★
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	5.15	★★★★	6.13	★★★★	6.99	★★★★★
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel		★	5.36	★★★★	6.94	★★★★★
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	4.48	★★★	5.7	★★★★	6.93	★★★★★
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	3.79	★★★	5.02	★★★	6.94	★★★★★
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti		★	6.04	★★★★	6.91	★★★★★
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	4	★★★	6.35	★★★★	6.99	★★★★★
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	4.28	★★★	5.73	★★★★	6.84	★★★★★
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek		★	5.19	★★★★	6.94	★★★★★
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	3.77	★★★	5.13	★★★★	6.93	★★★★★
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	4.41	★★★	5.44	★★★★	6.95	★★★★★
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	3.71	★★★	5.01	★★★	6.93	★★★★★
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur		★	5.35	★★★★	6.17	★★★★
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	4	★★★	5.82	★★★★	6.86	★★★★★
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	4.48	★★★	5.92	★★★★	6.96	★★★★★
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai		★	4.32	★★★	4.68	★★★
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.02	★★	3.49	★★	3.32	★★
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan		★	5.64	★★★★	3.04	★★
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6.57	★★★★	2.37	★★	5.81	★★★★
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran		★	0	★	0	★
5.1.4.	Bersertifikat pendidik		★	4.99	★★★	3.61	★★
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4.37	★★★	4.22	★★★	4.26	★★★
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	4.51	★★★	4.35	★★★	4.4	★★★
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★	0	★
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan		★	3.33	★★	5.22	★★★★
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	5.61	★★★★	5.6	★★★★	5.68	★★★★
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6.73	★★★★★	6.8	★★★★★	6.8	★★★★★
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan		★	0	★	5.23	★★★★
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	4.26	★★★	2.02	★★	4.24	★★★
5.2.5.	Bersertifikat pendidik		★	0	★	4.21	★★★
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah		★	0	★	3.12	★★
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	2.15	★★		★	2.14	★★
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	2.35	★★		★	2.36	★★
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	2.25	★★	2.13	★★	2.24	★★
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	1.62	★	1.89	★	1.63	★
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	2.32	★★	2.07	★★	2.26	★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan		★	2.91	★★	1.55	★
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi		★		★	0.25	★
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat		★		★	0.08	★
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat		★		★		★
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	5.6	★★★★	5.02	★★★	5.14	★★★★
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	3.34	★★	3.06	★★	3.15	★★
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★		★
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik		★		★		★
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★		★		★
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan		★	0	★	1.27	★
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium		★	0.01	★	0.02	★
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai ketentuan		★	0	★	2.71	★★
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat		★		★		★
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai ketentuan		★		★	1.41	★
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0.03	★	0.03	★	0.02	★
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan		★		★		★
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0.03	★		★	0.18	★
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan		★	0	★	6.98	★★★★★
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★		★
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★		★		★
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik		★		★		★
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan		★	0	★	1.44	★
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan		★	0	★	4.01	★★★
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai ketentuan		★	0	★	3.14	★★
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat		★		★		★
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai ketentuan		★		★	1.6	★
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0	★	0	★	0	★
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan		★		★	0.84	★
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★		★		★
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik		★		★		★
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik		★		★		★
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★		★
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik		★		★		★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.46	★★★	3.93	★★★	3.97	★★★
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai		★	4.47	★★★★	4.39	★★★★
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	7	★★★★★	6	★★★★		★
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	5.63	★★★★	6.35	★★★★	6.21	★★★★
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan		★	5.26	★★★★	6.98	★★★★★
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa		★		★	3.22	★★
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan		★	4.62	★★★	6.28	★★★★
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan		★	1.71	★	1.77	★
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak		★	1.72	★	2.35	★★
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	1.53	★	3.6	★★	4.45	★★★
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar		★	0.38	★	1.02	★
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	1.39	★	1.41	★	2.24	★★
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar		★	0	★	0	★
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	1.72	★	4.19	★★★	4.91	★★★
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai		★	0.56	★	1.09	★
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai		★	2.33	★★	0	★
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai		★		★	6.98	★★★★★
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak		★	1.9	★	2.18	★★
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar		★	1.16	★	1.35	★
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar		★	0.37	★	0.27	★
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar		★	0.44	★	0.4	★
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar		★	0.22	★	0.24	★
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	5.54	★★★★	2.69	★★	3.27	★★
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar		★	0.15	★	0.24	★
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar		★		★		★
6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar		★	0.39	★	0.29	★
6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar		★	0	★	0.01	★
6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar		★	0.01	★	0.02	★
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak		★	5.77	★★★★	6.93	★★★★★
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai		★	5.32	★★★★	6.91	★★★★★
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai		★	4.13	★★★	1.38	★
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai		★	1.2	★	1.27	★
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai		★	0.9	★	2.06	★★
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai		★	1.51	★	1.59	★
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar		★	0.98	★	3.17	★★
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai		★		★		★
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai		★	6.34	★★★★	6.97	★★★★★
6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai		★	0.98	★	1.64	★
6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai		★	0	★	0	★
6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai		★	0.27	★	0.34	★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.27	★★★	5.1	★★★★	6.48	★★★★
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan		★	6.01	★★★★	6.97	★★★★★
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	5.77	★★★★	6.25	★★★★	6.98	★★★★★
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	5.79	★★★★	6.02	★★★★	6.97	★★★★★
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	3.95	★★★	5.76	★★★★	6.97	★★★★★
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan		★	5.96	★★★★	6.9	★★★★★
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	4.59	★★★	5.49	★★★★	6.74	★★★★★
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	5.3	★★★★	6.33	★★★★	6.99	★★★★★
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	5.66	★★★★	5.88	★★★★	6.86	★★★★★
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	5.35	★★★★	6.24	★★★★	6.98	★★★★★
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	5.15	★★★★	5.75	★★★★	6.93	★★★★★
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	4.39	★★★	6.13	★★★★	6.91	★★★★★
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan		★	1.75	★	2.29	★★
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	2.23	★★		★		★
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan		★	5.46	★★★★	6.93	★★★★★
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	2.35	★★		★	0	★
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik		★	5.47	★★★★	6.85	★★★★★
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	2.25	★★		★	0	★
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	1.62	★		★	0	★
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen		★	5.78	★★★★	6.97	★★★★★
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	4.71	★★★	5.78	★★★★	6.97	★★★★★
8	Standar Pembiayaan	4.12	★★★	5.31	★★★★	6.08	★★★★
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang		★	6.68	★★★★★	6.72	★★★★★
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	0	★	6.57	★★★★	6.6	★★★★
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	0	★	6.57	★★★★	6.6	★★★★
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7	★★★★★	6.91	★★★★★	6.98	★★★★★
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan		★	6.55	★★★★	6.87	★★★★★
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6.48	★★★★	6.55	★★★★	6.87	★★★★★
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik		★	3.56	★★	4.65	★★★
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	4.39	★★★	0.29	★	0.3	★
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	4.02	★★★	5.64	★★★★	6.94	★★★★★
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	2.21	★★	5.62	★★★★	6.71	★★★★★

Lampiran 4 Rapor Mutu NTB Jenjang SMA Tahun 2016-2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.52	★★★★	5.31	★★★★	6.95	★★★★★
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap		★	6.83	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6.1	★★★★	6.83	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter	6.25	★★★★	6.89	★★★★★	7	★★★★★
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6.07	★★★★	6.81	★★★★★	7	★★★★★
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6.18	★★★★	6.88	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6.05	★★★★	6.83	★★★★★	7	★★★★★
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6.06	★★★★	6.86	★★★★★	7	★★★★★
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	5.8	★★★★	6.78	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6.26	★★★★	6.87	★★★★★	7	★★★★★
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	5.89	★★★★	6.69	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6.21	★★★★	6.9	★★★★★	7	★★★★★
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan		★	2.74	★★	6.83	★★★★★
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	4.5	★★★	2.74	★★	6.83	★★★★★
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan		★	6.48	★★★★	6.97	★★★★★
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	5.69	★★★★	6.27	★★★★	6.94	★★★★★
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	5.55	★★★★	5.98	★★★★	6.9	★★★★★
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	5.95	★★★★	6.55	★★★★	6.99	★★★★★
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6.38	★★★★	6.73	★★★★★	7	★★★★★
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6.26	★★★★	6.83	★★★★★	6.99	★★★★★
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	5.98	★★★★	6.54	★★★★	6.99	★★★★★
2	Standar Isi	4.78	★★★	4.93	★★★	6.74	★★★★★
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan		★	4.84	★★★	6.82	★★★★★
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	5.7	★★★★	4.57	★★★	6.59	★★★★
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	5.61	★★★★	4.79	★★★	6.91	★★★★★
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	5.68	★★★★	4.65	★★★	6.91	★★★★★
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	5.78	★★★★	5.09	★★★★	6.84	★★★★★
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	5.78	★★★★	5.1	★★★★	6.84	★★★★★
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur		★	5.69	★★★★	6.9	★★★★★
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	2.78	★★	4.98	★★★	6.83	★★★★★
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	4.75	★★★	6.85	★★★★★	7	★★★★★
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan		★	4.69	★★★	6.82	★★★★★
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan		★	6.26	★★★★	6.96	★★★★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan		★	5.37	★★★★★	6.51	★★★★★
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	3.89	★★★	6.98	★★★★★	6.99	★★★★★
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi		★	3.95	★★★	5.09	★★★★★
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	5.86	★★★★★	5.79	★★★★★	6.97	★★★★★
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa		★	6.72	★★★★★	6.99	★★★★★
3	Standar Proses	4.99	★★★	5.74	★★★★★	6.98	★★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan		★	6.53	★★★★★	6.98	★★★★★
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	4.96	★★★	6.77	★★★★★	6.98	★★★★★
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6.3	★★★★★	6.74	★★★★★	6.99	★★★★★
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	4.77	★★★	6.43	★★★★★	6.98	★★★★★
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6.01	★★★★★	6.17	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat		★	5.9	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6.71	★★★★★	6.92	★★★★★	6.9	★★★★★
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	5.95	★★★★★	6.61	★★★★★	7	★★★★★
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	3.8	★★★	6.66	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	5.87	★★★★★	6.64	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6.08	★★★★★	6.71	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6.07	★★★★★	6.7	★★★★★	7	★★★★★
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	5.85	★★★★★	6.62	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	5.83	★★★★★	6.6	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6.21	★★★★★	6.77	★★★★★	7	★★★★★
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	4.02	★★★	6.75	★★★★★	7	★★★★★
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	3.93	★★★	6.71	★★★★★	7	★★★★★
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa		★	6.26	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	2.7	★★	5.95	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	3.67	★★	6.38	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	4.81	★★★	6.71	★★★★★	6.99	★★★★★
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran		★	6.15	★★★★★	6.97	★★★★★
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif		★	5.57	★★★★★	6.96	★★★★★
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik		★	6.33	★★★★★	6.97	★★★★★
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	4.03	★★★	6.18	★★★★★	6.98	★★★★★
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	4.39	★★★	6.24	★★★★★	6.98	★★★★★
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	4.49	★★★	6.16	★★★★★	6.97	★★★★★
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	4.48	★★★	6.42	★★★★★	6.99	★★★★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.14	★★★	5.84	★★★★	6.87	★★★★★
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi		★	6.52	★★★★	6.87	★★★★★
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	4.34	★★★	6.58	★★★★	6.76	★★★★★
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	5.07	★★★★	6.45	★★★★	6.98	★★★★★
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel		★	5.58	★★★★	6.93	★★★★★
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	4.34	★★★	5.91	★★★★	6.94	★★★★★
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	3.7	★★★	5.26	★★★★	6.92	★★★★★
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti		★	6.15	★★★★	6.91	★★★★★
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	3.85	★★★	6.54	★★★★	6.99	★★★★★
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	4.15	★★★	5.77	★★★★	6.83	★★★★★
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek		★	5.42	★★★★	6.92	★★★★★
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	3.69	★★	5.43	★★★★	6.92	★★★★★
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	4.22	★★★	5.6	★★★★	6.94	★★★★★
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	3.68	★★	5.23	★★★★	6.92	★★★★★
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur		★	5.55	★★★★	6.72	★★★★★
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	3.85	★★★	5.88	★★★★	6.84	★★★★★
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	4.34	★★★	6.18	★★★★	6.96	★★★★★
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai		★	4.59	★★★	6.37	★★★★
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.14	★★	3.63	★★	3.57	★★
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan		★	5.7	★★★★	3.28	★★
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6.78	★★★★★	2.38	★★	5.94	★★★★
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran		★	0	★	0	★
5.1.4.	Bersertifikat pendidik		★	5.65	★★★★	4.28	★★★
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4.3	★★★	4.23	★★★	4.34	★★★
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	4.42	★★★	4.33	★★★	4.44	★★★
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★	0	★
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan		★	3.48	★★	5.5	★★★★
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6.4	★★★★	6.3	★★★★	6.36	★★★★
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6.56	★★★★	6.54	★★★★	6.54	★★★★
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan		★	0	★	6.04	★★★★
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	4.21	★★★	2.1	★★	4.29	★★★
5.2.5.	Bersertifikat pendidik		★	0	★	4.95	★★★
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah		★	0	★	3.11	★★
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	2.15	★★		★	2.33	★★
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	2.5	★★		★	2.71	★★
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	2.35	★★	2.32	★★	2.58	★★
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	1.79	★	2.09	★★	1.97	★
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	2.43	★★	2.23	★★	2.65	★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan		★	3.52	★★	1.83	★
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi		★		★	0.02	★
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat		★		★	0.02	★
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat		★		★		★
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	5.66	★★★★	5.56	★★★★	5.76	★★★★
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	4.28	★★★	4.23	★★★	4.38	★★★
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★		★
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik		★		★		★
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★		★		★
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan		★	0	★	1.42	★
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium		★	0	★	0	★
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai		★	0	★	3.51	★★
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat		★		★		★
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai		★		★	1.52	★
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0	★	0	★	0	★
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan		★		★		★
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0	★		★	0.63	★
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan		★	0	★	6.95	★★★★★
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★		★
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★		★		★
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik		★		★		★
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan		★	0	★	1.6	★
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan		★	0	★	4.58	★★★
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai		★	0	★	3.48	★★
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat		★		★		★
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai		★		★	1.55	★
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0	★	0	★	0	★
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan		★		★	1.09	★
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★		★		★
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik		★		★		★
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik		★		★		★
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★		★
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik		★		★		★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.51	★★★	4.1	★★★	4.41	★★★
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai		★	4.6	★★★	4.74	★★★
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	6.9	★★★★★	6.81	★★★★★		★
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	5.19	★★★★★	6.18	★★★★★	6.22	★★★★★
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan		★	5.17	★★★★★	6.99	★★★★★
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa		★		★	3.25	★★
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan		★	4.69	★★★	6.68	★★★★★
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan		★	2.88	★★	4.4	★★★
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak		★	1.85	★	2.37	★★
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	1.71	★	4.77	★★★	4.43	★★★
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	1.97	★	1.42	★	2.32	★★
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar		★	0.01	★	0.03	★
6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar		★	0.72	★	1.66	★
6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar		★	0.48	★	1.48	★
6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar		★	0.65	★	1.14	★
6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar		★	1.21	★	1.75	★
6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar		★	0.33	★	0.65	★
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	2.29	★★	4.2	★★★	5.13	★★★★★
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai		★	2.33	★★	2.22	★★
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai		★		★	6.97	★★★★★
6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai		★	0	★	1.71	★
6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai		★	0	★	1.66	★
6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai		★	0	★	0	★
6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai		★	0.81	★	0.94	★
6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai		★	0.2	★	0.5	★
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak		★	2.52	★★	3.84	★★★
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar		★	2.94	★★	4.58	★★★
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar		★	0.3	★	2.83	★★
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar		★	1.36	★	1.46	★
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar		★	2.13	★★	2.28	★★
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	5.49	★★★★★	2.36	★★	4.49	★★★
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar		★	0.16	★	1.35	★
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar		★		★		★
6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar		★	3.1	★★	3.02	★★
6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar		★	1.52	★	3.51	★★
6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar		★	0.94	★	1.07	★
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak		★	6.06	★★★★★	6.94	★★★★★
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai		★	5.78	★★★★★	6.93	★★★★★
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai		★	4.53	★★★	2.36	★★
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai		★	1.39	★	2.48	★★
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai		★	0.93	★	2.11	★★
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai		★	1.57	★	1.61	★
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar		★	0.81	★	3	★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
No	Standar/Indikator/Subindikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai		★		★		★
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai		★	6.49	★★★★	6.96	★★★★★
6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai		★	1.32	★	2.16	★★
6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai		★	0.01	★	0.01	★
6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai		★	0.44	★	0.6	★
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.2	★★★	5.09	★★★★	6.5	★★★★★
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan		★	6.23	★★★★	6.97	★★★★★
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	5.33	★★★★	6.44	★★★★	6.99	★★★★★
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	5.47	★★★★	6.26	★★★★	6.97	★★★★★
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	3.86	★★★	6	★★★★	6.96	★★★★★
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan		★	6.15	★★★★	6.96	★★★★★
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	4.38	★★★	5.71	★★★★	6.86	★★★★★
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	5.28	★★★★	6.53	★★★★	6.99	★★★★★
7.2.3.	Meningkatkan daya guna pendidik dan tenaga kependidikan	5.55	★★★★	6.17	★★★★	6.96	★★★★★
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	5.23	★★★★	6.38	★★★★	6.99	★★★★★
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	5.24	★★★★	6.16	★★★★	6.98	★★★★★
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	4.01	★★★	5.94	★★★★	6.97	★★★★★
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan		★	1.78	★	2.31	★★
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	2.29	★★		★		★
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan		★	5.79	★★★★	6.94	★★★★★
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	2.5	★★		★	0	★
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik		★	5.5	★★★★	6.94	★★★★★
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	2.35	★★		★	0	★
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	1.79	★		★	0	★
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen		★	5.96	★★★★	6.95	★★★★★
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	4.74	★★★	5.96	★★★★	6.95	★★★★★
8	Standar Pembiayaan	3.87	★★★	5.31	★★★★	6.17	★★★★★
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang		★	6.76	★★★★★	6.88	★★★★★
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	0	★	6.67	★★★★★	6.82	★★★★★
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	0	★	6.67	★★★★★	6.82	★★★★★
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7	★★★★★	6.95	★★★★★	7	★★★★★
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan		★	6.78	★★★★★	6.91	★★★★★
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6.14	★★★★	6.78	★★★★★	6.91	★★★★★
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik		★	3.72	★★★	4.73	★★★
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	3.35	★★	0.37	★	0.43	★
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	3.9	★★★	6	★★★★	6.96	★★★★★
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	2.15	★★	6.13	★★★★	6.8	★★★★★

Lampiran 5 Rapor Mutu NTB Jenjang SMK Tahun 2016-2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
NO	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	4.77	★★★	5.1	★★★★★	6.94	★★★★★
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap		★	6.75	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	5.96	★★★★★	6.8	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter	6.13	★★★★★	6.85	★★★★★	7	★★★★★
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	5.92	★★★★★	6.77	★★★★★	7	★★★★★
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6.02	★★★★★	6.84	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	5.88	★★★★★	6.78	★★★★★	7	★★★★★
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	5.95	★★★★★	6.79	★★★★★	6.98	★★★★★
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	5.65	★★★★★	6.75	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6.19	★★★★★	6.83	★★★★★	7	★★★★★
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	5.83	★★★★★	6.67	★★★★★	7	★★★★★
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6.11	★★★★★	6.88	★★★★★	7	★★★★★
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan		★	2.59	★★	6.77	★★★★★
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	2.56	★★	2.59	★★	6.77	★★★★★
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan		★	6.44	★★★★★	6.96	★★★★★
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	5.58	★★★★★	6.23	★★★★★	6.92	★★★★★
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	5.28	★★★★★	5.9	★★★★★	6.87	★★★★★
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	5.74	★★★★★	6.51	★★★★★	6.99	★★★★★
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6.25	★★★★★	6.74	★★★★★	6.99	★★★★★
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6.06	★★★★★	6.78	★★★★★	6.99	★★★★★
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	5.83	★★★★★	6.47	★★★★★	6.99	★★★★★
2	Standar Isi	4.71	★★★	4.71	★★★	6.71	★★★★★
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan		★	4.85	★★★	6.89	★★★★★
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	6.19	★★★★★	4.21	★★★	6.64	★★★★★
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6.14	★★★★★	4.43	★★★	6.94	★★★★★
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	6.19	★★★★★	4.34	★★★	6.93	★★★★★
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	6.2	★★★★★	5.63	★★★★★	6.97	★★★★★
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	6.22	★★★★★	5.64	★★★★★	6.97	★★★★★
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur		★	5.62	★★★★★	6.9	★★★★★
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	2.51	★★	4.9	★★★	6.87	★★★★★
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	4.05	★★★	6.84	★★★★★	7	★★★★★
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan		★	4.6	★★★	6.82	★★★★★
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan		★	6.15	★★★★★	6.93	★★★★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
NO	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan		★	5.06	★★★★★	6.34	★★★★★
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	3.4	★★	6.98	★★★★★	6.99	★★★★★
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi		★	3.08	★★	4.44	★★★
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	5.9	★★★★★	6.12	★★★★★	6.95	★★★★★
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa		★	6.62	★★★★★	6.99	★★★★★
3	Standar Proses	4.8	★★★	5.48	★★★★★	6.97	★★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan		★	6.43	★★★★★	6.98	★★★★★
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	4.7	★★★	6.65	★★★★★	7	★★★★★
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6.06	★★★★★	6.67	★★★★★	7	★★★★★
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	4.47	★★★	6.31	★★★★★	6.98	★★★★★
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	5.5	★★★★★	6.1	★★★★★	6.97	★★★★★
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat		★	5.7	★★★★★	6.98	★★★★★
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6.84	★★★★★	6.92	★★★★★	6.8	★★★★★
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	5.75	★★★★★	6.55	★★★★★	7	★★★★★
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	3.78	★★★	6.57	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	5.74	★★★★★	6.56	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	5.91	★★★★★	6.63	★★★★★	7	★★★★★
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	5.88	★★★★★	6.62	★★★★★	7	★★★★★
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	5.71	★★★★★	6.52	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	5.7	★★★★★	6.51	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	5.98	★★★★★	6.7	★★★★★	7	★★★★★
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	3.94	★★★	6.68	★★★★★	7	★★★★★
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	3.59	★★	6.61	★★★★★	7	★★★★★
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa		★	6.21	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	2.52	★★	5.97	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	3.65	★★	6.34	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	4.46	★★★	6.63	★★★★★	7	★★★★★
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran		★	5.97	★★★★★	6.96	★★★★★
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif		★	5.35	★★★★★	6.97	★★★★★
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik		★	6.11	★★★★★	7	★★★★★
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	3.93	★★★	6.05	★★★★★	6.99	★★★★★
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	4.31	★★★	6.08	★★★★★	6.87	★★★★★
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	4.45	★★★	6.05	★★★★★	6.93	★★★★★
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	4.3	★★★	6.17	★★★★★	7	★★★★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
NO	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
4	Standar Penilaian Pendidikan	3.79	★★★	5.58	★★★★	6.92	★★★★★
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi		★	6.24	★★★★	6.89	★★★★★
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	3.97	★★★	6.53	★★★★	6.79	★★★★★
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	4.79	★★★	5.96	★★★★	6.99	★★★★★
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel		★	5.29	★★★★	6.92	★★★★★
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	3.97	★★★	5.57	★★★★	6.88	★★★★★
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	3.18	★★	5	★★★	6.96	★★★★★
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti		★	5.96	★★★★	6.93	★★★★★
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	3.7	★★★	6.33	★★★★	7	★★★★★
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	3.83	★★★	5.59	★★★★	6.86	★★★★★
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek		★	5.14	★★★★	6.95	★★★★★
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	3.13	★★	5.09	★★★★	6.96	★★★★★
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	3.77	★★★	5.38	★★★★	6.96	★★★★★
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	3.24	★★	4.96	★★★	6.92	★★★★★
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur		★	5.25	★★★★	6.93	★★★★★
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	3.7	★★★	5.72	★★★★	6.86	★★★★★
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	3.97	★★★	5.89	★★★★	6.94	★★★★★
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai		★	4.13	★★★	6.99	★★★★★
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.7	★★	2.74	★★	3.2	★★
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan		★	4.15	★★★	2.74	★★
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6.47	★★★★	2.82	★★	5.95	★★★★
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran		★	0	★	0	★
5.1.4.	Bersertifikat pendidik		★	3.47	★★	2.58	★★
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	3.26	★★	3.22	★★	3.67	★★
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	3.26	★★	3.22	★★	3.68	★★
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★	0	★
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan		★	2.66	★★	5.24	★★★★
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6.12	★★★★	6.08	★★★★	6.41	★★★★
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6.73	★★★★★	6.81	★★★★★	6.84	★★★★★
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan		★	0	★	5.32	★★★★
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	3.04	★★	1.27	★	3.26	★★
5.2.5.	Bersertifikat pendidik		★	0	★	3.72	★★★
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah		★	0	★	2.4	★★
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	1.56	★		★	1.6	★
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	1.72	★		★	1.8	★
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	1.57	★	1.29	★	1.66	★
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	1.21	★	1.16	★	1.2	★
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	1.69	★	1.27	★	1.68	★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
NO	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan		★	3.19	★★	1.76	★
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi		★		★	0	★
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat		★		★	0	★
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat		★		★		★
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	5.24	★★★★	4.85	★★★	5.44	★★★★
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	4.23	★★★	4	★★★	4.36	★★★
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★		★
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik		★		★		★
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★		★		★
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan		★	0	★	1.18	★
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium		★	0	★	0	★
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai		★	0	★	2.26	★★
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat		★		★		★
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai		★		★	1.07	★
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0	★	0	★	0	★
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan		★		★		★
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0	★		★	0.17	★
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan		★	0	★	7	★★★★★
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★		★
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★		★		★
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik		★		★		★
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan		★	0	★	1.01	★
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan		★	0	★	2.82	★★
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai ketentuan		★	0	★	2.26	★★
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat		★		★		★
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai ketentuan		★		★	1.14	★
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0	★	0	★	0	★
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan		★		★	0.52	★
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★		★		★
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik		★		★		★
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik		★		★		★
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★		★		★
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik		★		★		★
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik		★		★		★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
NO	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.64	★★	2.96	★★	2.9	★★
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai		★	3.29	★★	2.98	★★
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	6.99	★★★★★	6.88	★★★★★		★
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	0	★	0	★	0	★
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan		★	5.1	★★★★	6.98	★★★★★
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa		★		★	0	★
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan		★	4.52	★★★	6.43	★★★★
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan		★	1.75	★	3.02	★★
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak		★	1.58	★	1.97	★
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	1.36	★	4.54	★★★	4.32	★★★
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar		★	0.53	★	1.14	★
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	2.14	★★	0.87	★	1.61	★
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar		★	0.01	★	0.01	★
6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar		★	0.08	★	0.2	★
6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar		★	0.03	★	0.13	★
6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar		★	0.07	★	0.09	★
6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar		★	1.04	★	1.68	★
6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar		★	0.1	★	0.24	★
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	2.74	★★	4.2	★★★	5.4	★★★★
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai		★	0.22	★	0.41	★
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai		★	2.33	★★	1.71	★
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai		★		★	6.96	★★★★★
6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai		★	0	★	1.88	★
6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai		★	0	★	1.93	★
6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai		★	0	★	0	★
6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai		★	0.59	★	0.83	★
6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai		★	0.07	★	0.22	★
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak		★	2.07	★★	3.21	★★
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar		★	1.97	★	3.32	★★
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar		★	0.28	★	2.18	★★
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar		★	0.44	★	0.6	★
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar		★	1.19	★	1.3	★
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	5.36	★★★★	2.36	★★	4.11	★★★
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar		★	0.04	★	0.73	★
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar		★		★		★
6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar		★	2.2	★★	2.21	★★
6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar		★	0.79	★	2.26	★★
6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar		★	0.39	★	0.53	★
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak		★	6.23	★★★★	6.91	★★★★★
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai		★	5.78	★★★★	6.92	★★★★★
6.3.13.	Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja		★	5.57	★★★★	6.77	★★★★★
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai		★	4.4	★★★	2.12	★★
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai		★	0.98	★	1.82	★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
NO	Standar/Indikator/Subindikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai		★	0.54	★	1.53	★
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai		★	0.75	★	0.85	★
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar		★	0.79	★	3.29	★★
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai		★		★		★
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai		★	6.53	★★★★	6.94	★★★★★
6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai		★	0.61	★	1.27	★
6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai		★	0	★	0.02	★
6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai		★	0.13	★	0.19	★
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.87	★★★	4.8	★★★	6.5	★★★★
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan		★	6.01	★★★★	6.99	★★★★★
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	5.16	★★★★	6.32	★★★★	7	★★★★★
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	5.22	★★★★	6.03	★★★★	6.99	★★★★★
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	3.42	★★	5.7	★★★★	6.98	★★★★★
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan		★	6.06	★★★★	6.93	★★★★★
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	4.16	★★★	5.51	★★★★	6.8	★★★★★
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	5.18	★★★★	6.41	★★★★	6.99	★★★★★
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	5.2	★★★★	6.02	★★★★	6.9	★★★★★
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	4.95	★★★	6.18	★★★★	6.98	★★★★★
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	5.29	★★★★	6.1	★★★★	6.97	★★★★★
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	4.04	★★★	6.17	★★★★	6.95	★★★★★
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan		★	1.67	★	2.3	★★
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	1.62	★		★		★
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan		★	5.63	★★★★	6.93	★★★★★
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	1.72	★		★	0	★
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik		★	5.16	★★★★	6.9	★★★★★
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	1.57	★		★	0	★
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	1.21	★		★	0	★
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen		★	5.74	★★★★	6.99	★★★★★
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	4.55	★★★	5.74	★★★★	6.99	★★★★★
8	Standar Pembiayaan	3.7	★★★	4.92	★★★	6.1	★★★★
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang		★	6.44	★★★★	6.7	★★★★★
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	0	★	6.27	★★★★	6.58	★★★★
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	0	★	6.27	★★★★	6.58	★★★★
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7	★★★★★	6.78	★★★★★	6.96	★★★★★
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan		★	6.59	★★★★	6.93	★★★★★
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6.12	★★★★	6.59	★★★★	6.93	★★★★★
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik		★	3.37	★★	4.68	★★★
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	2.77	★★	0.16	★	0.2	★
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	3.12	★★	5.72	★★★★	7	★★★★★
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	2.03	★★	5.76	★★★★	6.83	★★★★★

Lampiran 6 Capaian Mutu SNP Sekolah Model Jenjang SD Tahun 2016-2018

NO	NAMA SEKOLAH	Capaian SNP			Progress			Nilai Konversi Akreditasi Capaian Tahun 2017 atau 2018	Akreditasi Capaian Tahun 2017 atau 2018	Kategori		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	2016- 2017	2017- 2018	2016- 2018			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
1	SDN 1 Ampenan	4.79	5.52	5.7	naik	naik	naik	81	B	M3	M4	M4
2	SDN 26 Cakranegara	4.52	5.67	5.64	naik	turun	turun	80	C	M3	M4	M4
3	SDN 11 Mataram	4.87	5.62	5.7	naik	naik	naik	81	B	M3	M4	M4
4	SDN 6 Mataram	5.13	4.77	5.68	turun	naik	turun	81	B	M4	M3	M4
5	SDN 2 Cakranegara	4.9	4.98	6	naik	naik	naik	85	B	M3	M3	M4
6	SDN 2 Kayangan	4.29	5.57	5.52	naik	turun	turun	78	C	M3	M4	M4
7	SDN 1 Bayan	4.4	3.12	1.74	turun			44	TT	M3	M2	M1
8	SDN 3 Gondang	4.86	5.63	1.32	naik			80	C	M3	M4	M1
9	SDN 2 Tanjung	4.3	3.64	5.27	turun	turun	naik	75	C	M3	M2	M4
10	SDN 2 Pemenang Barat	5.12	4.94	1.31	turun			70	TT	M4	M3	M1
11	SDN 1 Jembatan Gantung	5.4	5.78	6.07	naik	naik	naik	86	B	M4	M4	M4
12	SDN 3 Cendi Manik	4.18	5.45	5.5	naik	naik	naik	78	C	M3	M4	M4
13	SDN 1 Dasan Tereng	5.18	5.61	5.69	naik	naik	naik	81	B	M4	M4	M4
14	SDN 1 Beleka	5.3	5.58	5.87	naik	naik	naik	83	B	M4	M4	M4
15	SDN 1 Sandik	4.59	5.14	5.51	naik	naik	naik	78	C	M3	M4	M4
16	SDN 1 Batu Kumbang	4.9	5.55	3.29	naik	turun	turun	46	TT	M3	M4	M2
17	SDN Durian	4.94	5.63	5.79	naik	naik	naik	82	B	M3	M4	M4
18	SDN 2 Mantang	4.98	5.92	4.48	naik	turun	turun	63	TT	M3	M4	M3
19	SDN 3 Penujak	4.8	5.29	5.74	naik	naik	naik	82	B	M3	M4	M4
20	SDN 1 Tengari	4.5	5.71	5.7	naik	turun	turun	81	B	M3	M4	M4
21	SDN 1 Ubung	5.01	5.75	1.31	naik			82	B	M3	M4	M1
22	SDN 2 Sengkol	4.82	5.98	5.92	naik	turun	turun	84	B	M3	M4	M4
23	SDN 1 Kopang	4.63	5.75	5.97	naik	naik	naik	85	B	M3	M4	M4
24	SDN 3 Masbagik Selatan	4.93	5.3	5.14	naik	turun	turun	73	C	M3	M4	M4
25	SDN 1 Pengkelak Mas	4.06	5.42	5.39	naik	turun	turun	76	C	M3	M4	M4
26	SDN 1 Selebung Ketangga	4.92	5.67	5.55	naik	turun	turun	79	C	M3	M4	M4
27	SDN 2 Sukamulia	5.58	5.87	5.92	naik	naik	naik	84	B	M4	M4	M4
28	SDN 3 Teros	5.22	5.84	5.63	naik	turun	turun	80	C	M4	M4	M4
29	SDN 2 Bagik Payung	4.43	5.31	5.57	naik	naik	naik	79	C	M3	M4	M4
30	SDN 1 Montong Tangi	4.61	5.34	5.56	naik	naik	naik	79	C	M3	M4	M4
31	SDN 3 Selong	4.87	4.76	5.95	turun	naik	turun	84	B	M3	M3	M4
32	SDN 3 Maluk	4.64	5.35	5.39	naik	naik	naik	76	C	M3	M4	M4
33	SDN 9 Taliwang	1.42	5.8	5.72		turun		81	B	M1	M4	M4
34	SDN 1 Jereweh	5.02	5.52	5.69	naik	naik	naik	81	B	M3	M4	M4
35	SDN Desa Beru	4.83	5.77	5.66	naik	turun	turun	80	C	M3	M4	M4
36	SDN 2 Seteluk	4.13	5.77	5.48	naik	turun	turun	78	C	M3	M4	M4
37	SDN 6 Sumbawa	5.42	5.92	5.99	naik	naik	naik	85	B	M4	M4	M4
38	SDN 1 Sumbawa Besar	4.99	5.41	5.75	naik	naik	naik	82	B	M3	M4	M4
39	SDN 1 Plampang	4.65	5.83	1.22	naik			83	B	M3	M4	M1
40	SDN Uma Beringin	5.02	5.69	4.79	naik	turun	turun	68	TT	M3	M4	M3
41	SDN 2 Utan	4.82	5.29	5.77	naik	naik	naik	82	B	M3	M4	M4
42	SDN Sebewe	4.66	5.2	5.32	naik	turun	turun	76	C	M3	M4	M4
43	SDN 07 Manggelewa	4.71	5.17	5.32	naik	naik	naik	76	C	M3	M4	M4
44	SDN 07 Pekat	3.76	4.29	5.37	naik	naik	naik	76	C	M3	M3	M4
45	SDN 05 Hu'u	4.79	5.09	5.17	naik	naik	naik	73	C	M3	M4	M4
46	SDN 02 Dompu	5.41	5.59	5.77	naik	naik	naik	82	B	M4	M4	M4
47	SDN 01 Woja	4.42	5.73	3.29	naik	turun	turun	46	TT	M3	M4	M2
48	SDN Rato	4.8	5.65	5.81	naik	naik	naik	83	B	M3	M4	M4
49	SDN 2 Maria	4.95	5.94	5.79	naik	turun	turun	82	B	M3	M4	M4
50	SDN 9 Sila	4.73	5.11	5.8	naik	naik	naik	82	B	M3	M4	M4
51	SDN Panda	4.87	5.33	5.49	naik	naik	naik	78	C	M3	M4	M4
52	SDN 1 Tawali	4.45	0.97	5.52		naik		78	C	M3	M1	M4
53	SDN Talabiu	4.58	5.74	4.38	naik	turun	turun	62	TT	M3	M4	M3
54	SDN 1 Sila	5.11	5.56	5.87	naik	naik	naik	83	B	M4	M4	M4
55	SDN Karumbu	5.01	5.88	1.34	naik			83	B	M3	M4	M1
56	SDN 46 Lela Kota Bima	4.81	5.18	5.38	naik	naik	naik	76	C	M3	M4	M4
57	SDN 19 Rabangodu Utara Kota Bima	4.45	5.2	5.64	naik	naik	naik	80	C	M3	M4	M4
58	SDN 2 Suntu Kota Bima	4.9	5.91	5.78	naik	turun	turun	82	B	M3	M4	M4
59	SDN 11 Manggemaci Kota Bima	5.45	5.66	5.68	naik	naik	naik	81	B	M4	M4	M4
60	SDN 55 Dara Kota Bima	5.34	5.92	5.74	naik	turun	turun	81	B	M4	M4	M4

Lampiran 7 Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SD Tahun 2018

No	Nama Sekolah Model	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Isi	Standar Proses	Standar Penilaian Pendidikan	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Standar Pengelolaan Pendidikan	Standar Pembiayaan
1	SDN 1 Sila	6.53	5.66	6.63	6.57	4.55	5.45	5.58	6.01
2	SDN 1 Tawali	5.77	6.2	6.33	6.6	4.13	2.51	6.39	6.21
3	SDN 2 Maria	6.1	6.16	6.7	6.33	4.29	5.37	5.36	6
4	SDN 9 Sila	6.24	6.18	6.71	6.47	3.92	5.27	5.49	6.08
5	SDN Karumbu	0	0.71	0.14	0	4.09	3.47	0.01	2.33
6	SDN Panda	6.23	5.04	6.45	6.46	4.48	3.88	5.25	6.1
7	SDN Rato	6.26	6	6.69	6.46	4.3	5.5	5.17	6.11
8	SDN Talabiu	4.68	4.17	5.09	4.11	4.32	2.87	4.2	5.59
9	SDN 1 Woja	2.43	2.89	3.27	2.68	4.35	3.25	2.59	4.82
10	SDN 2 Dompu	6.49	5.6	6.8	6.45	4.2	5.01	5.61	5.96
11	SDN 5 Hu'U	5.75	4.28	6.06	4.86	4.25	4.98	4.74	6.46
12	SDN 07 Manggalewa	5.86	4.99	6.31	5.74	4.05	5.36	4.96	5.31
13	SDN 7 Pekat	6.17	5.51	6.11	5.53	3.12	5.28	5.16	6.05
14	SDN 2 Suntu Kota Bima	6.73	5.12	6.74	6.07	4.53	5.13	5.71	6.22
15	SDN 11 Manggemaci Kota Bima	6.77	5.53	6.64	6.45	4.56	3.91	5.66	5.94
16	SDN 19 Rabangodu Utara Kota Bima	6.85	5.34	6.51	5.14	4.4	5.52	5.36	6
17	SDN 46 Jatiwangi Kota Bima	6.17	5.13	6.31	5.24	4.36	5.09	4.96	5.81
18	SDN 55 Dara Kota Bima	6.43	5.19	6.67	6.61	4.15	5.29	5.49	6.08
19	SDN 1 Plampang	0	0.74	0.16	0	4.6	1.92	0.01	2.33
20	SDN 1 Sumbawa Besar	6.92	5.71	6.72	6.28	4.65	5.45	5.67	4.57
21	SDN 2 Utan	6.98	5.54	6.95	6.66	4.39	4.46	5.7	5.51
22	SDN 6 Sumbawa Besar	6.61	5.47	6.8	6.67	4.82	5.59	5.76	6.22
23	SDN Sebewe	5.74	5.64	6.57	6.04	3.4	3.87	5.6	5.7
24	SDN Uma Beringin	6.19	4.06	4.49	4.49	4.15	5.33	4.4	5.24
25	SDN 1 Jereweh	6.61	5.8	6.79	6.15	4.64	3.99	5.71	5.85
26	SDN 2 Seteluk	6.14	5.37	6.7	6.02	4.26	4.09	5.31	5.98
27	SDN 3 Maluk	6.12	4.98	6.5	5.54	4.34	5.31	4.61	5.7
28	SDN 9 Taliwang	6.46	6.27	6.64	6.23	3.65	4.11	6.23	6.17
29	SDN Desa Beru	5.9	5.41	6.59	6.16	4.36	5.44	5.3	6.12
30	SDN 1 Ampenan	6.72	5.06	6.61	5.79	4.86	4.95	5.48	6.1
31	SDN 2 Cakranegara	6.69	5.87	6.9	6.68	4.35	5.46	5.8	6.22
32	SDN 6 Mataram	6.36	5.94	6.52	6.34	4.18	5.01	5.19	5.92
33	SDN 11 Mataram	6.37	5.45	6.74	6.33	3.95	5.09	5.65	6.05
34	SDN 26 Cakranegara	5.79	5.38	6.46	6.25	4.35	5.17	5.55	6.2
35	SDN 1 Batu Kumbung	2.39	2.95	3.17	2.71	4.03	3.66	2.55	4.82
36	SDN 1 Beleka	6.39	5.61	6.87	6.63	4.41	5.3	5.56	6.19
37	SDN 1 Dasan Tereng	6	5.61	6.65	6.1	4.04	5.33	5.59	6.16
38	SDN 1 Jembatan Gantung	6.69	6.33	6.91	6.78	4.6	5.36	5.74	6.12
39	SDN 1 Sandik	6.92	5.02	6.2	5.2	4.49	5.43	4.86	5.95
40	SDN 3 Cendi Manik	6.19	5.44	6.55	6.18	3.49	5.24	4.91	5.98
41	SDN Durian	6.02	5.18	6.82	6.39	4.55	5.52	5.63	6.2
42	SDN 1 Kopang	6.76	5.8	6.85	6.61	4.4	5.38	5.72	6.2
43	SDN 1 Tengari	6.5	5.33	6.49	6.04	4.38	5.31	5.39	6.12
44	SDN 1 Ubung	0	0.71	0.12	0	4.05	3.28	0.01	2.33
45	SDN 2 Mantang	4.65	3.9	5.1	4.26	4.03	4.41	3.87	5.59
46	SDN 2 Sengkol	7	5.48	6.86	6.68	4.14	5.24	5.74	6.21
47	SDN 3 Penujak	6.48	5.41	6.54	6.31	4.06	6.03	5.14	5.95
48	SDN 1 Montong Tangi	5.89	5.6	6.2	5.73	4.41	5.42	5.21	5.99
49	SDN 1 Pengkelak Mas	5.95	4.99	5.85	5.63	4.32	5.29	5.29	5.79
50	SDN 1 Selebung Ketangga	5.75	5.2	6.16	5.67	4.71	5.27	5.52	6.09
51	SDN 2 Bagik Payung	5.73	5.37	6.44	6.4	4.22	5.09	5.35	5.94
52	SDN 2 Sukamulia	6.75	5.67	6.88	6.51	4.37	5.38	5.61	6.18
53	SDN 3 Masbagik Selatan	5.57	4.74	6.04	5.38	3.72	5.03	5.1	5.53
54	SDN 3 Selong	6.75	5.83	6.66	6.44	4.44	5.56	5.72	6.18
55	SDN 3 Teros	6.18	5.16	6.71	5.94	4.33	5.29	5.35	6.05
56	SDN 1 Bayan	0.14	1.19	2.19	0	4	2.09	0.82	3.49
57	SDN 2 Kayangan	6.41	5.59	6.42	6.12	4.53	3.33	5.82	5.96
58	SDN 2 Pemenang Barat	0	0.68	0.16	0	4.14	3.14	0.01	2.33
59	SDN 2 Tanjung	5.29	6.3	6.79	6.65	4.28	0.96	5.91	5.96
60	SDN 3 Gondang	0	0.75	0.16	0	4.1	3.19	0.01	2.33
Rata-Rata		6.1	5.32	6.35	5.92	4.26	4.85	5.28	5.92

Lampiran 8 Capaian Mutu SNP Sekolah Model Jenjang SMP Tahun 2016-2018

NO	NAMA SEKOLAH	Capaian SNP			Progress			Nilai Konversi Akreditasi Capaian Tahun 2017 atau 2018	Akreditasi Capaian Tahun 2017 atau 2018	Kategori		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	2016- 2017	2017- 2018	2016- 2018			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
1	SMPN 7 Mataram	5.13	5.82	5.56	naik	turun	turun	79	C	M4	M4	M4
2	SMPN 5 Mataram	3.55	5.77	5.45	naik	turun	turun	77	C	M2	M4	M4
3	SMPN 4 Mataram	4.94	5.36	5.5	naik	naik	naik	78	C	M3	M4	M4
4	SMPN 1 Pemenang	4.67	5.78	5.75	naik	turun	turun	82	B	M3	M4	M4
5	SMPN 1 Gangga	4.35	5.43	1.31	naik			77	C	M3	M4	M1
6	SMPN 1 Gunungsari	5.01	5.23	5.45	naik	naik	naik	77	C	M3	M4	M4
7	SMPN 1 Sekotong	4.95	5.85	5.85	naik	turun	turun	83	B	M3	M4	M4
8	SMPN 1 Kediri	5.29	5.73	5.72	naik	turun	turun	81	B	M4	M4	M4
9	SMPN 2 Lingsar	4.54	5.41	5.56	naik	naik	naik	79	C	M3	M4	M4
10	SMPN 1 Batukliang	5.05	5.72	5.66	naik	turun	turun	80	C	M3	M4	M4
11	SMPN 1 Pujut	4.75	6.02	5.55	naik	turun	turun	79	C	M3	M4	M4
12	SMPN 2 Praya	4.81	5.69	1.2	naik			81	B	M3	M4	M1
13	SMPN 1 Jonggat	4.95	5.25	5.62	naik	naik	naik	80	C	M3	M4	M4
14	SMPN 1 Praya Timur	4.75	5.5	5.51	naik	naik	naik	78	C	M3	M4	M4
15	SMPN 1 Sukamulia	5.03	5.84	5.47	naik	turun	turun	78	C	M3	M4	M4
16	SMPN 1 Terara	4.88	5.59	4.55	naik	turun	turun	64	TT	M3	M4	M3
17	SMPN 1 Sakra	4.31	5.05	1.2	naik			72	C	M3	M3	M1
18	SMPN 1 Pringgabaya	4.84	5.59	4.71	naik	turun	turun	67	TT	M3	M4	M3
19	SMPN 1 Aikmel	4.94	5.66	5.89	naik	naik	naik	84	B	M3	M4	M4
20	SMPN 1 Brang Rea	5.08	5.19	5.55	naik	naik	naik	79	C	M4	M4	M4
21	SMPN 1 Jereweh	4.97	5.35	5.48	naik	naik	naik	78	C	M3	M4	M4
22	SMPN 1 Seteluk	1.56	5.2	5.27		naik		75	C	M1	M4	M4
23	SMPN 6 Taliwang	1.51	5.5	5.61		naik		80	C	M1	M4	M4
24	SMPN 1 Moyo Hilir	4.7	5.46	5.61	naik	naik	naik	80	C	M3	M4	M4
25	SMPN 1 Plampang	4.7	5.36	5.63	naik	naik	naik	80	C	M3	M4	M4
26	SMPN 3 Sumbawa	4.96	5.77	4.81	naik	turun	turun	68	TT	M3	M4	M3
27	SMPN 1 Alas	5.34	5.92	1.36	naik			84	B	M4	M4	M1
28	SMPN 1 Manggelewa	1.15	4.16	5.8		naik		82	B	M1	M3	M4
29	SMPN 1 Woja	4.79	5.18	5.78	naik	naik	naik	82	B	M3	M4	M4
30	SMPN 4 Dompu	5.19	5.55	5.85	naik	naik	naik	83	B	M4	M4	M4
31	SMPN 6 Dompu	1.52	4.85	4.84		turun		69	TT	M1	M3	M3
32	SMPN 1 Monta	4.89	5.54	5.37	naik	turun	turun	76	C	M3	M4	M4
33	SMPN 5 Langgudu	4.81	5.74	6.03	naik	naik	naik	86	B	M3	M4	M4
34	SMPN 2 Madapangga	4.52	5.74	5.1	naik	turun	turun	72	C	M3	M4	M4
35	SMPN 3 Sape	1.6	5.58	5.85		naik		83	B	M1	M4	M4
36	SMPN 7 Kota Bima	4.84	5.56	5.63	naik	naik	naik	80	C	M3	M4	M4
37	SMPN 8 Kota Bima	4.15	3.18	5.72	turun	naik	turun	81	B	M3	M2	M4
38	SMPN 2 Kota Bima	5.12	5.82	1.3	naik			83	B	M4	M4	M1

Lampiran 9 Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SMP Tahun 2018

No	Nama Sekolah Model	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Isi	Standar Proses	Standar Penilaian Pendidikan	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Standar Pengelolaan Pendidikan	Standar Pembiayaan
1	SMPN 1 Monta	6.29	4.58	6.47	5.08	3.89	5.48	5.4	5.8
2	SMPN 2 Madapangga	5.99	4.12	5.97	4.92	3.57	5.19	4.98	6.07
3	SMPN 3 Sape	6.33	6.69	6.76	6.61	3.58	4.29	6.39	6.15
4	SMPN 5 Langgudu	6.64	6.66	6.8	6.73	3.46	5.43	5.57	6.93
5	SMPN 1 Manggalewa	6.72	6.04	6.77	6.42	3.78	4.24	6.29	6.15
6	SMPN 1 Woja	6.74	6.06	6.61	6.26	3.7	4.96	5.68	6.2
7	SMPN 4 Dompus	6.47	5.83	6.69	6.43	3.66	5.19	5.54	6.99
8	SMPN 6 Dompus	6.03	4.53	5.73	4.51	3.67	4.37	4.18	5.68
9	SMPN 2 Kota Bima	0	0.99	0.15	0	4.07	2.81	0.01	2.33
10	SMPN 7 Kota Bima	6.16	5.49	6.77	6.12	3.29	5.57	5.47	6.13
11	SMPN 8 Kota Bima	6.51	5.58	6.73	6.44	3.79	5.2	5.54	6
12	SMPN 1 Alas	0	0.98	0.14	0	3.93	3.52	0.01	2.33
13	SMPN 1 Moyo Hilir	6.25	5.28	6.5	5.96	4.38	5.22	5.22	6.09
14	SMPN 1 Plampang	6.6	5.31	6.45	6	3.8	5.47	5.45	5.95
15	SMPN 3 Sumbawa Besar	4.88	5.02	5.42	4.85	3.41	4.84	4.4	5.69
16	SMPN 1 Brang Rea	6.13	5.17	6.37	5.73	4.12	5.61	5.17	6.08
17	SMPN 1 Jereweh	6.17	5.18	6.25	6.1	4	5.55	5.22	5.39
18	SMPN 1 Seteluk	6.57	5.03	6.16	5.11	4.33	4.04	5.28	5.62
19	SMPN 6 Taliwang	6.16	4.94	6.62	6.06	3.9	5.41	5.6	6.16
20	SMPN 4 Mataram	6.12	5.63	6.34	5.97	3.77	5.16	5.35	5.64
21	SMPN 5 Mataram	6.22	5.04	6.54	6.22	4.04	5.29	5.03	5.19
22	SMPN 7 Mataram	6.84	4.98	6.43	5.99	3.84	5.02	5.35	6.04
23	SMPN 1 Gunungsari	6.35	5.24	6.22	6.3	3.56	5.4	4.91	5.64
24	SMPN 1 Kediri	6.16	5.9	6.66	6.08	3.7	5.51	5.49	6.22
25	SMPN 1 Sekotong	6.25	5.9	6.62	6.41	4.37	5.7	5.57	5.95
26	SMPN 2 Lingsar	6.78	5.06	6.34	5.68	4.19	5.4	5.09	5.92
27	SMPN 1 Batukliang	6.12	5.07	6.46	6.16	3.93	5.45	5.33	6.79
28	SMPN 1 Jonggat	6.71	5.57	6.14	6.07	4.24	4.11	6.1	6.03
29	SMPN 1 Praya Timur	6.35	5.09	5.9	6.14	4.15	5.25	4.98	6.21
30	SMPN 1 Pujut	6.23	5.34	6.44	5.83	3.86	4.83	5.19	6.71
31	SMPN 2 Praya	0	0.99	0.15	0	4.11	2.03	0.01	2.33
32	SMPN 1 Aikmel	6.66	5.86	6.63	6.43	3.87	5.35	5.45	6.83
33	SMPN 1 Pringgabaya	4.91	4.86	5.3	4.58	3.74	4.29	4.3	5.68
34	SMPN 1 Sakra	0	0.98	0.15	0	2.96	3.2	0.01	2.33
35	SMPN 1 Sukamulia	6.19	5.25	6.4	5.74	3.75	5.44	5.07	5.92
36	SMPN 1 Terara	4.84	4.29	5.31	4.51	3.26	4.3	4.27	5.59
37	SMPN 1 Gangga	0	0.92	0.15	0	3.87	3.23	0.01	2.33
38	SMPN 1 Pemenang	6.39	6.29	6.62	6.31	3.45	5.55	5.35	6.02
Rata-rata		6.24	5.36	6.35	5.87	3.82	5.09	5.28	6.04

Lampiran 10 Capaian Mutu SNP Sekolah Model Jenjang SMA Tahun 2016-2018

NO	NAMA SEKOLAH	Capaian SNP			Progress			Nilai Konversi Akreditasi Capaian Tahun 2017 atau 2018	Akreditasi Capaian Tahun 2017 atau 2018	Kategori		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	2016- 2017	2017- 2018	2016- 2018			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
1	SMAN 2 Mataram	4.76	5.3	5.44	naik	naik	naik	77	C	M3	M4	M4
2	SMAN 4 Mataram	5.44	5.9	6.02	naik	naik	naik	86	B	M4	M4	M4
3	SMAN 6 Mataram	5.02	5.05	5.65	naik	naik	naik	80	C	M3	M3	M4
4	SMAN 1 Kayangan	4.48	4.53	1.38	naik			64	TT	M3	M2	M1
5	SMAN 1 Pemenang	4.1	5.05	1.54	naik			72	C	M3	M3	M1
6	SMAN 1 Kuripan	5.05	5.53	5.81	naik	naik	naik	82	B	M3	M4	M4
7	SMAN 1 Lembar	5.49	4.79	5.36	turun	naik	turun	76	C	M4	M3	M4
8	SMAN 1 Gunungsari	4.77	5.04	5.36	naik	naik	naik	76	C	M3	M3	M4
9	SMAN 2 Praya	4.82	5.63	5.68	naik	naik	naik	81	B	M3	M4	M4
10	SMAN 1 Batukliang	4.96	3.96	5.75	turun	naik	turun	82	B	M3	M3	M4
11	SMAN 1 Praya Timur	4.94	5.85	5.89	naik	naik	naik	84	B	M3	M4	M4
12	SMAN 1 Terara	5.13	5.88	5.78	naik	turun	turun	82	B	M4	M4	M4
13	SMAN 2 Selong	5.06	4.1	5.46	turun	naik	turun	78	C	M4	M3	M4
14	SMAN 1 Pringgabaya	4.68	5.83	5.62	naik	turun	turun	80	C	M3	M4	M4
15	SMAN 1 Brang Rea	5.03	5.56	5.27	naik	turun	turun	75	C	M3	M4	M4
16	SMAN 1 Jereweh	1.92	4.36	4.08		turun		58	TT	M1	M3	M3
17	SMAN 1 Lape	4.86	5.37	5.48	naik	naik	naik	78	C	M3	M4	M4
18	SMAN 1 Alas	1.64	5.77	5.59		turun		79	C	M1	M4	M4
19	SMAN 3 Sumbawa	5.05	5.87	5.91	naik	naik	naik	84	B	M3	M4	M4
20	SMAN 1 Manggelewa	5.33	5.81	4.06	naik	turun	turun	58	TT	M4	M4	M3
21	SMAN 1 Woja	5.08	5.12	5.45	naik	naik	naik	77	C	M4	M4	M4
22	SMAN 1 Kempo	5.24	5.93	5.54	naik	turun	turun	79	C	M4	M4	M4
23	SMAN 1 Belo	4.85	5.82	5.59	naik	turun	turun	79	C	M3	M4	M4
24	SMAN 1 Madapangga	4.13	5.84	5.39	naik	turun	turun	77	C	M3	M4	M4
25	SMAN 1 Sape	4.79	5.35	5.72	naik	naik	naik	81	B	M3	M4	M4
26	SMAN 4 Kota Bima	4.57	5.17	5.82	naik	naik	naik	83	B	M3	M4	M4
27	SMAN 3 Kota Bima	4.77	5.23	5.68	naik	naik	naik	81	B	M3	M4	M4
28	SMAN 2 Kota Bima	5.09	5.77	1.37	naik			82	B	M4	M4	M1

Lampiran 11 Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SMA Tahun 2018

No	Nama Sekolah Model	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Isi	Standar Proses	Standar Penilaian Pendidikan	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Standar Pengelolaan Pendidikan	Standar Pembiayaan
1	SMAN 1 Belo	6.06	5.4	6.55	5.98	3.7	5.85	5.12	6.08
2	SMAN 1 Madapangga	6.11	4.7	6.31	5.63	3.78	5.78	5	5.83
3	SMAN 1 Sape	6.71	5.29	6.8	6.43	4.29	4.63	5.46	6.14
4	SMAN 1 Kempo	6.61	4.26	6.55	5.33	3.75	5.55	5.41	6.88
5	SMAN 1 Manggalewa	4.53	3.96	4.69	4.45	3.07	4.91	3.2	3.7
6	SMAN 1 Woja	6.71	5.21	6.05	4.59	4.03	5.83	5.16	6
7	SMAN 2 Kota Bima	0	0.89	0.15	0	4.11	3.49	0.01	2.33
8	SMAN 3 Kota Bima	6.6	5.69	6.38	6.03	3.57	5.35	5.58	6.2
9	SMAN 4 Kota Bima	6.89	5.72	6.53	5.98	4.19	5.75	5.39	6.14
10	SMAN 1 Alas	6.48	5.83	6.55	6.39	3.8	3.61	5.93	6.12
11	SMAN 1 Lape	6.66	5.17	6.53	6.3	2.88	4.57	5.57	6.19
12	SMAN 3 Sumbawa Besar	6.95	6.12	6.78	6.55	4.3	4.78	5.66	6.16
13	SMAN 1 Brang Rea	6.13	5.12	6.19	5.56	3.15	5	5.1	5.9
14	SMAN 1 Jereweh	5.33	4.35	4.77	2.4	4.03	2.83	2.94	6.01
15	SMAN 2 Mataram	6.53	4.72	6.48	6.15	4.14	3.97	5.41	6.12
16	SMAN 4 Mataram	6.88	6.23	6.67	6.63	3.85	5.94	5.73	6.21
17	SMAN 6 Mataram	6.77	5.1	6.53	6.44	3.93	5.53	4.89	6.01
18	SMAN 1 Gunungsari	6.39	4.65	6.17	5.86	3.96	5.96	4.04	5.82
19	SMAN 1 Kuripan	6.35	5.78	6.63	6.57	3.5	6.11	5.48	6.02
20	SMAN 1 Lembar	6.45	4.56	5.99	5.24	4.2	5.7	4.69	6.06
21	SMAN 1 Batukliang	6.45	5.42	6.47	6.31	4.19	5.46	5.56	6.17
22	SMAN 1 Praya Timur	6.66	6.16	6.7	6.65	3.26	5.82	5.69	6.21
23	SMAN 2 Praya	6.35	5.45	6.15	6.48	4.01	5.59	5.48	5.9
24	SMAN 1 Pringgabaya	6.47	4.79	6.51	6.08	3.91	5.77	5.38	6.07
25	SMAN 1 Terara	6.42	6.19	6.64	6.25	3.7	5.68	5.33	6
26	SMAN 2 Selong	6.57	5.13	6.28	5.25	3.72	5.79	5.06	5.88
27	SMAN 1 Kayangan	0	0.91	0.15	0	3.64	3.99	0.01	2.33
28	SMAN 1 Pemenang	0	0.95	0.15	0	4.16	4.7	0.03	2.33
Rata-rata		6.4	5.24	6.32	5.82	3.8	5.27	5.13	5.99

Lampiran 12 Capaian Mutu SNP Sekolah Model Jenjang SMK Tahun 2016-2018

NO	NAMA SEKOLAH	Capaian SNP			Progress			Nilai Konversi Akreditasi Capaian Tahun 2017 atau 2018	Akreditasi Capaian Tahun 2017 atau 2018	Kategori		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	2016- 2017	2017- 2018	2016- 2018			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	SMKN 1 Mataram	2.92	5.66	5.59	naik	turun	turun	79	C	M2	M4	M4
2	SMKN 6 Mataram	1.23	4.46	4.79		naik		68	TT	M1	M3	M3
3	SMKN 9 Mataram	4.57	5.04	3.84	naik	turun	turun	54	TT	M3	M3	M3
4	SMKN 1 Gangga	4.39	4.81	4.83	naik	naik	naik	69	TT	M3	M3	M3
5	SMKN 1 Bayan	4.27	4.98	4.96	naik	turun	turun	70	TT	M3	M3	M3
6	SMKN 1 Narmada	4.76	5.18	5.06	naik	turun	turun	72	C	M3	M4	M3
7	SMKN 2 Gerung	4.57	5.37	5.09	naik	turun	turun	72	C	M3	M4	M4
8	SMKN 1 Gunungsari	4.98	4.51	5.23	turun	naik	turun	74	C	M3	M3	M4
9	SMKN 1 Praya Barat	1.27	0.36	5.19				74	C	M1	M1	M4
10	SMKN 1 Pujut	4.49	5.31	5.81	naik	naik	naik	83	B	M3	M4	M4
11	SMKN 1 Kopang	4.16	5.6	5.1	naik	turun	turun	72	C	M3	M4	M4
12	SMKN 3 Selong	1.29	5.08	5.83		naik		83	B	M1	M4	M4
13	SMKN 1 Sambelia											
14	SMKN 1 Sikur	4.47	4.72	5.16	naik	naik	naik	73	C	M3	M3	M4
15	SMKN 1 Taliwang	4.61	5.88	5.42	naik	turun	turun	77	C	M3	M4	M4
16	SMKN 3 Sumbawa	5.29	4.94	5.29	turun	naik	turun	75	C	M4	M3	M4
17	SMKN 1 Lopok	4.7	4.83	5.12	naik	naik	naik	73	C	M3	M3	M4
18	SMKN 1 Manggalewa	4.21	5.13	5.15	naik	naik	naik	73	C	M3	M4	M4
19	SMKN 1 Woja	0.99	5.44	5.65		naik		80	C	M1	M4	M4
20	SMKN 1 Bima	1.61	1.18	4.5		naik		64	TT	M1	M1	M3
21	SMKN 5 Bima	1.34	5.51	5.57		naik		79	C	M1	M4	M4
22	SMKN 2 Bima	1.35	5.14	5.28		naik		75	C	M1	M4	M4
23	SMKN 3 Kota Bima	4.55	5.58	5.45	naik	turun	turun	77	C	M3	M4	M4
24	SMKN 2 Kota Bima	1.28	5.54	5.57		naik		79	C	M1	M4	M4

Lampiran 13 Rapor Mutu Sekolah Model Jenjang SMK Tahun 2018

No	Nama Sekolah Model	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Isi	Standar Proses	Standar Penilaian Pendidikan	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Standar Pengelolaan Pendidikan	Standar Pembiayaan
1	SMKN 1 Bima	6.14	5.84	6.5	6.2	4.37	2.98	6.03	5.8
2	SMKN 2 Bima	6.09	5.59	6.21	5.87	4.24	3.05	5.58	5.8
3	SMKN 5 Bima	6.3	6.15	6.65	6.2	4.14	3.33	6.16	6.07
4	SMKN 1 Manggalewa	5.85	4.9	6.35	5.9	3.81	3.97	4.94	5.48
5	SMKN 1 Woja	6.24	5.92	6.71	6.44	4.11	3.56	6.11	6.14
6	SMKN 2 Kota Bima	6.49	5.18	6.66	6.61	3.62	4.28	5.6	6.15
7	SMKN 3 Kota Bima	6.62	5.35	6.41	5.63	3.98	3.31	5.72	6.02
8	SMKN 1 Lopok	6.17	4.53	6.33	5.58	3.44	3.81	5.17	5.95
9	SMKN 3 Sumbawa Besar	6.52	5.5	6.28	5.74	3.99	3.09	5.47	5.72
10	SMKN 1 Taliwang	5.79	5.5	6.31	5.8	3.69	4.26	5.38	6.65
11	SMKN 1 Mataram	6.45	5.65	6.54	6.07	4.13	4.15	5.64	6.11
12	SMKN 6 Mataram	5.72	3.98	5.87	5.4	3.64	3.6	4.43	5.69
13	SMKN 9 Mataram	3.89	3.37	4.26	4.18	3.55	2.63	3.65	5.19
14	SMKN 1 Gunungsari	6.62	4.31	6.52	6.02	4.19	4.27	3.72	6.22
15	SMKN 1 Narmada	6.45	4.54	6.15	4.99	3.72	4.14	4.69	5.79
16	SMKN 2 Gerung	6.2	4.34	6.08	5.42	3.94	4.14	4.76	5.8
17	SMKN 1 Kopang	5.74	4.86	5.64	5.75	3.35	4.25	5.27	5.92
18	SMKN 1 Pujut	7	5.68	6.99	6.86	3.6	4.39	5.82	6.14
19	SMKN 1 Praya Barat	6.15	5.13	6.21	5.63	4.11	2.78	5.74	5.76
20	SMKN 1 Sikur	6.21	4.73	6.05	6.08	3.81	4.01	4.84	5.54
21	SMKN 3 Selong	6.97	6.55	6.95	6.9	3.26	4.11	5.76	6.16
22	SMKN 1 Sambelia								
23	SMKN 1 Bayan	6.24	4.44	6.01	4.84	3.57	4.26	4.59	5.75
24	SMKN 1 Gangga	6.11	4.23	6.19	4.99	3.28	3.98	4.28	5.6
Rata-rata		6.17	5.06	6.26	5.79	3.81	3.75	5.19	5.89

Lampiran 14 Hasil Akreditasi Versi BAN dan Versi Capaian Mutu 2018 Jenjang SD

No	Nama Sekolah	Akreditasi Versi BAN	Akreditasi Versi Capaian Mutu 2018	Perbandingan
1	SDN 1 Ampenan	A	B	lebih rendah
2	SDN 26 Cakranegara	A	C	lebih rendah
3	SDN 11 Mataram	A	B	lebih rendah
4	SDN 6 Mataram	A	B	lebih rendah
5	SDN 2 Cakranegara	A	B	lebih rendah
6	SDN 2 Kayangan	B	C	lebih rendah
7	SDN 1 Bayan	B	TT	lebih rendah
8	SDN 3 Gondang	B	C	lebih rendah
9	SDN 2 Tanjung	A	C	lebih rendah
10	SDN 2 Pemenang Barat	B	TT	lebih rendah
11	SDN 1 Jembatan Gantung	B	B	sama
12	SDN 3 Cendi Manik	B	C	lebih rendah
13	SDN 1 Dasan Tereng	B	B	sama
14	SDN 1 Beleka	B	B	sama
15	SDN 1 Sandik	B	C	lebih rendah
16	SDN 1 Batu Kumbang	B	TT	lebih rendah
17	SDN Durian	A	B	lebih rendah
18	SDN 2 Mantang	A	TT	lebih rendah
19	SDN 3 Penujak	B	B	sama
20	SDN 1 Tengari	B	B	sama
21	SDN 1 Ubung	A	B	lebih rendah
22	SDN 2 Sengkol	A	B	lebih rendah
23	SDN 1 Kopang	A	B	lebih rendah
24	SDN 3 Masbagik Selatan	B	C	lebih rendah
25	SDN 1 Pengkelak Mas	B	C	lebih rendah
26	SDN 1 Selebung Ketangga	A	C	lebih rendah
27	SDN 2 Sukamulia	A	B	lebih rendah
28	SDN 3 Teros	A	C	lebih rendah
29	SDN 2 Bagik Payung	B	C	lebih rendah
30	SDN 1 Montong Tangi	A	C	lebih rendah
31	SDN 3 Selong	A	B	lebih rendah
32	SDN 3 Maluk	B	C	lebih rendah
33	SDN 9 Taliwang	A	B	lebih rendah
34	SDN 1 Jereweh	A	B	lebih rendah
35	SDN Desa Beru	B	C	lebih rendah
36	SDN 2 Seteluk	A	C	lebih rendah
37	SDN 6 Sumbawa	A	B	lebih rendah
38	SDN 1 Sumbawa Besar	A	B	lebih rendah
39	SDN 1 Plampang	A	B	lebih rendah

No	Nama Sekolah	Akreditasi Versi BAN	Akreditasi Versi Capaian Mutu 2018	Perbandingan
40	SDN Uma Beringin	B	TT	lebih rendah
41	SDN 2 Utan	B	B	sama
42	SDN Sebewe	B	TT	lebih rendah
43	SDN 07 Manggelewa	B	C	lebih rendah
44	SDN 07 Pekat	B	C	lebih rendah
45	SDN 05 Hu'u	A	C	lebih rendah
46	SDN 02 Dompu	A	B	lebih rendah
47	SDN 01 Woja	B	TT	lebih rendah
48	SDN Rato	C	B	lebih rendah
49	SDN 2 Maria	A	B	lebih rendah
50	SDN 9 Sila	B	B	sama
51	SDN Panda	B	C	lebih rendah
52	SDN 1 Tawali	B	C	lebih rendah
53	SDN Talabiu	B	TT	lebih rendah
54	SDN 1 Sila	A	B	lebih rendah
55	SDN Karumbu	A	B	lebih rendah
56	SDN 46 Lela Kota Bima	B	C	lebih rendah
57	SDN 19 Rabangodu Utara Kota Bima	A	C	lebih rendah
58	SDN 2 Suntu Kota Bima	A	B	lebih rendah
59	SDN 11 Manggemaci Kota Bima	A	B	lebih rendah
60	SDN 55 Dara Kota Bima	A	B	lebih rendah

Lampiran 15 Hasil Akreditasi Versi BAN dan Versi Capaian Mutu 2018 Jenjang SMP

No	Nama Sekolah	Akreditasi Versi BAN	Akreditasi Versi Capaian Mutu 2018	Perbandingan
1	SMPN 7 Mataram	A	C	lebih rendah
2	SMPN 5 Mataram	A	C	lebih rendah
3	SMPN 4 Mataram	A	C	lebih rendah
4	SMPN 1 Pemenang	A	B	lebih rendah
5	SMPN 1 Gangga	A	C	lebih rendah
6	SMPN 1 Gunungsari	A	C	lebih rendah
7	SMPN 1 Sekotong	A	B	lebih rendah
8	SMPN 1 Kediri	A	B	lebih rendah
9	SMPN 2 Lingsar	A	C	lebih rendah
10	SMPN 1 Batukliang	B	C	lebih rendah
11	SMPN 1 Pujut	B	C	lebih rendah
12	SMPN 2 Praya	A	B	lebih rendah
13	SMPN 1 Jonggat	A	C	lebih rendah
14	SMPN 1 Praya Timur	B	C	lebih rendah
15	SMPN 1 Sukamulia	B	C	lebih rendah
16	SMPN 1 Terara	A	TT	lebih rendah
17	SMPN 1 Sakra	B	C	lebih rendah
18	SMPN 1 Pringgabaya	A	TT	lebih rendah
19	SMPN 1 Aikmel	A	B	lebih rendah
20	SMPN 1 Brang Rea	A	C	lebih rendah
21	SMPN 1 Jereweh	A	C	lebih rendah
22	SMPN 1 Seteluk	A	C	lebih rendah
23	SMPN 6 Taliwang	A	C	lebih rendah
24	SMPN 1 Moyo Hilir	A	C	lebih rendah
25	SMPN 1 Plampang	A	C	lebih rendah
26	SMPN 3 Sumbawa	A	TT	lebih rendah
27	SMPN 1 Alas	A	B	lebih rendah
28	SMPN 1 Manggelewa	B	B	sama
29	SMPN 1 Woja	A	B	lebih rendah
30	SMPN 4 Dompu	B	B	sama
31	SMPN 6 Dompu	B	TT	lebih rendah
32	SMPN 1 Monta	A	C	lebih rendah
33	SMPN 5 Langgudu	B	B	sama
34	SMPN 2 Madapangga	B	C	lebih rendah
35	SMPN 3 Sape	A	B	lebih rendah
36	SMPN 7 Kota Bima	A	C	lebih rendah
37	SMPN 8 Kota Bima	A	B	lebih rendah
38	SMPN 2 Kota Bima	B	B	lebih rendah

Lampiran 16 Hasil Akreditasi Versi BAN dan Versi Capaian Mutu 2018 Jenjang SMA

No	Nama Sekolah	Akreditasi Versi BAN	Akreditasi Versi Capaian Mutu 2018	Perbandingan
1	SMAN 2 Mataram	A	C	lebih rendah
2	SMAN 4 Mataram	A	B	lebih rendah
3	SMAN 6 Mataram	A	C	lebih rendah
4	SMAN 1 Kayangan	A	TT	lebih rendah
5	SMAN 1 Pemenang	B	C	lebih rendah
6	SMAN 1 Kuripan	A	B	lebih rendah
7	SMAN 1 Lembar	A	C	lebih rendah
8	SMAN 1 Gunungsari	A	C	lebih rendah
9	SMAN 2 Praya	A	B	lebih rendah
10	SMAN 1 Batukliang	A	B	lebih rendah
11	SMAN 1 Praya Timur	A	B	lebih rendah
12	SMAN 1 Terara	A	B	lebih rendah
13	SMAN 2 Selong	A	C	lebih rendah
14	SMAN 1 Pringgabaya	A	C	lebih rendah
15	SMAN 1 Brang Rea	B	C	lebih rendah
16	SMAN 1 Jereweh	A	TT	lebih rendah
17	SMAN 1 Lape	A	C	lebih rendah
18	SMAN 1 Alas	A	C	lebih rendah
19	SMAN 3 Sumbawa	A	B	lebih rendah
20	SMAN 1 Manggelewa	A	TT	lebih rendah
21	SMAN 1 Woja	A	C	lebih rendah
22	SMAN 1 Kempo	A	C	lebih rendah
23	SMAN 1 Belo	A	C	lebih rendah
24	SMAN 1 Madapangga	A	C	lebih rendah
25	SMAN 1 Sape	A	B	lebih rendah
26	SMAN 4 Kota Bima	A	B	lebih rendah
27	SMAN 3 Kota Bima	A	B	lebih rendah
28	SMAN 2 Kota Bima	A	B	lebih rendah

**LPMP NTB**

Jl. Panji Tilamegara No.8, Taman Sari, Ampenan,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114
Telepon: (0370) 631088



www.lmpntb.kemdikbud.go.id



LPMP NTB



@lmpntb



Instagram

@lmpnusatenggarabar



lmp ntb



ULT LPMP NTB
0811 3906 669